

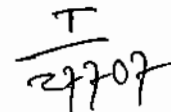
**DAMPAK PEMBIAYAAN UMKM TERHADAP
PEREKONOMIAN INDONESIA
(Periode 2001 – 2007)**



TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan
studi pada Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Universitas Indonesia

Oleh :



ASTY SETIAUTAMI

NPM : 6605220101

MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA

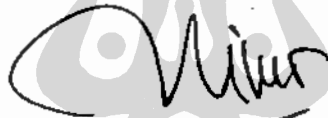
DEPOK, 2008

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : **Asty Setiautami**
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 21 Nopember 1973
NPM : 6605220101
Judul Tesis : Dampak Pembiayaan UMKM Terhadap
Perekonomian Indonesia
Periode (2001 – 2007)

Depok, Juli 2008

Menyetujui
Pembimbing



Dr. Ir. Nining Indroyono Soesilo, MA

Mengetahui :

Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Ketua Program Studi.



(Dr. B. Raksaka Mahi)

NIP. 131.923.199

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagiMu Allah yang telah mengizinkan saya untuk dapat menyelesaikan semua ini dengan baik, semoga memang ini yang Engkau rencanakan untuk hidupku.

Pembuatan tesis ini saya lakukan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada jenjang Magister di Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (MPKP FEUI). Dengan menyelesaikan tesis ini tidak berarti berakhirnya masa belajar saya, justru inilah awal saya untuk mempelajari segala hal yang berhubungan dengan kebijakan publik melalui dasar ilmu yang saya dapat di MPKP.

Melalui pembuatan tesis ini pula saya dapat memahami proses sebuah kebijakan publik dihasilkan, mulai dari membaca permasalahan yang ada dalam dunia nyata, mengumpulkan fakta-fakta hingga mengkaji hasil pengolahan data dan akhirnya menyimpulkan sebuah kebijakan yang sekiranya cocok dengan keadaan.

Banyak kesulitan, kekurangan dan keterbatasan tentunya dalam penulisan tesis ini, tetapi justru inilah yang mungkin dapat menjadi acuan bagi kesempurnaan tulisan selanjutnya. Segala kesulitan dan hambatan dalam pembuatan tesis ini dapat diatasi juga karena bantuan dan dukungan dari berbagai pihak disekeliling penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Ir. Nining I. Soesilo, MA selaku dosen pembimbing, atas segala masukan dan saran untuk penyelesaian tesis ini.
2. Ibu Dr. Telisa Aulia Falianty dan Bapak Imam Rozani, MSc atas kesediannya menjadi dosen penguji dan ketua penguji, masukan Ibu dan Bapak sangat banyak untuk menyempurnakan tesis ini.
3. Bapak Achmadi atas kesediaan bapak menjadi moderator dalam seminar tesis ini, masukan bapak menambah ide dalam pembahasan hasil tesis ini.
4. Almarhumah Ibu tercinta, perjuangan hidup ibu menjadi contoh dan tambahan semangat dalam menyikapi hambatan hidup.

5. Bapak, terima kasih atas doanya, kesabaran dan pengertian Bapak menjadi pemicu untuk lebih semangat mengumpulkan "tabungan masa depan".
6. Bapak dan Ibu Sugijono, mertua dan guru yang baik untuk saya.
7. Dini, Tatum dan Susi, terima kasih atas kecerewetan dan semangatnya menemani perjalanan kuliah ini. Tanpa kalian rasanya akan sulit saya menyelesaikan kuliah sambil bekerja.
8. Mirna, Yati, Denti, Ria, Dini, Noni, Pak Wasdi, Firdaus, Adi, Pak Aep, Pak Ali dan teman-teman yang lain, terima kasih atas pertemanan dan keceriaannya, capek juga ya kalau kuliah dan kerja ini tanpa canda kalian.
9. Dan yang terakhir tetapi paling tidak akan terlupakan, terima kasih untuk jagoan-jagoanku, untuk suamiku "mas Aris" dan anakku "Artee". Semua ini tidak akan berarti tanpa kalian. Maaf sudah membuat kalian ikut pusing dengan semua kesibukan ini, semoga keberhasilan ini bisa bermanfaat dan menjadi berkah untuk keluarga kita.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua.

Jakarta, Juli 2008

Asty Setiautami

DAFTAR ISI

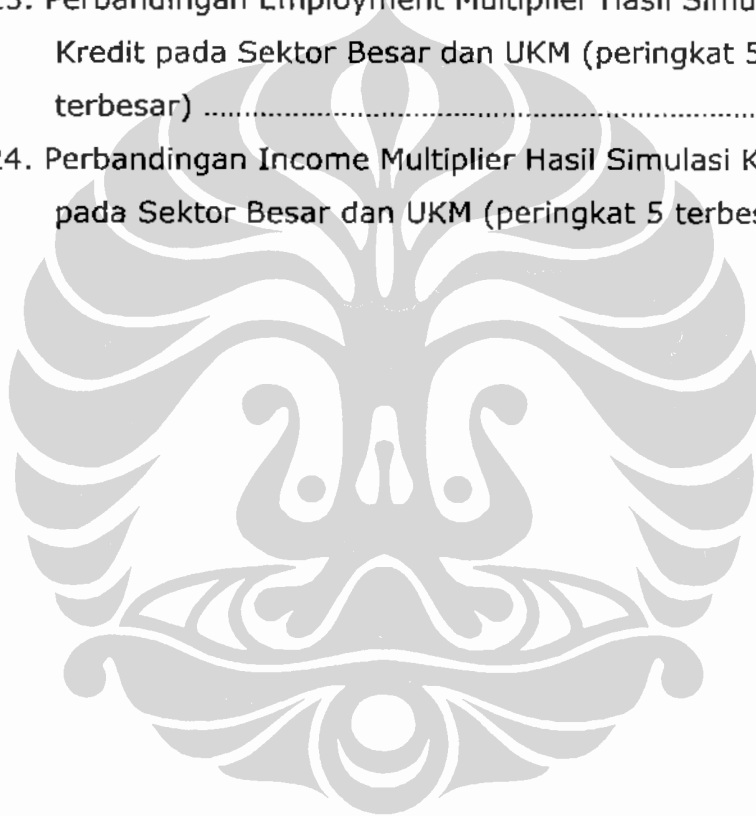
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Rumusan masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Sumber data dan metodologi	8
1.6. Sistematika Penulisan	9
2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Tinjauan tentang UMKM	11
2.1.1. Usaha Mikro	11
2.1.2. Usaha Kecil	12
2.1.3. Usaha Menengah	13
2.1.4. Kriteria Jenis Usaha Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja	15
2.1.5. Kebijakan Kredit untuk UMKM	16
2.2. Kredit, Perekonomian dan Penggunaan Input Output	25
2.3. Tinjauan Terhadap Penelitian Terkait	38
3. METODOLOGFI PENELITIAN	41
3.1. Jenis dan Sumber Data	42
3.2. Tahapan Analisis	42
3.3. Sekilas tentang Tabel Input-Output	43
3.4. Sistematika Tabel I-O	44
3.5. Analisis Angka Pengganda (Multiplier)	47

3.5.1. Pengganda Output (<i>Income multiplier</i>)	48
3.5.2. Pengganda Pendapatan Rumah Tangga (<i>income multiplier</i>)	50
3.5.3. Pengganda Tenaga Kerja (<i>Employment Multiplier</i>) ...	54
3.6. Analisis Keterkaitan (<i>Linkage Analysis</i>)	55
3.6.1. Keterkaitan ke Belakang (<i>Backward Linkage</i>)	55
3.6.2. Keterkaitan ke Depan (<i>Forward Linkage</i>)	56
3.7. Multiplier Product Matrix (MPM)	57
4. HASIL DAN PEMBAHASAN	58
4.1. Gambaran Umum Kredit pada Usaha Kecil dan Menengah 2001 – 2007	58
4.2. Gambaran Umum Perekonomian berdasarkan Tabel I-O UKM 2000 dengan tambahan kredit UKM	60
4.3. Analisis Pengganda dengan tambahan kredit UKM	62
4.3.1. Pengganda Output (<i>Income multiplier</i>)	62
4.3.2. Pengganda Pendapatan Rumah Tangga (<i>Income multiplier</i>)	63
4.3.3. Pengganda Tenaga Kerja (<i>Employment Multiplier</i>)	65
4.4. Analisis Keterkaitan (<i>Linkage Analysis</i>) dengan tambahan kredit UKM	67
4.4.1. Keterkaitan ke Belakang (<i>Backward Linkage/BL</i>)	67
4.4.2. Indeks Keterkaitan ke Depan (<i>Forward Linkage/FL</i>).....	69
4.5. Analisis Pengganda setelah simulasi	72
4.5.1. Pengganda Output (<i>Income multiplier</i>).....	72
4.5.2. Pengganda Pendapatan Rumah Tangga (<i>Income multiplier</i>)	75
4.5.3. Pengganda Tenaga Kerja (<i>Employment Multiplier</i>)	79
4.6. Analisis Keterkaitan (<i>Linkage Analysis</i>) Setelah Simulasi	82
4.6.1. Keterkaitan ke Belakang (<i>BackwardLinkage/BL</i>)	82
4.6.2. Keterkaitan ke Depan (<i>Forward Linkage/FL</i>)	86
4.7. Analisis MPM (Multiplier Product Matrix)	90
4.8. Pembahasan dan Analisis	91
5. KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN SARAN	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Rekapitulasi Rencana Bisnis Perbankan Untuk Kredit Mikro, kecil dan menengah Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2006	6
Tabel 2.1. Jumlah Tenaga Kerja Sesuai Kriteria Usaha	15
Tabel 2.2. Kegiatan Keuangan Mikro dan Dampaknya terhadap Penanggulangan Kemiskinan	24
Tabel 4.1. Komposisi Output Sektoral UKM Indonesia 2000	61
Tabel 4.2. <i>Income multiplier</i> I-O UKM Awal	62
Tabel 4.3. <i>Income multiplier</i> I-O UKM Awal	64
Tabel 4.4. Employment Multiplier I-O UKM Awal	66
Tabel 4.5. Backward Linkage Awal	68
Tabel 4.6. Forward Linkage Awal	70
Tabel 4.7. <i>Income multiplier</i> Hasil Simulasi	72
Tabel 4.8. Tabel perbandingan <i>Income multiplier</i> sebelum dan sesudah simulasi	73
Tabel 4.9. Peringkat sektoral berdasarkan nilai perubahan Output Multiplier	74
Tabel 4.10. <i>Income multiplier</i> Hasil Simulasi	76
Tabel 4.11. Tabel perbandingan Nilai Pengganda Pendapatan	77
Tabel 4.12. Peringkat sektoral berdasarkan nilai perubahan Income Multiplier	78
Tabel 4.13. Tabel 4.11. Employment Multiplier Hasil Simulasi	79
Tabel 4.14. Tabel perbandingan Nilai Pengganda Tenaga Kerja Sebelum dan Sesudah Simulasi	80
Tabel 4.15. Peringkat sektoral berdasarkan nilai perubahan Employment Multiplier	81
Tabel 4.16. Peringkat sektoral berdasarkan backward Linkage Setelah Simulasi	83
Tabel 4.17. Peringkat sektoral berdasarkan backward Linkage Sebelum dan sesudah Simulasi	84
Tabel 4.18. Peringkat sektoral berdasarkan Nilai Perubahan	

backward Linkage	85
Tabel 4.19. Peringkat sektoral berdasarkan Forward Linkage setelah Simulasi	87
Tabel 4.20. Peringkat sektoral berdasarkan Forward Linkage Sebelum dan sesudah Simulasi	88
Tabel 4.21. Peringkat Sektoral berdasarkan Nilai Perubahan Forward Linkage	89
Tabel 4.22. Perbandingan Output Multiplier Hasil Simulasi Kredit pada Sektro Besar dan UKM (peringkat 5 terbesar)	95
Table. 4.23. Perbandingan Employment Multiplier Hasil Simulasi Kredit pada Sektor Besar dan UKM (peringkat 5 terbesar)	96
Tabel. 4.24. Perbandingan Income Multiplier Hasil Simulasi Kredit pada Sektor Besar dan UKM (peringkat 5 terbesar).....	97



DAFTAR GAMBAR

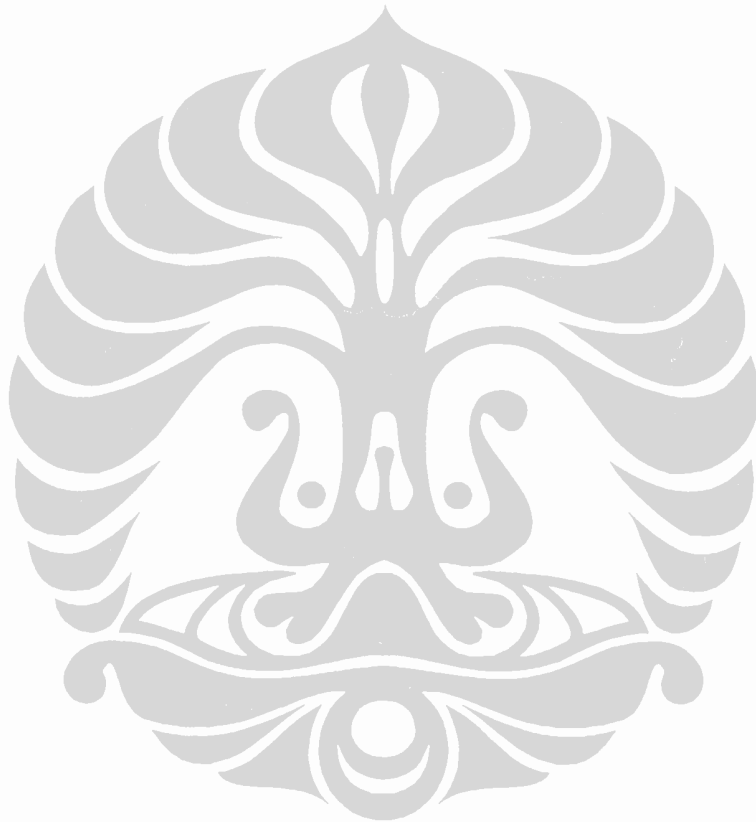
Gambar 1.1. Proporsi Kontribusi UKM dan Usaha Besar terhadap PDB Nasional tahun 2005-2006 Menurut Harga Berlaku	2
Gambar 1.2. Proporsi Jumlah Tenaga Kerja UKM dan Usaha Besar Tahun 2005-2006	2
Gambar 1.3. Sumber-Sumber yang Melayani UMKM Tidak Berbadan Hukum dan UMKM yang Dilayani Tahun 2001 dan 2002	4
Gambar 3.1. Diagram Tahapan Analisis	42
Gambar 3.2. Diagram Tabel Input Output	45
Grafik 4.1. Alokasi Kredit UMKM 2001-2007	58
Grafik 4.2. Alokasi Kredit Usaha Besar 2001-2007	59
Grafik 4.3. Persentase Alokasi Kredit UMKM terhadap Kredit Usaha Besar	60
Gambar 4.4. Grafik Struktur Perekonomian Sebelum dan Sesudah adanya Kredit UKM	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Klasifikasi Agregasi tabel I-O UKM 17

Lampiran 2. Tabel I-O UKM 17 sektor

Lampiran 3. Tabel I-O UKM hasil simulasi RAS



BAB I

PENDAHULUAN

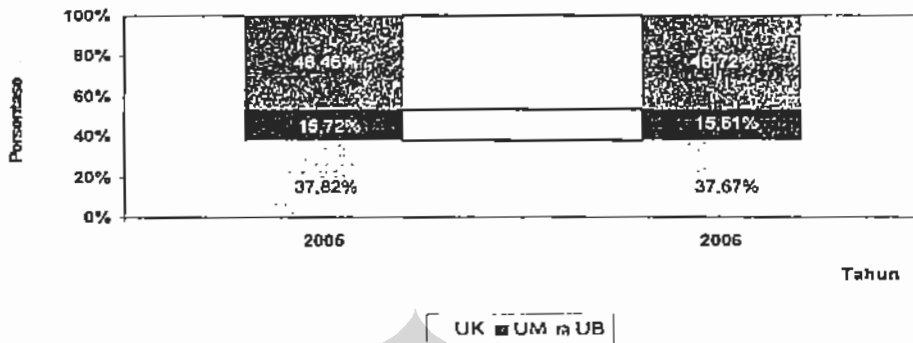
1.1. Latar Belakang

Berdasarkan data yang tersedia di Badan Pusat statistik (BPS), selama masa krisis Indonesia antara tahun 1998 – 2000 perekonomian Indonesia mengalami kebangkrutan, tetapi lain halnya dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Mereka justru dapat bertahan apalagi UMKM yang mejadi produsen ekspor dan yang melakukan ekspor tidak langsung, justru mereka dapat menghasilkan devisa.

Selama masa awal pemulihan krisis pun, antara tahun 2000 – 2003 besaran Produk Domestik Bruto yang diciptakan UMKM dalam tahun 2003 mencapai nilai Rp 1.013,5 triliun (56,7 persen dari PDB). Jumlah unit usaha UMKM pada tahun 2003 mencapai 42,4 juta, sedangkan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor ini tercatat 79,0 juta pekerja. Pertumbuhan PDB UMKM periode 2000 – 2003 ternyata lebih tinggi daripada total PDB, yang sumbangan pertumbuhannya lebih besar dibandingkan dengan Usaha Besar. UMKM dapat dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Perannya dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja diharapkan menjadi langkah awal bagi upaya pemerintah menggerakkan sektor produksi pada berbagai lapangan usaha.

Berdasarkan laporan Statistik dari Kementrian Koperasi dan UKM, pada tahun 2005 - 2006, peran UKM terhadap penciptaan PDB nasional menurut harga berlaku tercatat sebesar Rp. 1.778,75 triliun atau 53,28 persen dari total PDB nasional, mengalami perkembangan sebesar Rp. 287,68 triliun atau 19,29 persen dibanding tahun 2005. Kontribusi Usaha Kecil (UK) tercatat sebesar Rp. 1.257,65 triliun atau 37,67 persen dan Usaha Menengah (UM) sebesar Rp. 521,09 triliun atau 15,61 persen, selebihnya sebesar Rp. 1.559,45 triliun atau 46,72 persen merupakan kontribusi Usaha Besar (UB).

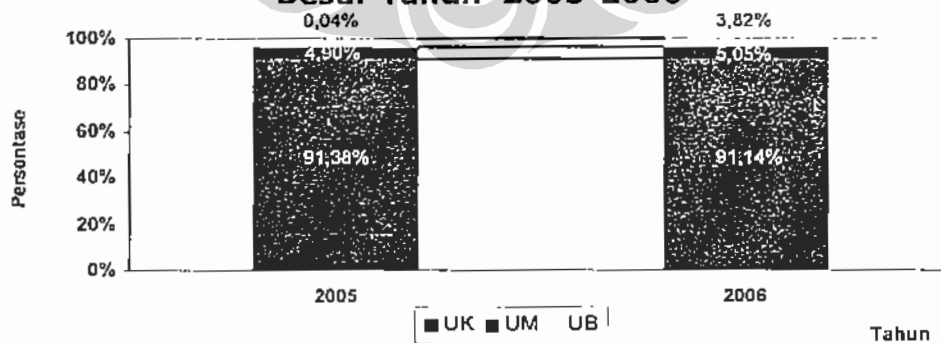
Gambar 1.1. Proporsi Kontribusi UKM dan Usaha Besar terhadap PDB Nasional tahun 2005-2006 Menurut Harga Berlaku



Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM

Dalam hal penyerapan tenaga kerja, UKM ternyata juga merupakan mampu menyerap tenaga kerja lebih besar dibanding Usaha Besar. Pada tahun 2006, UKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 85.416.493 orang atau 96,18 persen dari total penyerapan tenaga kerja yang ada, jumlah ini meningkat sebesar 2,62 persen atau 2.182.700 orang dibandingkan tahun 2005. Kontribusi UK tercatat sebanyak 80.933.384 orang atau 91,14 persen dan UM sebanyak 4.483.109 orang atau 5,05 persen.

Gambar 1.2. Proporsi Jumlah Tenaga Kerja UKM dan Usaha Besar Tahun 2005-2006



Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM

Untuk UK sektor Pertanian, Peternakan, Perhutanan dan Perikanan tercatat memiliki peran terbesar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu

sebanyak 37.965.878 orang atau 46,91 persen dari total tenaga kerja yang di serap. Sedangkan sektor ekonomi yang memiliki penyerapan tenaga kerja terbesar pada UM adalah sektor Industri Pengolahan yaitu sebanyak 1.827.073 orang atau 40,75 persen.

Seperti halnya Negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, Korea, UMKM mereka merupakan potensi besar atas kekuatan domestik dalam menghadapi era globalisasi. Bahkan dengan pengelolaan yang baik, UMKM dapat dirubah menjadi usaha menengah yang tangguh, meskipun dalam prakteknya Usaha Besar, Usaha menengah dan usaha kecil bersifat saling melengkapi. Usaha Kecil umumnya memiliki keunggulan dalam bidang yang memanfaatkan sumberdaya alam dan padat karya, seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan dan restoran. Usaha menengah memiliki keunggulan dalam penciptaan nilai tambah di sektor hotel, keuangan, persewaan, jasa perusahaan dan kehutanan. Sedangkan usaha besar memiliki keunggulan dalam industri pengolahan, listrik dan gas, komunikasi dan pertambangan.

Disisi lain UKM juga memiliki kelemahan-kelemahan. Secara garis besar mencakup: *pertama*, masih sulitnya akses UMKM pada pasar atas produk-produk yang dihasilkannya, *kedua*, masih lemahnya pengembangan dan penguatan usaha, serta *ketiga*, keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal khususnya dari perbankan. Usaha mikro dan kecil umumnya mengandalkan pada modal sendiri dalam menjalankan bisnisnya, dan sering terjebak dengan keterikatan pada rentenir mengingat masih rendahnya aksesabilitas terhadap sumber-sumber pembiayaan formal.

Saat ini beberapa strategi yang ditempuh dalam upaya pemberdayaan UMKM yang terkait dengan permodalan/pembiayaan UMKM dilaksanakan melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM). LKM yang pada saat ini menjadi sumber terdekat bagi pembiayaan UMKM, belum diatur secara jelas di dalam Arsitektur Perbankan Indonesia

(API), yang mengatur hanya sampai tingkat BPR (Bank Perkreditan Rakyat).

Di Indonesia LKM menurut Bank Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) kategori LKM yang berwujud Bank maupun nonBank. LKM yang berwujud Bank adalah BRI Unit Desa, BPR dan BKD (Badan Kredit Desa). Sedangkan yang bersifat non bank adalah Koperasi simpan pinjam (KSP), Unit simpan Pinjam (USP), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), *baitl mal wattanwil* (BMT), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), arisan, pola pembiayaan Grameen, pola pembiayaan ASA, kelompok swadaya masyarakat (KSM), dan Credit Union.

Dari perbandingan data BPS tahun 2001 dan 2002 hasilnya menunjukkan adanya perubahan dibandingkan tahun 2001 dimana sumber permodalan koperasi tercatat mampu memberikan pelayanan kepada 101.025 UMKM atau mengalami peningkatan sebesar 20,21 persen. Perorangan sebanyak 742.326 UMKM atau mengalami peningkatan sebesar 22,66 persen, Keluarga/famili sebanyak 413.174 UMKM atau mengalami peningkatan sebesar 17,91 persen.

Gambar 1.3. Sumber-Sumber yang Melayani UMKM Tidak Berbadan Hukum dan UMKM yang dilayani Tahun 2001 dan 2002



Sumber: Statistik Perkoperasian 2005, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pembiayaan yang bersumber dari lembaga keuangan non bank sebanyak 82.962 UMKM atau mengalami peningkatan sebesar 10,93 persen, perbankan sebanyak 385.383 UMKM atau mengalami peningkatan sebesar 6,55 persen dan sumber permodalan lainnya sebanyak 661.629 UMKM atau mengalami peningkatan sebesar 3,43 persen. Sedangkan sumber permodalan yang berasal dari modal ventura mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hingga mencapai 50,18 persen yaitu dari 16.002 UMKM menjadi 7.972 UMKM. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar UMKM belum tersentuh oleh lembaga-lembaga keuangan.

Sedangkan dilihat dari lembaga keuangan formal yang identik dengan perbankan, pemberian berbagai kredit untuk membantu permodalan UMKM sangat kecil persentasenya jika dibandingkan dengan jumlah kredit yang diberikan kepada pelaku Usaha Besar. Bahkan dalam rentang tahun 2000 sampai dengan 2004 kredit yang diberikan kepada UMKM porsinya semakin mengecil.

Pemerintah sudah memberikan upaya dalam bentuk kredit program dan subsidi bunga bagi kredit usaha mikro dan kecil, tetapi sering tidak tepat sasaran dan justru menciptakan ketergantungan. Usaha menengah juga masih bermasalah dalam mengakses sumber pembiayaan usaha yang umumnya dikarenakan persoalan penjaminan kredit serta ketidakmampuan menyusun kelayakan usaha.

Dilihat dari sudut pandang kepentingan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan perkeonomian, sebenarnya keuangan mikro merupakan alat yang cukup penting dalam mewujudkan pembangunan dalam tiga hal yaitu penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan. Salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya mengembangkan keuangan mikro ini adalah dengan ditetapkannya tahun 2005 sebagai tahun keuangan mikro.

Bank Indonesia juga tidak ketinggalan dengan mengimplementasikan kebijakan keuangan mikro tersebut. Salah satunya dengan menetapkan alokasi pendanaan bank Indonesia untuk

UMKM sebesar Rp 60,4 triliun pada tahun 2005. Begitu pula dengan bank umum, mereka mulai membuat rencana bisnis perbankan untuk UMKM dalam jumlah besar, seperti terlihat pada tabel 1.1.

Pengalokasian dana dari Bank Indonesia serta Bank Umum menjadi menarik untuk di amati. Penelitian ini mencoba melihat pengaruh langsung pengalokasian tersebut melalui nilai multiplier ekonomi pada masing-masing sektor akibat dilaksanakannya kebijakan tersebut.

Tabel 1.1. Rekapitulasi Rencana Bisnis Perbankan Untuk Kredit Mikro, Kecil dan menengah Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2006

(Milyar Rp)

No	SEKTOR EKONOMI	2006			
		KREDIT			
		MIKRO	KECIL	MENENGAH	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 3 + 4 + 5)
1	Pertanian, perburuan dan sarana pertanian	1.998	384	1.313	3.695
2	Pertambangan	5	35	104	144
3	Industri pengolahan	364	799	3.499	4.662
4	Listrik, gas dan air	6	35	115	156
5	Konstruksi	70	395	1.042	1.507
6	Perdagangan, restoran dan hotel	4.368	7.429	9.283	21.080
7	Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	155	518	1.003	1.676
8	Jasa-jasa dunia usaha	1.023	1.260	3.020	5.303
9	Jasa-jasa sosial/masyarakat	131	244	676	1.051
10	Lain-lain	25.112	6.849	5.009	36.970
	TOTAL	33.232	17.948	25.064	76.244

Sumber : Bank Indonesia

Kebijakan pengalokasian dana ke UMKM sebenarnya tidak diatur secara detail pada sektor-sektor tertentu, tetapi pemberian kredit oleh perbankan tentu tidak terlepas dari resiko kredit pada sektor-sektor tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini juga ingin melihat apakah alokasi rencana pemberian kredit tersebut sudah optimal untuk percepatan perekonomian terutama kaitannya dalam penciptaan

lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan utama UKM saat ini terutama terkait dengan kesulitan dalam hal permodalan dan pemasaran. Tetapi di sisi lain, media masa selalu memberitakan tentang terserapnya penyaluran kredit ke UKM dalam nilai yang cukup besar. Dalam pemberitaan perlu pula dibedakan antara UKM yang melakukan kegiatan produksi (produktif) dan yang tidak melakukan kegiatan produksi (jasa perdagangan). Karena kebutuhan dan penanganannya juga berbeda. Sehingga perlu ditelusuri keberhasilan dalam menyalurkan kredit UKM produktif tersebut, terutama kemajuan setelah menerima kredit, agar tampak apakah kredit yang diterima UKM tersebut memang digunakan untuk kegiatan produktif atau konsumtif.

Pemberian kredit kepada usaha kecil dan menengah (UKM) memberikan *multiplier-effect* yang luas. Tidak hanya mampu membantu permodalan, tapi juga menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang berlipat ganda dari waktu ke waktu. Melihat besarnya UKM dalam mendorong sektor ekonomi daerah, maka pemberian kucuran kredit ke UKM membawa dampak pula bagi perkembangan perekonomian.

Selain perbankan, instansi lain yang juga menyalurkan dana bagi UKM antara lain BUMN dengan dana PKBL-nya, PT PNM, Perum Pegadaian dan Koperasi Simpan Pinjam. Dengan demikian jumlah dana yang disalurkan kepada UKM dari waktu ke waktu sudah begitu besarnya, tetapi disisi lain perkembangannya belum menggembirakan, bisa jadi ini adanya *mismanagement* oleh UKM pascapenyalaran kredit tersebut, mengingat kelemahan manajerial juga menjadi hambatan perkembangan UKM.

Meskipun NPL UKM kecil, hal ini tidak dapat menunjukkan bahwa UKM semakin baik. Artinya, pihak perbankan jangan hanya bersemangat menyalurkan kredit ke pada UKM, ada misi dan tanggung

jawab lain yang perlu diperhatikan pascakredit yaitu Keberlanjutan usaha (*business sustainability*). Bila tugas perbankan hanya terbatas pada menyalurkan kredit. Ini menunjukkan perbankan hanya sampai pada tataran *output* (terserapnya dana) bukan *outcome* (efek penyaluran kredit). Ada pula kecenderungan penyaluran bantuan oleh perbankan atau instansi lain hanya dilakukan kepada UKM yang itu-itu saja, karena keterbatasan data UKM.

Oleh karenanya dengan pengalokasian yang tepat pada sektor-sektor yang memberikan percepatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi secara nasional yang tinggi pula. Oleh karena itu penelitian ini ingin melihat apakah pengalokasian yang telah dilakukan oleh perbankan tersebut telah tepat sasaran sesuai dengan sektor yang memberikan percepatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

1.3. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang sebagaimana dipaparkan di atas, muncul beberapa pertanyaan, diantaranya:

1. Sudah efektifkah rencana pembiayaan yang ditetapkan oleh sektor perbankan terhadap UMKM saat ini?
2. Bagaimana seharusnya pemerintah menetapkan sektor yang akan dibiayai agar dapat diperoleh tujuan pembangunan yang maksimal?

1.4. Manfaat Penelitian

Secara garis besar dari penelitian ini akan didapatkan :

1. Gambaran dampak pengalokasian kredit dari perbankan terhadap pertumbuhan sektor itu sendiri dan pada sektor lainnya.
2. Pilihan sektor UMKM yang tepat dalam pengalokasian dana sesuai tujuan percepatan perekonomian.

1.5. Sumber data dan Metodologi

Data yang digunakan dalam tulisan ini bersumber dari:

1. Publikasi Badan Pusat Statistik berupa data Input Output UKM tahun 2000.
2. Publikasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berupa data Jenis dan Jumlah UMKM serta LKM
3. Bank Indonesia berupa data Rencana dan Realisasi kredit untuk UMKM (sektoral) dari tahun 2000 - 2007.

Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah model analisis Input Output. Tabel Input-Output (I-O) disusun untuk menyajikan gambaran tentang hubungan timbal balik dan saling keterkaitan antar satuan kegiatan (sektor) dalam perekonomian suatu negara secara menyeluruh. Bentuk penyajian tabel I-O adalah dalam model matriks, di mana masing-masing barisnya menunjukkan bagaimana output suatu sektor dialokasikan untuk memenuhi permintaan antara dan permintaan akhir, sedangkan masing-masing kolomnya menunjukkan pemakaian input antara dan input primer oleh suatu sektor dalam proses produksinya.

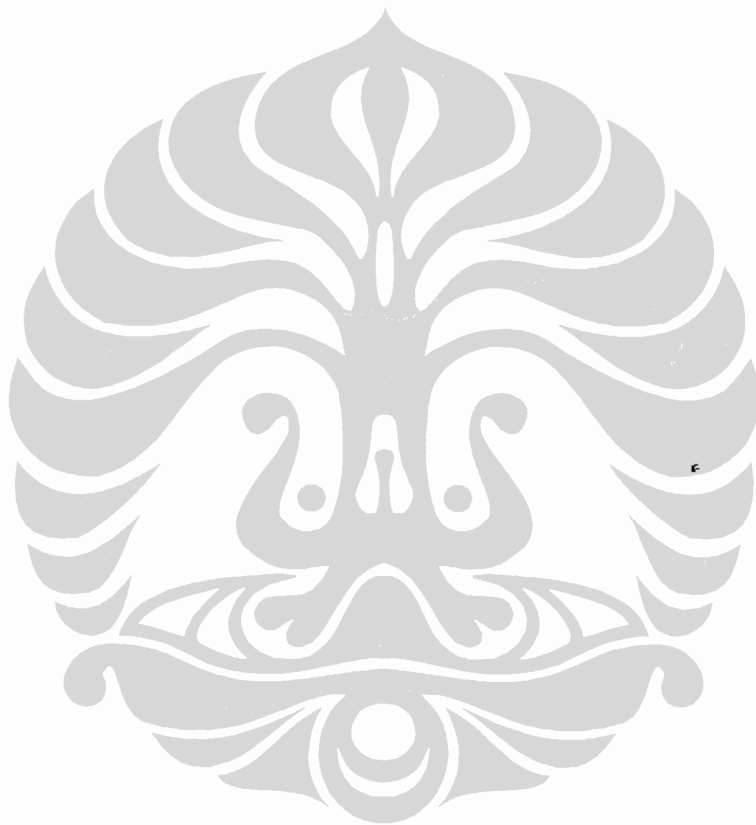
Tabel IO 233 sektor yang ada pada tahun 2000 akan disusun ulang (di agregasi) menjadi 17 sektor sesuai sektor yang dalam data kredit. Data kredit akan dimasukkan ke dalam Final Demand sebagai komponen Investasi dalam IO, dan kemudian dilakukan analisa terhadap multiplier yang timbul akibat adanya tambahan kredit tersebut. Analisa yang akan dilakukan dengan table IO adalah :

1. *Income multiplier*
2. *Employment multiplier*
3. *Income multiplier*
4. Linkage baik *Forward linkage* dan *Backward linkage*
5. *Matrix of Production Multiplier*

1.6. Sistematika Penulisan

Bab I mengemukakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. Bab II mengemukakan tinjauan pustaka tentang UKM,

kredit serta beberapa teori tentang pertumbuhan ekonomi, Bab III akan memaparkan tentang tahapan tahapan metodologi dilakukan dalam analisis dengan menggunakan IO. Bab IV akan menjelaskan hasil dan analisa penelitian. Sedangkan bagian V akan mengemukakan kesimpulan, rekomendasi dan saran dari tulisan ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diulas mengenai teori serta peraturan-peraturan tentang UMKM dan kredit UMKM, serta teori-teori yang mendukung model input-output sebagai salah satu model kuantitatif yang dapat digunakan dalam menjelaskan saling keterkaitan antar sector-sektor ekonomi dalam perekonomian suatu negara. Perubahan perekonomian akibat dampak dari adanya tambahan kredit sebagai tambahan permintaan dalam perekonomian juga akan diulas dalam bab ini.

2. 1. Tinjauan tentang UMKM

Sektor usaha di Indonesia terdiri atas sektor usaha mikro, kecil, menengah dan besar. Dari keempat kriteria sektor usaha, sektor usaha mikro dan kecil seharusnya mampu menyerap dan mendayagunakan keuangan mikro. Penjelasan untuk setiap kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut :

2.1.1. Usaha Mikro

Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000.000,-.

Usaha mikro umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat
3. Belum melakukan manajemen/catatan keuangan yang sederhana sekalipun, belum atau masih sangat sedikit yang dapat membuat neraca usahanya

4. Sumberdaya manusianya (pengusahanya) berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya sampai tingkat SD dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai
5. Pada umumnya tidak/belum mengenal perbankan, tapi lebih mengenal rentenir atau tengkulak;
6. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasi-nya karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain :

1. Perputaran usaha (*turn over*) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang;
2. Tidak sensitive terhadap suku bunga;
3. Tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter;
4. Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.

Contoh usaha mikro

1. Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya;
2. Industri makanan dan minuman, industri meubelair pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat;
3. Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar dll.;
4. Peternakan ayam, itik dan perikanan;
5. Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).

2.1.2. Usaha Kecil

Usaha Kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang No.9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi

kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Ciri-ciri usaha kecil

1. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah;
2. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;
3. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha;
4. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
5. Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha;
6. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;
7. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*.

Contoh usaha kecil

1. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja;
2. Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya;
3. Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubelair, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan;
4. Peternakan ayam, itik dan perikanan;
5. Koperasi berskala kecil.

Jenis usaha kecil, pada umumnya sangat didominasi oleh jenis usaha di bidang atau sektor pertanian atau yang berbahan baku pertanian yaitu agribisnis termasuk agroindustri termasuk sektor

industri kecil sebagai pengrajin, didukung oleh sektor pedagang skala kecil (pengecer) ada juga sektor transportasi skala kecil.

2.1.3. Usaha Menengah

Usaha Menengah sebagaimana dimaksud Inpres No.10 tahun 1998 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00, (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Ciri-ciri usaha menengah

1. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;
2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;
3. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;
4. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll;
5. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;
6. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

Jenis atau macam usaha menengah hampir menggarap komoditi dari hampir seluruh sektor mungkin hampir secara merata, yaitu:

1. Usaha pertanian, perternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah;
2. Usaha perdagangan (grosir) termasuk ekspor dan impor;

3. Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), garment dan jasa transportasi taxi dan bus antar propinsi;
4. Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam;
5. Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan.

2.1.4. Kriteria Jenis Usaha Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja

Kriteria jumlah karyawan berdasarkan jumlah tenaga kerja atau jumlah karyawan merupakan suatu tolak ukur yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menilai usaha kecil atau besar, sebagai berikut :

Tabel 2.1. Jumlah Tenaga Kerja Sesuai Kriteria Usaha

	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Usaha Besar
Jumlah Tenaga Kerja	< 4 orang	5-19 orang	20-99 orang	≥ 100 orang

Sumber : BPS

Dari survei 1989 dan audit manajemen yang diolah sesuai dengan klasifikasi BPS menunjukkan bahwa industri memiliki karyawan kurang dari 4 ada sebesar 55,04%. Industri yang masuk kategori antara 5 sampai 9 orang ada 37,88% perajin. Klasifikasi ini berdasarkan definisi BPS disebut sebagai industri kecil. Dalam pembicaraan sehari-hari yang dimaksud industri kecil atau pengusaha kecil meliputi perusahaan yang memiliki karyawan di bawah 19.

Lebih lanjut, industri yang memiliki karywan antara 20 sampai 99 orang adalah sebesar 6,73%. Dalam pengertian BPS kategori ini disebut sebagai kategori perusahaan menengah. Sedangkan industri yang memiliki karyawan lebih dari 100 orang ada 0,33% atau 2 perusahaan. Perusahaan yang masuk klasifikasi ini disebut sebagai perusahaan besar. Dari sini terlihat bahwa sewaktu diadakan kunjungan lapangan tampak bahwa di sentra-sentra terdapat pula pengrajin yang telah sampai pada taraf menengah, atau bahkan dalam taraf besar, meskipun prosentasenya sangat kecil.

2.1.5. Kebijakan Kredit untuk UMKM

Pemberdayaan UMKM merupakan langkah strategis yang mau tidak mau harus ditempuh, karena berbagai indikator yang ada menunjukkan ekonomi Indonesia adalah ekonomi UMKM, berdayanya UMKM akan menopang berkembangnya perekonomian daerah dan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tidak berlebihan memang jika perhatian diarahkan pada UMKM, seperti upaya menjadikan UMKM semakin sehat dengan kucuran kredit dari perbankan. Bank Indonesia sebagai lembaga Bank Sentral Republik Indonesia yang diamanahkan oleh UU untuk menjaga kestabilan moneter, perbankan dan sistem pembayaran, juga menaruh perhatian besar terhadap perkembangan sektor UMKM ini. Berbagai kebijakan yang ditempuh guna menjaga kinerja di bidang moneter seperti tingkat inflasi dan nilai rupiah yang terjaga diharapkan dapat terefleksi pula pada kinerja pada sektor riil. Sehingga BI perlu mengambil peran untuk mendukung pemerintah melalui kebijakan pemberdayaan sektor riil khususnya UMKM guna menjaga efektifitas transmisi kebijakan moneter yang ditempuh.

Namun, pasca diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004, kebijakan Bank Indonesia dalam membantu pengembangan UMKM mengalami perubahan paradigma yang cukup mendasar karena BI tidak dapat lagi memberikan bantuan keuangan atau Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Peranan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM berubah menjadi bersifat tidak langsung melalui peningkatan intensitas dan efektifitas pemberian bantuan teknis (pelatihan, penyediaan informasi, fasilitasi, promosi, pengembangan riset, survei, dan inovasi).

Pendekatan yang digunakan kepada UMKM bergeser dari development role menjadi promotional role. Pendekatan yang memberikan subsidi kredit dan bunga murah sudah bergeser kepada pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kegiatan pelatihan

kepada petugas bank, pendamping UMKM, penelitian dan penyediaan informasi. Dengan kondisi seperti itu, Bank Indonesia masih tetap memberikan dukungan, namun kebijakan BI baik dari sisi supply maupun sisi demand lebih difokuskan dalam rangka mendorong peningkatan fungsi intermediasi perbankan serta untuk mendukung sistem perbankan yang sehat.

Dari sisi supply, Bank Indonesia melakukan relaksasi/pelonggaran kebijakan kredit perbankan dan penguatan kelembagaan guna mendorong meningkatkan pemberian kredit kepada UMKM namun tetap prudent. Kebijakan tersebut antara lain dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/2/PBI/2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil yang menganjurkan bank memberikan sebagian kreditnya kepada usaha kecil; PBI Nomor 6/25/PBI/2004 dan SE Nomor 6/44/DPNP perihal Rencana Bisnis Bank Umum Dalam Penyaluran Kredit UMKM, sehingga diketahui komitmen bank dalam menyalurkan kredit UMKM; dan PBI No. 8/3/PBI/2006, dimana dalam perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) bobot risiko untuk KUK diturunkan dari 100% menjadi 85%; PBI tentang penurunan bobot risiko dalam perhitungan ATMR untuk bagian KUK yang dijamin lembaga penjaminan/ asuransi kredit berstatus BUMN yang memenuhi persyaratan tertentu dari 50% menjadi 20%, BI menjadi fasilitator dan narasumber dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama lintas Departemen, PT. Askrido, Perum SPU dan perbankan dalam menjalin kerjasama "Penjaminan Kredit /Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi (Kredit Usaha Rakyat), BI menyelenggarakan Bazar Intermediasi Perbankan yang dilaksanakan dalam bentuk pameran dan klinik perbankan yang mempertemukan bank dan UMKM untuk saling berkomunikasi.

Dari sisi demand, kebijakan Bank Indonesia lebih difokuskan pada penguatan lembaga pendamping UMKM melalui peningkatan capacity building dalam bentuk pelatihan dan kegiatan penelitian yang menunjang pemberian kredit kepada UMKM. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

- a. Pelatihan-pelatihan kepada lembaga pendamping UMKM atau Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB), dalam rangka meningkatkan kemampuan kredit UMKM. Pada tahun 2007, secara nasional Bank Indonesia telah memberikan pelatihan kepada 2.540 orang pendamping UMKM atau konsultan keuangan mitra bank (KKMB) dengan jumlah kredit yang berhasil dihubungkan dengan bank mencapai lebih dari Rp. 201,12 miliar.
- b. Pendirian Pusat Pengembangan Pendamping UKM (P3UKM) di Bandung, Kalimantan Selatan, Makassar dan Satgasda KKMB di seluruh KBI di daerah. P3UKM dan Satgasda KKMB antara lain bertugas melakukan pelatihan dan akreditasi pendamping UKM atau KKMB. Selain itu sejak tahun 2007, BI memperkuat langkah koordinasi dengan pemerintah daerah dan perbankan serta institusi lainnya melalui pembentukan Tim Fasilitasi Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Daerah (TFPPED) guna pengembangan sektor/komoditas unggulan/potensial daerah melalui fasilitasi pembiayaan perbankan serta guna membantu percepatan implementasi berbagai program ekonomi daerah seperti program revitalisasi perkebunan (KPEN-RP), revitalisasi pertanian (KKP-E), program penjaminan kredit UMKM (Kredit Usaha Rakyat) dll.
- c. Pengembangan Data Informasi Bisnis Indonesia (DIBI) - Sistem Informasi Terpadu Pengembangan Usaha Kecil (SIPUK) sebagai sarana untuk lebih menyebarkan secara cepat hasil-hasil penelitian dan berbagai informasi lainnya. SIPUK terdiri dari Sistem Informasi Baseline Economic Survey (SIB), Sistem Informasi Agroindustri Berorientasi Ekspor (SIABE), Sistem Informasi Pola Pembiayaan/ lending model Usaha Kecil (SILMUK), Sistem Penunjang Keputusan Untuk Investasi (SPKUI); dan Sistem Informasi Prosedur Memperoleh Kredit (SIPMK). SIPUK ini dapat diakses melalui website Bank Indonesia di www.bi.go.id.
- d. Berbagai penelitian dalam rangka memberikan informasi untuk mendukung pengembangan UMKM. Kegiatan penelitian terutama diarahkan untuk mendukung penetapan arah dan kebijakan Bank

Indonesia dalam rangka pemberian bantuan teknis dan juga dalam rangka penyediaan informasi yang berguna bagi pengembangan UMKM. Penelitian tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan UMKM serta untuk menggali potensi sektor UMKM di tiap-tiap daerah di Indonesia. Dalam upaya meningkatkan peran UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2005 Bank Indonesia telah melakukan survei untuk memperoleh gambaran mengenai potensi dan permasalahan yang dihadapi UMKM ditinjau dari berbagai aspek. Penelitian Baseline Economic Survey yang dipertajam dengan pengembangan komoditas unggulan daerah masing-masing kabupaten di suatu propinsi. Penelitian Pola Pembiayaan (Lending Model) untuk mendukung pembiayaan bank kepada komoditas UMKM (76 komoditi). Pada tahun 2007, Bank Indonesia melakukan kajian identifikasi peraturan pusat dan daerah dalam rangka pengembangan UMKM serta kajian dan implementasi pilot project klaster pengembangan UMKM.

Peranan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM mengalami perubahan paradigma, namun bukan berarti kebijakan dan strategi untuk mendukung UMKM menjadi berkurang tetapi disesuaikan dengan perundang-undangan baru yang berlaku. Untuk itulah, kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM adalah dalam rangka mendorong peningkatan fungsi intermediasi perbankan serta untuk mendukung sistem perbankan yang sehat, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dukungan Bank Indonesia melalui kebijakan yang bersifat demand side maupun supply side bertujuan untuk lebih meningkatkan upaya-upaya akses UMKM kepada perbankan melalui mekanisme hubungan bisnis yang saling menguntungkan sehingga dapat berkesinambungan. Upaya-upaya ini diharapkan dapat membangun sinergi, karena pada dasarnya bank dan UMKM saling membutuhkan sehingga mampu menjembatani gap antara aspek kehati-hatian yang diterapkan dalam operasi perbankan dengan UMKM yang potensial namun belum bankable.

Bagi usaha mikro kecil, kredit dirasa cukup penting mengingat kebutuhan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi diperlukan guna menjalankan usaha dan meningkatkan akumulasi pemupukan modal mereka. Permasalahan timbul ketika pengusaha mikro kecil tersebut diperhadapkan kepada kelengkapan persyaratan bank guna memperoleh pinjaman. Meskipun usaha mereka feasible namun sebagian besar pengusaha mengalami kesulitan dalam penyediaan asset dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi persyaratan jaminan kredit bank.

Usaha yang tidak bankable dipandang oleh bank mengandung default risk atau kredit macet. Pada prakteknya untuk menekan resiko kredit macet tersebut bank mewajibkan jaminan tambahan untuk kredit yang diberikan, mengasuransikan baik kredit yang diberikan maupun jaminan kredit yang dimiliki nasabah atau bahkan menolak pemberian kredit meskipun usaha calon debitur memiliki prospek yang sangat memadai. Upaya menekan resiko kredit macet menjadi penghambat bagi upaya perluasan akses kredit bagi usaha-usaha yang feasible. Adanya resiko kredit macet yang dikawatirkan oleh perbankan berdampak pada rendahnya kucuran kredit UKM.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Perry Wardjio, 2005 tentang Default Risk dan Penjaminan Kredit UKM, terdapat beberapa pendekatan dalam mengukur resiko kredit. Dari pendekatan tradisional hingga pendekatan model baru yang dikembangkan disesuaikan dengan perkembangan industri perbankan dan produk-produk perbankan yang ada. Pada umumnya keputusan pemberian kredit diserahkan kepada credit officer pada masing-masing cabang bank. Sehingga kemampuan officer, judgement dan faktor-faktor penting lainnya sangat diperlukan dalam keputusan kredit. Namun demikian beberapa faktor analisa kredit yang mudah dipahami adalah pendekatan analisa 5C, yang meliputi Character, Capital, Capacity, Collateral dan Cycle or Economic conditions. Selain pendekatan 5C tersebut, pemberian kredit didasarkan pula pada analisa tingkat suku bunga yang dapat dibebankan kepada kredit yang akan diberikan.

Pada saat suku bunga rendah maka *expected return* atas kredit akan meningkat apabila terjadi peningkatan suku bunga, sedang pada saat suku bunga tinggi maka peningkatan suku bunga akan menurunkan *expected return* dari loan. Hubungan negatif antara tingginya suku bunga pinjaman dengan *expected return* menimbulkan dua akibat, yaitu pembatalan kredit atau pengalihan resiko (*risk shifting*).

Hasil penelitian tersebut menyatakan tingkat *default risk* kredit perbankan untuk kredit mikro sebesar 0,77%, kredit kecil dengan plafon hingga Rp 100 juta sebesar 0,67% dan kredit kecil dengan plafon antara Rp 100 juta hingga Rp 500 juta sebesar 0,65%. Secara keseluruhan tingkat *default risk* untuk kredit UKM sebesar 0,70%. Besarnya tingkat *default risk* ini masih dihitung lebih rendah dibanding dengan tingkat kolektibilitas kategori macet kredit UKM kolektibilitas 5 sesuai ketentuan Bank Indonesia yang secara keseluruhan tercatat rata-rata sebesar 1,80% dengan rincian untuk kredit mikro sebesar 1,81%, kredit kecil dengan plafon hingga Rp 100 juta sebesar 1,69% dan kredit dengan plafon antara Rp 100 juta hingga Rp 500 juta sebesar 1,91%. Dengan hasil ini maka perbankan seharusnya tidak ragu dalam mengucurkan kredit kepada UKM karena tingkat kegagalan bayarnya rendah.

Beberapa studi empiris tentang keberadaan dan kinerja usaha skala kecil di negara berkembang mencoba menjawab pertanyaan apakah keberadaan dan perkembangan UKM di negara-negara berkembang tersebut merupakan suatu gejala alamiah atau hasil dari sebuah proses evolusi, apakah ada relasi kuat antara proses transformasi struktural dengan keberadaan usaha skala kecil.

Dalam kenyataannya di Indonesia, transformasi struktural tidak hanya terjadi dalam perubahan kelompok industri saja, melainkan juga dalam perubahan skala usaha. Dalam sektor-sektor ekonomi, skala usaha dibagi menjadi tiga, yaitu usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Di negara berkembang, berdasarkan jumlah unit usaha dan kesempatan kerja, kelompok skala usaha yang mendominasi adalah usaha kecil, tetapi jika dilihat kontribusinya

terhadap nilai tambah, maka usaha menengah dan besar secara bersama lebih dominan.

Melihat struktur konfigurasi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, dari 39,72 juta unit usaha yang ada (data BPS, tahun 2004), sebesar 39,71 juta (99,97%) merupakan usaha kecil dan menengah, kecil dan menengah atau sering disebut juga usaha ekonomi rakyat. Dan bila ditinjau lebih dalam lagi, usaha kecil dan menengah dan kecil merupakan mayoritas, sebab berjumlah 98% dari total unit usaha atau 39 juta usaha (Tambunan, 2002).

Keberadaan usaha kecil dan menengah, merupakan fakta semangat jiwa kewirausahaan sejati di kalangan rakyat yang bisa menjadi perintis pembaharuan. Menyadari realitas ini, memfokuskan pengembangan ekonomi rakyat terutama pada usaha kecil dan menengah merupakan hal yang sangat strategis untuk mewujudkan *broad based development* atau *development through equity*.

Keuangan mikro berfungsi memberikan dukungan modal bagi pengusaha kecil dan menengah untuk meningkatkan usahanya, setelah itu usaha mereka akan berjalan lebih lancar dan lebih "besar". Kebutuhan dana bagi UKM setelah mendapat dukungan modal itu akan meningkat, sehingga dibutuhkan Lembaga Keuangan Masyarakat (Kecil dan menengah) yang dapat secara terus-menerus melayani kebutuhan mereka.

Dalam mengembangkan keuangan kecil dan menengah untuk melayani masyarakat miskin (*economically active poor*) tersebut, terdapat beberapa alternatif yang bisa dilakukan :

1. Banking of the poor

Bentuk ini mendasarkan diri pada *saving led microfinance*, dimana mobilisasi keuangan mendasarkan diri dari kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat miskin itu sendiri. Bentuk ini juga mendasarkan pula atas *membership base*, dimana keanggotaan dan partisipasinya terhadap kelembagaan mempunyai makna yang penting. Bentuk-bentuk yang telah terlembaga di masyarakat antara lain : Kelompok

Swadaya Masyarakat (KSM), Kelompok Usaha Bersama, *Credit Union* (CU), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), dll.

2. Banking with the poor

Bentuk ini mendasarkan diri dari memanfaatkan kelembagaan yang telah ada, baik kelembagaan (organisasi) sosial masyarakat yang mayoritas bersifat informal atau yang sering disebut Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) serta lembaga keuangan formal (bank). Kedua lembaga yang *nature-nya* berbeda itu, diupayakan untuk diorganisir dan dihubungkan atas dasar semangat simbiose mutualisme, atau saling menguntungkan. Pihak bank akan mendapat nasabah yang makin banyak (*outreaching*), sementara pihak masyarakat miskin akan mendapat akses untuk mendapatkan *support*. Di Indonesia, hal ini dikenal dengan pola yang sering disebut Pola Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK).

3. Banking for the poor

Bentuk ini mendasarkan diri atas *credit led institution* dimana sumber dari *financial support* terutama bukan diperoleh dari mobilisasi tabungan masyarakat miskin, namun memperoleh dari sumber lain yang memang ditujukan untuk masyarakat miskin. Dengan demikian tersedia dana cukup besar yang memang ditujukan kepada masyarakat miskin melalui kredit. Contoh bentuk ini adalah : Badan Kredit Desa (BKD), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), Grameen Bank, ASA, dll.

Kebijakan nasional bagi keuangan mikro sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai keterbatasan keuangan mikro melalui penciptaan lingkungan yang memungkinkan lembaga keuangan mikro yang sudah ada saat ini untuk memperluas pelayanan mereka serta mendukung terbentuknya berbagai lembaga mikro untuk mengisi kesenjangan permintaan dan penawaran layanan keuangan mikro terutama di wilayah pedesaan.

Tabel 2.2. Kegiatan Keuangan Mikro dan Dampaknya terhadap Penanggulangan Kemiskinan

Tabungan/ Simpanan	<ul style="list-style-type: none"> •Peningkatan simpanan •Pendapatan dari simpanan •Peningkatan kapasitas investasi •Kapasitas menggunakan teknologi lebih baik •Memungkinkan pola konsumsi yang lebih pasti •Meningkatkan kemampuan menghadapi gejolak eksternal •Mengurangi kebutuhan meminjam dari rentenir dengan bunga tinggi •Kemampuan membeli aset produktif •Mengurangi tekanan untuk menjual aset 	<ul style="list-style-type: none"> •Mengurangi kerentanan rumah tangga terhadap resiko dan guncangan eksternal •Penurunan kerawanan konsumsi keluarga •Peningkatan pendapatan •Pengurangan keparahan (severity) kemiskinan •Pemberdayaan •Pengurangan pengucilan sosial
Pinjaman	<ul style="list-style-type: none"> •Dapat memanfaatkan peluang investasi yang lebih menguntungkan •Memungkinkan adopsi teknologi yang lebih baik •Kemungkinan perluasan kegiatan usaha kecil dan menengah •Diversifikasi kegiatan ekonomi •Memungkinkan pola konsumsi yang lebih pasti •Menyediakan ruang bagi pengambilan resiko •Mengurangi ketergantungan pada sumber dana eksternal yang mahal •Meningkatkan ketahanan terhadap guncangan eksternal •Memperbaiki tingkat keuntungan investasi •Mengurangi tekanan untuk menjual aset 	<ul style="list-style-type: none"> •Peningkatan pendapatan •Meningkatan keragaman sumber pendapatan •Mengurangi kerawanan pendapatan •Mengurangi kerawanan konsumsi •Meningkatkan konsumsi rumah tangga •Peningkatan kemungkinan untuk mendapat pendidikan bagi anak-anak •Keparahan kemiskinan dikurangi •Pemberdayaan •Mengurangi pengucilan sosial
Asuransi dan penjaminan	<ul style="list-style-type: none"> •Peningkatan simpanan pada aset finansial •Mengurangi resiko dan potensi kerugian •Mengurangi tekanan untuk menjual aset •Mengurangi dampak guncangan eksternal •Meningkatkan investasi 	<ul style="list-style-type: none"> •Peningkatan pendapatan •Mengurangi kerawanan konsumsi •Peningkatan kemandirian dan ketahanan keluarga

Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kebijakan ini beserta berbagai strategi pelaksanaannya akan didasarkan pada praktek-praktek internasional terbaik, dan pelajaran yang dapat dipetik dari berbagai pengalaman di Indonesia. Ketiadaan kebijakan keuangan mikro yang terpadu saat ini, bagaimanapun telah membatasi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menelaraskan berbagai upaya mereka untuk menciptakan sebuah sistem mikro yang berkelanjutan.

2.2. Kredit, Perekonomian dan Penggunaan Input Ouput

Ide dasar untuk mengerti dan menguasai sistem perekonomian di suatu masyarakat atau negara adalah mengelompokan kegiatan perekonomian menurut kepentingan pelaku-pelaku utama, masing-masing:

- *Produsen atau Pengusaha*: Yaitu perseorangan atau kelompok perseorangan yang berkumpul secara hukum, dalam bentuk Perseroan Terbatas, CV, koperasi, atau bentuk formal lainnya, yang bertujuan untuk memproduksi barang/produk atau jasa untuk dilempar ke pasar guna memenuhi kebutuhan konsumen. Kegiatan pelaku ini disebut dengan kegiatan produksi.
- *Konsumen*: Yaitu perseorangan, rumah tangga atau kelompok organisasi yang memiliki kemampuan dari pendapatannya (biasa disebut dengan daya beli) dan memiliki pilihan-pilihan atau keinginan untuk memenuhi kebutuhan (*human wants*) mereka di pasar. Kegiatan pelaku konsumen ini disebut dengan kegiatan konsumsi.
- *Lembaga Perbankan dan Keuangan*: Merupakan organisasi formal, dapat juga berbentuk kelompok perseorangan, yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi kegiatan perekonomian dengan mengumpulkan dana yang ada dimasyarakat, mengelolanya dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk pemberian pinjaman maupun produk jasa keuangan lainnya.
- *Badan Publik dan Pemerintah*: Dalam sistem perekonomian suatu negara Lembaga Publik dan Pemerintah berfungsi untuk menjaga

kepentingan masyarakat secara umum, menjadi wasit dalam sistem perekonomian pasar, dan mungkin juga memberikan pelayanan publik yang tidak ditangani oleh sektor swasta.

Model Perekonomian Tertutup.

Para pelaku perekonomian ini, khususnya Produsen dan Konsumen, secara sederhana akan melakukan kegiatan dalam penjualan dan pembelian di pasar yang saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Dalam transaksi pasar tersebut, mereka akan terikat dengan kontrak dagang atau kesepakatan jual beli, dan kemudian ditetapkanlah harga jual atau harga beli dari kegiatan tersebut.

Untuk memfasilitasi kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi ini secara efektif maka sistem perekonomian kita memerlukan Lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya seperti pasar modal, lembaga asuransi, lembaga penjamin, pegadaian atau lembaga keuangan mikro yang terdapat di daerah pedesaan. Lembaga Perbankan peranannya sangat vital untuk mengumpulkan dana-dana yang ada di masyarakat, yang selanjutnya mereka akan melakukan pengalokasian dana tersebut melalui pemberian fasilitas perkreditan atau jasa perbankan lainnya.

Pergerakan sektor ekonomi dari produsen, biasa disebut oleh para ekonom dengan perkembangan sektor riil, yang perkembangannya dapat diketahui secara tidak langsung dengan memonitor seperti data perkembangan pemberian fasilitas kredit oleh Perbankan Nasional.

Sistem perekonomian yang sederhana ini dalam keadaan normal dapat berjalan dengan sendirinya, tanpa perlu pengaturan yang ketat dari Pemerintah. Dan memang inilah yang biasa didambakan oleh para teknokrat ekonomi klasik, bahwa pasar dapat mengatur segalanya dengan baik dan sempurna. Seolah-olah sistem ekonomi tersebut bekerja dengan otomatis melalui tangan kuat yang mengaturnya dari luar, atau biasa disebut dengan *the invisible hand*.

Tetapi sayangnya dalam kenyataannya, mekanisme pasar ini tidak dapat memberikan jaminan bahwa sistem perekonomian sederhana di atas dapat berjalan dengan sempurna, tanpa distorsi atau kerugian bagi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Banyak kasus dilaporkan di negara berkembang, adanya kenyataan bahwa mekanisme pasar bebas tetap menghasilkan banyak kekurangan, kejanggalan maupun kecurangan, atau kerugian di pihak konsumen.

Dalam jangka panjang sering terjadi kecenderungan pengelompokan produsen tertentu yang menguasai pangsa pasar secara dominan. Dan masih banyak kejanggalan-kejanggalan lainnya dari sistem mekanisme pasar bebas ini.

Guna menetralsir atau mengurangi kemungkinan kerugian tersebut, maka diperlukan peran pemerintah atau Lembaga Publik yang berfungsi melakukan koreksi-koreksi atas sistem pasar yang tidak efisien dan tidak adil. Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan perpajakan, pengenaan tarif atau pelarangan-pelarangan yang diberlakukan pada ketiga pelaku ekonomi utama ini. Bank Indonesia, misalnya dapat melakukan kegiatan monitoring dan pengaturan manajemen perbankan nasional secara umum dengan mengeluarkan ketentuan-ketentuan tentang prudential banking practices. Protes atas kecurangan-kecurangan yang dilakukan pengusaha sering dilontarkan oleh Lembaga Konsumen, khususnya tidak dipenuhinya standar performances dan kualitas atas barang atau jasa ditawarkan ke konsumen.

Model Perekonomian Terbuka.

Sejauh ini kita masih memperlakukan sistem kegiatan ekonomi pasar secara tertutup. Artinya kita belum memasukkan peran luar negeri dalam sistem ekonomi tersebut. Memang banyak model ekonomi yang membagi sistem ekonomi tersebut ke dalam "sistem ekonomi tertutup" dan "sistem ekonomi terbuka".

Pada sistem ekonomi yang terbuka, kita melihat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk

dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negara.

Dalam model terbuka ini jasa perbankan dan lembaga keuangan dapat juga berasal dari luar negeri, seperti kreditor swasta luar negeri dan lembaga keuangan internasional, seperti Asia Development Bank (ADB), World Bank dan International Monetary Fund (IMF).

Terakhir kita dihadapkan lagi pada sistem perekonomian yang semakin menyatu (*the borderless economy*) yang disebut dengan *the global economy*.

Mengukur Kinerja Perekonomian

Melalui pemahaman konsep sistem perekonomian circular flow seperti diatas kita kemudian dapat segera mengetahui sejauh mana kegiatan perekonomian di suatu masyarakat memang secara nyata telah menunjukkan perkembangannya dengan baik atau sebaliknya. Sebagai analogi dalam konteks perusahaan, kita mengenal Laporan Rugi Laba (*income statement*) yang dipublikasikan oleh perusahaan pada awal akhir triwulan pertama. Laporan Rugi Laba ini merupakan potret kinerja perusahaan dalam melakukan kegiatannya selama satu tahun berjalan. Jika perusahaan memperoleh laba, sebagian dapat dibagikan dalam bentuk pembagian deviden dan sisanya dapat ditahan sebagai tambahan modal perusahaan dalam Neraca Kekayaan Perusahaan (*balance sheet*).

Demikian pula halnya pada perekonomian suatu negara. Perkembangan kegiatan ekonomi di negara tersebut dapat dinilai kinerjanya untuk satu tahun fiskal tertentu. Seperti halnya dengan analogi Laporan Rugi Laba, para ekonom kemudian sering menggunakan konsep Produk Domestik Bruto (PDB) untuk melihat dan mengukur sejauh mana kinerja para pelaku ekonomi tersebut (produsen, konsumen, lembaga perbankan dan pemerintah) telah sukses menghasilkan nilai tambah atau memberikan kontribusi positif

pada sistem perekonomian nasional dalam satu tahun, khususnya dalam kerangka sistem perekonomian tertutup.

Disamping itu digunakan juga konsep Produk Nasional Bruto (GNP) yang mengukur seluruh kegiatan pelaku ekonomi dalam satu tahun pada sistem perekonomian terbuka. Untuk memahami lebih mendalam bagaimana bentuk struktur PDB dan GNP suatu sistem perekonomian, berikut komponennya agregatnya masing-masing, dapat dipelajari dengan mudah dengan mengacu pada sistem pengukuran statistik pendapatan nasional yang dikeluarkan oleh masing-masing Kantor statistik di suatu negara.

Sebagai contoh di Indonesia, BPS mengeluarkan secara rutin buku laporan pendapatan nasional ini dalam publikasinya bulannya Indikator Ekonomi. Para ahli ekonomi umumnya membaginya lebih lanjut komponen Pendapatan Nasional ke dalam komponen pengeluaran agregat (AD) seperti:

- Kegiatan Konsumsi (C),
- Investasi (I),
- Pengeluaran Pemerintah (G),
- Ekspor (X).

Komponen penyeimbangannya yang disebut dengan penerimaan agregat (Y) terdiri dari komponen agregat berikut ini:

- Tabungan (S),
- Pajak (T) dan
- Impor (M).

Konsep makronya adalah sebagai berikut :

- (1) Penerimaan agregat = Pengeluaran agregat (adanya permintaan agregat); atau
- (2) Penerimaan para pemilik faktor + M = C + I + G + X; atau
- (3) GDP + M = C + I + G + X; atau
- (4) GDP = C + I + G + (X-M).

Dalam kehidupan perekonomian, fungsi kredit memegang peranan yang sangat penting. Tambahan kredit yang masuk ke dalam sebuah perekonomian merupakan tambahan investasi dari perekonomian. Kredit yang didapat oleh pelaku ekonomi baik itu Konsumen maupun Produsen akan menambah perputaran barang dan jasa serta komponen uang di dalam sebuah perekonomian. Fungsi kredit dapat disarikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya guna uang
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3. meningkatkan daya guna dan peredaran barang
4. menjadi salah satu alat stabilitas ekonomi
5. meningkatkan kegairahan berusaha
6. meningkatkan pemerataan pendapatan
7. menjadi alat untuk meningkatkan hubungan internasional

Kredit yang didapat oleh UMKM dapat dipersempit akan digunakan sebagai Investasi untuk memperluas usahanya, oleh karena itu teori-teori Investasi juga diperlukan dalam penulisan ini. Investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal. Stok barang modal (capital stocks) terdiri dari pabrik, mesin, kantor, dan produk-produk tahan lama lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Barang modal juga meliputi perumahan tempat tinggal dan juga persediaan. Investasi adalah pengeluaran yang ditambahkan kepada komponen-komponen barang modal ini. Investasi dibagi dalam tiga golongan, yaitu :

1. Investasi tetap perusahaan (business fixed investment), yang terdiri dari pengeluaran perusahaan atas mesin tahan lama , perlengkapan dan bangunan-bangunan seperti fasilitas pabrik dan perlengkapan mesin lainnya.
2. Investasi tempat tinggal (residential investment), umumnya terdiri dari investasi untuk perumahan.
3. Investasi persediaan (inventory investment).

Investasi Tetap Perusahaan (Pendekatan Neoklasik)

Mesin, perlengkapan, dan bangunan yang kita gunakan dalam produksi barang dan jasa, merupakan stok modal tetap. Analisis mengenai investasi tetap perusahaan dalam bagian ini dikembangkan dalam dua tahap. Pertama, kita selidiki berapa besarnya modal yang akan digunakan oleh perusahaan-perusahaan, jika diketahui biaya dan hasil pengembalian atas penggunaan modal dan tingkat output yang mereka harapkan untuk diproduksi. Dengan kata lain, kita selidiki apa yang menentukan stok modal yang diinginkan (desired capital stock). Stok modal yang diinginkan adalah jumlah modal yang ingin dimiliki oleh perusahaan dalam jangka panjang, jika kita tidak memperhitungkan penundaan yang mereka hadapi dalam menyesuaikan penggunaan modal mereka. Akan tetapi, karena diperlukan waktu untuk memesan mesin yang baru, untuk membangun pabrik, dan untuk memasang mesin-mesin, perusahaan-perusahaan tidak dapat dengan seketika menyesuaikan stok modal yang digunakan dalam produksi. Karena itu yang kedua, kita bahas bagian dengan mana perusahaan-perusahaan menyesuaikan diri dari stok modal mereka yang ada terhadap tingkat yang diinginkan dengan berjalannya waktu. Laju penyesuaian menentukan berapa besar yang dikeluarkan perusahaan untuk menambah jumlah modal dalam setiap periode, artinya, menentukan tingkat investasi.

Rumusan pokok mengenai teori investasi tetap perusahaan di sini adalah :

1. Sepanjang waktu, pengeluaran investasi netto ditentukan pula oleh perbedaan antara modal yang sebenarnya dan yang diinginkan.
2. Modal yang diinginkan tergantung pada biaya sewa (pemakai) modal dan tingkat output yang diharapkan. Permintaan modal naik bersama output yang diharapkan dan subsidi investasi, dan menurun dengan naiknya suku bunga riil.
3. Kebijakan-kebijakan moneter dan fiscal mempunyai efek terhadap investasi melalui stok barang modal yang diinginkan, walaupun dampak jangka pendek kemungkinan besar menjadi kecil. Efek

jangka panjangnya lebih besar. Tenggang waktu kelambatan dengan mana pengaruh investasi ini terjadi penting untuk diperhatikan dalam membentuk kebijakan stabilisasi.

4. Teori investasi, seperti halnya teori konsumsi, menekankan peran pendapatan atau output yang diharapkan atau yang permanen sebagai faktor penentu permintaan modal.

Dalam perhitungan pendapatan nasional konsumsi dan tabungan atau konsumsi dan investasi saling dikaitkan. Ini merupakan perhitungan pendapatan nasional secara sederhana :

$$Y = C + S; Y = C + I$$

Bila besarnya konsumsi relatif stabil tingkat pendapatan nasional akan mengalami kegoncangan. Hal ini berkaitan erat dengan kegoncangan yang terjadi pada investasi. Kegoncangan yang terjadi pada investasi akan menimbulkan dampak rentetan atau susulan yang lebih hebat pada pendapatan nasional. Dengan bekerja multiplier effect (angka pengganda), penurunan investasi akan memberikan dampak penurunan yang lebih besar (parah) terhadap pendapatan nasional. Penurunan investasi akan menyebabkan tingkat pendapatan nasional menurun dibawah kapasitas pendapatan nasional. Peranan investasi terhadap kapasitas produksi nasional memang sangat besar, karena investasi merupakan penggerak perekonomian, baik untuk penambahan faktor produksi maupun berupa peningkatan kualitas faktor produksi. Investasi ini nantinya akan memperbesar pengeluaran masyarakat (permintaan efektif) melalui peningkatan pendapatan masyarakat dengan bekerja multiplier effect. Faktor produksi akan mengalami penyusutan, sehingga akan mengurangi produktivitas dan faktor-faktor produksi tersebut. Supaya tidak terjadi penurunan produktivitas (kapasitas) nasional harus diimbangi dengan investasi baru yang lebih besar dari penyusutan faktor-faktor produksi. Akhirnya perekonomian masyarakat (nasional) akan berkembang secara dinamis dengan naiknya investasi yang lebih besar dari penyusutan faktor produksi tersebut. Bila penambahan investasi lebih

kecil dari penyusutan faktor-faktor produksi, maka terjadi stagnasi perekonomian untuk dapat berkembang.

Ketidakstabilan investasi telah banyak membuat ahli ekonomi mengikuti pandangan Keynes. Dengan kesimpulan pandangan Keynes bahwa perekonomian pada dasarnya tidak pernah stabil (mengalami stagnasi), diperlukan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk mengatasi ketidakstabilan ini. Tindakan fiskal diperlukan (pengeluaran pemerintah) untuk dapat mengimbangi penurunan konsumsi masyarakat (permintaan efektif), agar perekonomian dapat berkembang dan tumbuh. Kebijakan moneter diperlukan untuk mengatur tingkat bunga yang layak (menguntungkan) untuk mengadakan investasi, karena tingkat bunga yang tinggi akan menekan tingkat investasi dalam perekonomian.

Kaum Klasik mengatakan, investasi akan dilakukan apabila pendapatan dari investasi (return of investment) lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku (riil). Kaum Klasik menetapkan patokan tingkat suku bunga sebagai pertimbangan untuk mengadakan investasi. Kalau tingkat suku bunga lebih besar dari hasil pendapatan investasi (tingkat pengembalian modal), maka investasi tidak menguntungkan untuk dilakukan. Keynes mengatakan, masalah investasi baik ditinjau dari penentuan jumlahnya maupun kesempatan untuk mengadakan investasi itu sendiri, didasarkan pada konsep Marginal Efficiency of Capital (MEC). Investasi akan dilakukan oleh investor, bila MEC yang diharapkan masih lebih besar atau tinggi dari tingkat bunga yang berlaku. Jadi jelas pertimbangan Keynes untuk terlaksananya investasi adalah faktor efisiensi marginal (MEC) dari investasi itu sendiri. Efisiensi marginal dari modal (investasi) sangat tergantung pada perkiraan-perkiraan dan pertimbangan investor terhadap perkembangan situasi perekonomian masa yang akan datang.

Faktor-Faktor Yang Menentukan Tingkat Investasi

1. Tingkat Bunga

Tingkat bunga sangat berperan dalam menentukan tingkat investasi yang terjadi dalam suatu Negara. Kalau tingkat bunga rendah, maka tingkat investasi yang terjadi akan tinggi, karena kredit dari bank masih menguntungkan untuk mengadakan investasi. Begitu juga sebaliknya bila suku bunga tinggi, maka investasi dari kredit bank tidak menguntungkan.

2. Marginal Efficiency of Capital (MEC)

MEC merupakan salah satu konsep yang dikeluarkan Keynes untuk menentukan tingkat investasi yang terjadi dalam suatu perekonomian. MEC merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan dari investasi yang dilakukan (return of investment). Bila keuntungan yang diharapkan (MEC) lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku secara riil, maka investasi tidak akan dijalankan. Bila MEC yang diharapkan sama dengan tingkat suku bunga secara riil, maka pertimbangan untuk mengadakan investasi sudah dipengaruhi oleh faktor lain.

3. Peningkatan Aktivitas Perekonomian

Harapan adanya peningkatan aktivitas perekonomian di masa datang, merupakan salah satu faktor penentu untuk mengadakan investasi atau tidak. Kalau ada perkiraan akan terjadi peningkatan aktivitas perekonomian di masa yang akan datang, walaupun tingkat suku bunga lebih besar dari tingkat MEC (sebagai penentu investasi), investasi mungkin akan tetap dilakukan oleh investor yang instingnya tajam melihat peluang meraih keuntungan yang lebih besar di masa datang. Faktor ini tidak merupakan faktor yang penting sebagai pertimbangan untuk mengadakan investasi, tetapi pertimbangan ini akan diperhitungkan para investor bila ingin mengadakan investasi.

4. Kestabilan politik Suatu Negara

Kestabilan politik suatu negara merupakan suatu pertimbangan yang sangat penting untuk mengadakan investasi. Karena dengan stabilnya politik pada Negara yang bersangkutan terutama penanaman modal dari luar negeri (PMA) tidak akan ada resiko perusahaannya dinasionalisasikan oleh negara tersebut (ini dapat terjadi bila ada penggantian rejim yang memerintah negara tersebut).

Teori akselerator investasi menegaskan laju investasi adalah sebanding dengan perubahan output perekonomian. Model akselerator menciptakan kemungkinan bahwa pengeluaran investasi akan berfluktuasi besar sekali. Jika investasi sebanding dengan perubahan GNP, maka apabila perekonomian berada dalam masa pemulihan, investasi akan positif, dan apabila perekonomian berada dalam masa resesi, investasi menjadi negatif. Jadi, teori akselerator akan menggambarkan bahwa investasi akan berfluktuasi secara besar sekali.

Hingga saat ini, perdebatan tentang berbagai faktor yang menentukan laju investasi masih terus berlangsung. Beberapa penelitian memberi kesan bahwa model akselerator agak diperluas juga dengan baik menjelaskan perilaku investasi seperti model neoklasik. Ada pula temuan bahwa biaya sewa modal memang mempengaruhi investasi. Jelaslah temuan-temuan yang sering bertentangan bahwa tidak ada bukti yang cukup kuat untuk memutuskan peran biaya modal dan harapan akan output masa depan secara relatif tepat. Pastilah keduanya merupakan faktor penentu utama pengeluaran investasi. Tentu saja teori mengatakan bahwa biaya sewa modal memainkan peran yang penting dalam mempengaruhi investasi.

Analisis tentang investasi tetap perusahaan yang semakin sering digunakan adalah teori q , yang menitik-beratkan perhatian pada pasar saham. Pada suatu saat tertentu, seluruh saham yang beredar di perekonomian yang bersangkutan memiliki pola penawaran yang bersifat inelastis. Harga saham suatu perusahaan tertentu merupakan harga tagihan atas barang modal yang dimiliki perusahaan tersebut.

Karena itu pihak manajer perusahaan dapat diperkirakan akan bereaksi terhadap harga saham itu dengan menghasilkan lebih banyak barang modal baru yaitu melalui investasi, ketika harga saham sedang tinggi dan menghasilkan lebih sedikit barang modal baru atau bahkan tidak melakukan investasi sama sekali ketika harga saham rendah.

Pengeluaran investasi dan internal atau pembentukan modal domestik bruto (*gross private domestic investment*) adalah total nilai pasar dari pembelian bangunan-bangunan yang baru dihasilkan dan peralatan-peralatan tahan lama milik produsen, ditambah nilai perubahan di dalam volume persediaan yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan. Dengan perkataan lain, pembentukan modal domestik bruto tersebut mencakup produksi dari seluruh barang-barang investasi seperti untuk mengganti mesin-mesin, peralatan-peralatan (*equipment*), dan bangunan-bangunan yang baru dibangun pada tahun produksi yang bersangkutan, ditambah setiap tambahan netto (*net edition*) terhadap stok modal perekonomian.

Secara lebih rinci, pembentukan modal domestik bruto ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu 1) pabrik beserta peralatan-peralatan yang dimiliki termasuk di dalamnya bangunan pabrik, gudang (*warehouse*), persediaan (*store*), dan bangunan-bangunan lain yang digunakan perusahaan, perolehan dari mesin-mesin dan peralatan lain, 2) bangunan rumah tinggal dimasukkan sebagai investasi karena sifatnya seperti halnya dengan pabrik atau mesin yang merupakan "income-earning assets", 3) perubahan-perubahan didalam persediaan (*inventories*).

Ukuran yang paling sering digunakan dalam pertumbuhan ekonomi adalah melalui peningkatan pendapatan nasional yang diidentikkan dengan *Gross Domestic Product* (GDP) dari satu tahun ke tahun berikutnya: GDP dianggap sebagai keseluruhan hasil aktivitas ekonomi suatu negara dalam satu kurun waktu tertentu.

Ada tiga pendekatan yang dikenal dalam penentuan GDP adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan pendapatan (*Income Approach*)

Dalam pendekatan pendapatan, maka GDP adalah agregat dari total pendapatan negara dalam satu tahun. Pendapatan yang dihitung didapatkan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor-faktor produksi, yaitu :

- a. sewa (*rent/r*) sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi sumber daya alam/tanah
- b. gaji (*wages/w*) sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi sumber daya manusia/tenaga kerja
- c. bunga (*interest/i*) sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi modal.
- d. Profit (*n*) sebagai balas jasa penggunaan skill/keahlian.

Dengan demikian melalui pendekatan pendapatan, maka didapatkan rumus GDP :

$$GDP = r + w + n + I$$

2. Pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*)

Pendekatan pengeluaran didekati dengan rumus umum :

$$GDP = C + I + G + NX$$

Dengan mengacu pada rumusan itu, kita bisa memilah-milah pengeluaran dengan berdasar pada kelompok institusi, sebagai berikut :

- a. *C (consumption)* merupakan pengeluaran rumah tangga atas berbagai barang dan jasa
- b. *I (investment)* adalah pembelian atas berbagai peralatan modal, persediaan dagang atau inventori, dan struktur bisnis.
- c. *G (government purchase)* mencakup semua pembelian berbagai barang dan jasa yang dilakukan pemerintah
- d. *NX (Net Export)* adalah pembelian oleh pihak asing atas berbagai barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri (ekspor) dikurangi oleh pembelian penduduk setempat atas berbagai barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri (impor).

3. Pendekatan nilai tambah (*value added approach*)

Dalam pendekatan ini, perhitungan GDP diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai tambah dari semua sektor. Nilai tambah ini adalah selisih antara nilai input dan output dari setiap sektor. Perhitungan nilai tambah lebih dipilih daripada nilai akhir, karena nilai akhir dapat menimbulkan perhitungan ganda. Hal ini terjadi karena barang jadi dari sebuah unit produksi bisa jadi masih memerlukan proses produksi lagi atau dengan kata lain akan menjadi input dari sektor lain. Berbeda dengan ketika diterapkan perhitungan nilai tambah. Rumus umum pendekatan dengan *value added* adalah :

$$GDP = \sum_{i=1}^n va_i$$

di mana i adalah sektor-sektor perekonomian yang ada dalam suatu negara.

2.3. Tinjauan Terhadap Penelitian Terkait

Studi mengenai sektor UKM telah banyak dilakukan. Ringkasan dari beberapa studi terkait dengan penelitian ini, disajikan pada bagian ini sebagai bahan pembandingan terhadap metodologi dan analisis masalah yang digunakan. Beberapa studi terkait diantaranya adalah: *pertama*, studi Hal Hill (2001). Dengan menggunakan metode studi empiris mengamati perusahaan kecil dan menengah di Indonesia sepanjang adanya perubahan kepemimpinan administrasi. Hasil studi ini menunjukkan bahwa usaha kecil menengah di Indonesia memegang peranan penting sebab dapat menyerap tenaga kerja lebih dari 60% ketersediaan tenaga kerja, serta dapat membuktikan bahwa selama krisis ekonomi 1997-1998 usaha kecil menengah dapat bertahan lebih baik dibanding usaha besar. Selain itu jika dibandingkan dengan hasil penelitian internasional, maka efisiensi pada usaha kecil dan menengah dapat secara kondusif mempercepat pertumbuhan perekonomian ke arah industrialisasi.

Studi *kedua* oleh Albert Berry, Edgard Rodriguez, dan Henry Sandee (2001). Metode yang digunakan adalah menghitung TFP (*Total*

Factors Productivity), untuk mengamati perkembangan UKM di Indonesia. Studi ini menganalisis tentang peranan dari kluster dan subkontrak sebagai faktor yang menyebabkan terjadinya evolusi pada perusahaan kecil dan menengah di Indonesia selama 25 tahun terakhir ini.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan telah menjadi eksportir untuk beberapa komoditi seperti *furniture* dan garmen setelah melakukan hubungan subkontrak dengan investor asing dan pembeli sebagai akibat dari adanya aglomerasi yang didorong karena *clustering* pada lokasi tertentu. Dan ini tidak lepas dipengaruhi juga oleh kebijakan pemerintah yang mendorong terjadinya *clustering*.

Ketiga, studi yang dilakukan oleh Perry Wardjio dan Untoro (2005). Studi ini menggunakan metode Merton. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil perhitungan resiko kredit UKM (default risk) bank yang dapat dialihkan kepada suatu lembaga penjaminan kredit (LPK); mengkaji kapasitas penjaminan dari LPK melalui penghitungan ratio kebutuhan modal LPK untuk dapat menutup resiko penjaminan kredit UKM; dan mengkaji usulan skema penjaminan (risk sharing) untuk kredit UKM diantaranya dengan memanfaatkan sumber dana dari dana bergulir PEMDA dan atau penyisihan laba BUMN/D. Dengan diperoleh hasil perhitungan default risk kredit UKM, kapasitas penjaminan kredit UKM oleh LPK dan skema penjaminan kredit, maka diharapkan akan memberikan acuan bagi para pihak yang terlibat dalam pengembangan UKM. Lebih khusus lagi kepada upaya mendorong bank untuk meningkatkan kredit ke sektor usaha mikro kecil.

Keempat, Studi oleh Mitsuhiro Hayashi (2002). Studi ini menghitung TFP sama seperti yang dilakukan oleh Albert Berry, Edgard Rodriguez, dan Henry Sandee. Studi ini menjelaskan tentang perkembangan UKM di Indonesia selama tahun 1986-1996 dengan menggunakan data survei industri BPS. Dari hasil penelitiannya diketahui bahwa kontribusi UKM terhadap nilai tambah total sektor industri kecil, tetapi kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja

cukup signifikan. UKM (*small- and medium-scale enterprises*) dapat memproduksi output dengan modal yang lebih sedikit (padat karya) daripada usaha besar (*large-scale enterprises*).

Selama kurun waktu tersebut diketahui bahwa produktivitas tenaga kerja baik di UKM maupun usaha besar mengalami peningkatan yang sama. Sedangkan peningkatan produktivitas tenaga kerja industri UKM yang menggunakan mesin lebih cepat daripada sektor lainnya. Begitu pula dengan TFP-nya. Secara umum selama kurun waktu tersebut, industri yang berbasis UKM mengalami peningkatan kinerja.

Penggunaan IO sendiri dalam beberapa tulisan dan laporan dari Kementerian Koperasi dan UKM (2004 & 2007), menjelaskan IO dapat digunakan untuk menghitung berapa besar sumbangan UKM terhadap penyerapan tenaga kerja serta sumbangan UKM terhadap PDB Indonesia.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data *Input-output* UKM Indonesia tahun 2000 yang penyusunannya berdasarkan I-O tahun 2000 yang diterbitkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah dan BPS. Dalam penelitian ini sepenuhnya digunakan data sekunder, namun untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari kedua lembaga tersebut, juga digunakan data-data pendukung yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga lainnya. Untuk data kredit menggunakan data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dari tahun 2001 – 2007.

3. 2. Tahapan Analisis

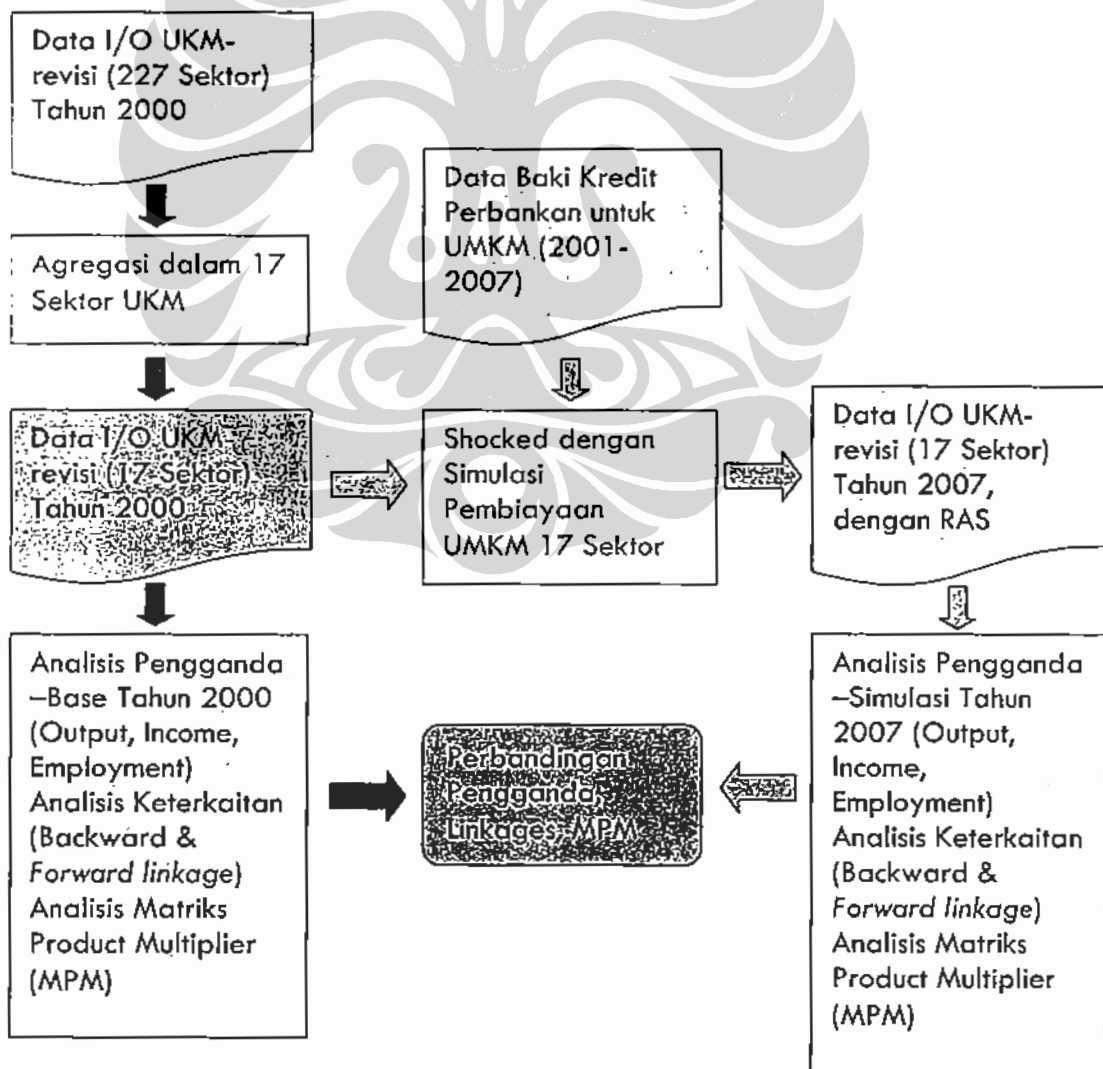
Dalam melakukan analisis, tahapan-tahapan yang dilakukan meliputi :

1. Simulasi pada tabel I-O UKM yang telah diagregasi menjadi 17 sektor. Pemilihan jumlah sektor ini disesuaikan dengan sektor dalam Pembiayaan Usaha Mikro Tahun 2001 - 2007 yang tercantum dalam Realisasi Bisnis Bank Indonesia. Tabel hasil agregasi ini dianalisis menggunakan model I-O, sehingga didapatkan gambaran umum struktur perekonomian pada masa tersebut.
2. Selanjutnya dilakukan simulasi pada Tabel I-O 17 sektor tersebut sebagai representasi dilaksanakannya kebijakan pembiayaan usaha mikro di tahun 2001-2007. Berdasarkan hasil simulasi, akan diamati perubahan multiplier dan analisa keterkaitan antar sektor. Dengan menggunakan *basic analysis* dalam I-O, akan dapat diketahui persentase multiplier dan indeks keterkaitan serta perubahan ranking (urutan) sektor dalam perekonomian berdasarkan analisis multiplier dan keterkaitan tersebut.
3. Untuk melihat perubahan perekonomian setelah adanya tambahan kredit dalam perekonomian, maka dengan metode RAS disimulasi

table IO tahun 2007. Selanjutnya dihitung multiplier serta indeks keterkaitan dari perekonomian simulasi tersebut. Kemudian dibandingkan multiplier serta keterkaitan antara dua perekonomian, antara perekonomian sebelum adanya tambahan kredit dengan perekonomian dengan adanya kredit.

- Selanjutnya, dilakukan analisis lebih lanjut untuk melihat keterkaitan antar sektor lebih dari sekedar penghitungan keterkaitan ke belakang dan ke depan. Metode analisis yang digunakan ialah dengan menghitung *multiplier product matrix* atau MPM. Dari tahapan ini akan didapatkan gambaran mengenai hirarki sektor-sektor produksi di perekonomian berdasarkan keterkaitannya baik ke muka maupun ke belakang

Gambar 3.1. Diagram Tahapan Analisis



3.3. Sekilas tentang Tabel Input-Output

Tabel Input-Output (I-O) disusun untuk menyajikan gambaran tentang hubungan timbal balik dan saling keterkaitan antar satuan kegiatan (sektor) dalam perekonomian suatu negara secara menyeluruh. Bentuk penyajian tabel I-O adalah dalam model matriks, di mana masing-masing barisnya menunjukkan bagaimana output suatu sektor dialokasikan untuk memenuhi permintaan antara dan permintaan akhir, sedangkan masing-masing kolomnya menunjukkan pemakaian input antara dan input primer oleh suatu sektor dalam proses produksinya.

Usaha penyusunan tabel I-O UKM di samping mampu menghasilkan alat yang efektif untuk analisis dan proyeksi perekonomian dalam suatu perencanaan pembangunan, dapat juga dijadikan landasan untuk menilai dan mengetahui berbagai kelemahan data-data statistik lainnya. Sehingga hasil dari penyusunan suatu tabel I-O selanjutnya dapat dimanfaatkan dalam usaha penyempurnaan sistem perstatistikan nasional.

Tabel I-O menyajikan data input maupun output secara rinci dan menggambarkan keterkaitan antar sektor di dalam perekonomian yang bersifat statis berdasar asumsi-asumsi yang melandasinya yaitu :

1. Asumsi keseragaman (*homogeneity assumption*), yang mengisyaratkan bahwa setiap sektor memproduksi suatu output tunggal dengan struktur input tunggal dan tidak ada substitusi otomatis terhadap input dari output sektor yang berbeda-beda.
2. Asumsi kesebandingan (*proportionality assumption*), yang mengisyaratkan hubungan antara input dan output di dalam tiap sektor merupakan fungsi linier yaitu jumlah setiap jenis input yang diserap tertentu naik atau turun sebanding dengan kenaikan atau penurunan output sektor tersebut.

Asumsi-asumsi tersebut menimbulkan keterbatasan dalam penggunaan model I-O karena koefisien input atau koefisien teknologi dianggap konstan sepanjang periode analisis, dengan kata lain tidak

ada perubahan teknologi sehingga kuantitas dan harga input sebanding dengan perubahan kuantitas dan harga output.

Tabel I-O dan analisisnya pertama kali dikembangkan oleh Professor Wassily Leontief pada akhir dekade 1930-an. Dalam perkembangannya, metode-metode yang diturunkan dari suatu tabel I-O semakin banyak diterapkan sebagai alat analisis dan perencanaan ekonomi yang praktis dan bersifat kuantitatif. Sejumlah buku (*textbook*) mengenai model I-O telah banyak diterbitkan oleh lembaga/universitas di luar negeri untuk mengantisipasi penggunaan yang semakin luas dan berkembang.

Dari sisi analisis ekonomi, model I-O telah banyak diimplementasikan. Analisis dampak ekonomi dari pariwisata, ekspor, impor, dan APBN, serta dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penggunaan sumber daya alam, teknologi dan lingkungan banyak dilakukan dengan menggunakan model I-O ini.

3.4. Sistematika Tabel I-O

Secara umum tabel I-O terdiri dari komponen-komponen pembentuk perekonomian sebagai berikut :

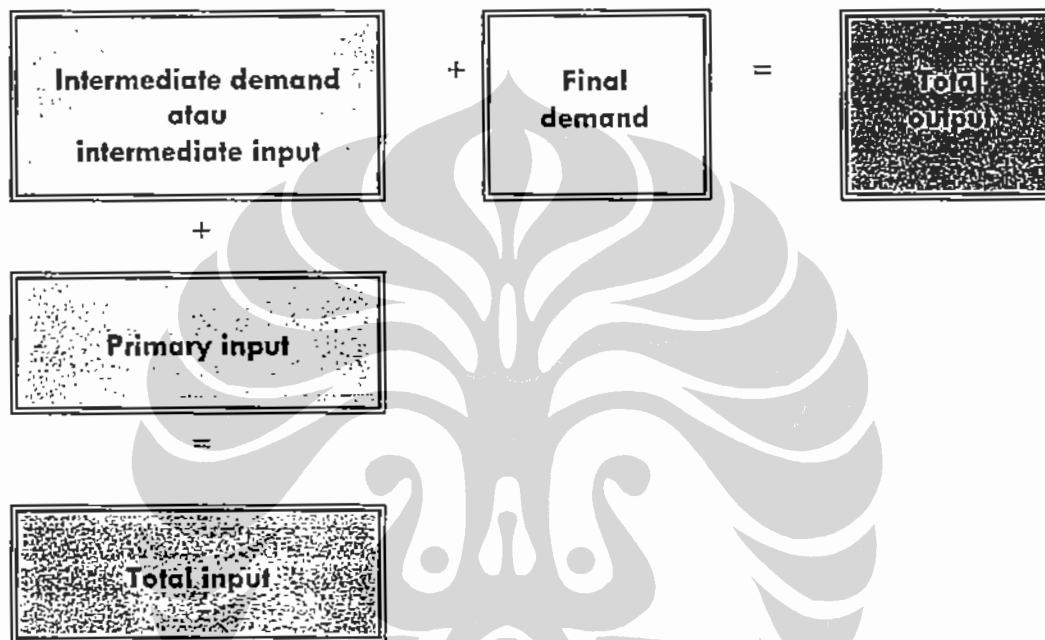
1. *Intermediate demand* atau *intermediate input* sering pula disebut sebagai permintaan antara atau input antara adalah nilai output dari sektor tertentu yang digunakan sebagai input produksi di sektor yang lain.
2. *Final demand* atau permintaan akhir adalah nilai produk atau barang tiap sektor yang dikonsumsi oleh masing-masing segmen pasar tertentu yaitu konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, investasi, ekspor dan impor.
3. *Total output* atau output total adalah total produk atau barang tiap sektor yang diperoleh dengan menjumlahkan nilai *intermediate demand* dan *final demand* tiap sektor.
4. *Primary input* atau input antara adalah *reward* yang diterima oleh semua faktor produksi yang dimiliki tiap sektor dalam proses

produksi, biasanya disebut *value added* atau nilai tambah, yang terdiri dari *wages, interest, rent, dan profit*.

5. *Total input* atau input total adalah total input tiap sektor yang diperoleh dari penjumlahan antara *intermediate input* dan *primary input* tiap sektor.

Dalam bentuk diagram dapat disajikan sebagai berikut :

Gambar 3.2. Diagram Tabel Input Output



Ide dasar dari tabel I-O adalah menyamakan nilai output per sektor dengan nilai input per sektor, tetapi karena tabel I-O menggambarkan hubungan timbal balik dan saling keterkaitan antar satuan kegiatan (sektor) dalam perekonomian suatu negara secara menyeluruh, maka dapat dikatakan bahwa nilai total output harus sama dengan nilai total input (TO=TI).

Dalam struktur perekonomian, hubungan antar kegiatan ekonomi menunjukkan adanya saling keterkaitan. Jenis-jenis kegiatan baru bermunculan untuk mengisi kekosongan mata rantai kegiatan yang semakin panjang dan kait-mengait. Kemajuan di suatu sektor tidak mungkin dapat dicapai tanpa dukungan sektor-sektor lainnya. Berbagai hubungan antar kegiatan ekonomi selanjutnya dapat direkam

dalam suatu instrumen statistik yang kemudian dikenal dengan Tabel Input-Output (Tabel I-O).

Tabel I-O pada dasarnya merupakan uraian statistik dalam bentuk matriks yang menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa serta saling keterkaitan antar satuan kegiatan ekonomi (sektor) dalam suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu. Isian sepanjang baris dalam matriks menunjukkan bagaimana output suatu sektor ekonomi dialokasikan ke sektor-sektor lainnya untuk memenuhi permintaan antara dan permintaan akhir. Sedangkan isian dalam kolom menunjukkan pemakaian input antara dan input primer oleh suatu sektor dalam proses produksi.

Sebagai suatu model kuantitatif, tabel I-O akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai:

1. struktur perekonomian nasional/regional yang mencakup struktur output dan nilai tambah bruto masing-masing sektor
2. struktur input antara yaitu penggunaan berbagai barang dan jasa oleh sektor-sektor produksi.
3. struktur penyediaan barang dan jasa, baik berupa produksi dalam negeri maupun barang-barang yang berasal dari impor.
4. struktur permintaan barang dan jasa, baik permintaan antara oleh sektor-sektor produksi maupun permintaan akhir untuk konsumsi, investasi dan ekspor.

Dalam menganalisis Produk Domestik Bruto berdasar tabel input output, dapat menggunakan tiga macam pendekatan :

1. *Expenditure approach* atau pendekatan pengeluaran
Merupakan penjumlahan total dari konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor tiap sektor dalam perekonomian.

$$PDB = \sum_{i=1}^n (C_i + I_i + G_i + X_i)$$

Keterangan :

- *PDB* = Produk Domestik Bruto

- C_i = konsumsi rumah tangga sektor ke i
- I_i = investasi sektor ke i
- G_i = pengeluaran pemerintah sektor ke i
- X_i = ekspor sektor ke i
- i = baris ke 1, 2, ..., n

2. *Production approach* atau pendekatan produksi

$$PDB = \sum_{j=1}^n VA_j$$

Keterangan : VA_j = *value added* pada sektor ke-j
 j = kolom ke 1, 2, ..., n

Merupakan penjumlahan total nilai *value added* tiap sektor secara vertikal.

3. *Income approach* atau pendekatan pendapatan

Merupakan penjumlahan total nilai *value added* tiap sektor secara horizontal. Keterangan :

$$PDB = \sum_{i=1}^n VA_i$$

VA_i = *value added* pada sektor ke- i
 i = baris ke 1, 2, ..., n

3.5. Analisis Angka Pengganda (Multiplier)

Analisis keterkaitan antar sektor yang telah dibahas hanya menunjukkan nilai indeks pemusatan dan indeks penyebaran dari koefisien-koefisien pada matriks koefisien langsung, matriks kebalikan terbuka dan matriks kebalikan tertutup. Teknik analisis tersebut tidak memperlihatkan rangkaian pengaruh suatu sektor terhadap sektor lainnya dalam suatu perekonomian. Oleh karenanya, analisis pengganda (ada yang menyebutnya sebagai analisis dampak berganda) perlu diperkenalkan karena analisis ini mampu menelusuri rentetan pengaruh suatu sektor, baik secara langsung, secara tidak

langsung ataupun imbasan, terhadap sektor lainnya dan perekonomian secara keseluruhan. Analisis pengganda merupakan analisis yang paling populer dalam analisis I-O.

Pada dasarnya, pengganda merupakan ukuran respon terhadap rangsangan perubahan suatu perekonomian, yang dinyatakan dalam hubungan sebab-akibat. Pengganda pada model I-O diasumsikan sebagai respon meningkatnya permintaan akhir suatu sektor. Dalam penelitian ini akan dibahas *Output Multiplier*, *Income multiplier* dan *Employment multiplier*.

3.5.1. Pengganda Output (*Income multiplier*)

Angka pengganda output menunjukkan besaran tambahan output suatu sektor akibat adanya tambahan final demand sebesar Rp 1 di satu sektor tertentu.

Ide dasar dari pendekatan ini mirip dengan kerangka *multiplier Keynesian*. Jika misalnya ada perubahan pada variabel eksogen (dalam hal ini unsur dari permintaan akhir), maka dapat dilihat berapa besar pengaruh perubahan tersebut pada peningkatan output di seluruh sektor. Adapun proses dari penghitungan pengganda produksi ini dapat disimak pada penjelasan berikut.

Dengan menggunakan matriks koefisien input dari a_{ij} , sama seperti cara penghitungan matriks kebalikan Leontief sebelumnya, maka jika kita ingin mengetahui pengaruh dari perubahan permintaan akhir (sebagai contoh pengeluaran pemerintah pada sektor 1) dan jika elemen-elemen matriks tersebut diberi simbol α_{ij} , maka matriknya menjadi:

$$\begin{array}{c|c} \begin{array}{c} \Delta X_1 \\ \Delta X_2 \\ \vdots \\ \Delta X_b \\ \vdots \\ \Delta X_n \end{array} & = & \begin{array}{cccccc} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1k} & \dots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \dots & \alpha_{2k} & \dots & \alpha_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \alpha_{b1} & \alpha_{b2} & \dots & \alpha_{bk} & \dots & \alpha_{bn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \dots & \alpha_{nk} & \dots & \alpha_{nn} \end{array} & \begin{array}{c} \Delta F_1 \\ \mathbf{0} \\ \vdots \\ \mathbf{0} \\ \vdots \\ \mathbf{0} \end{array} \end{array}$$

Atau dapat dituliskan dalam bentuk rangkaian persamaan-persamaan :

$$\Delta X_1 = \alpha_{11} \cdot \Delta F_1$$

$$\Delta X_2 = \alpha_{21} \cdot \Delta F_1$$

:

$$\Delta X_b = \alpha_{n1} \cdot \Delta F_1$$

:

$$\Delta X_n = \alpha_{n1} \cdot \Delta F_1$$

Koefisien α_{11} , α_{21} , sampai dengan α_{n1} pada rangkaian persamaan di atas menunjukkan pengaruh total, baik langsung maupun tidak langsung dari setiap unit perubahan F_1 terhadap hasil produksi di sektor X_1 , X_2 , sampai dengan X_n . Dengan demikian rumus dari pengganda output (produksi) total ini adalah

$$OM_k = \sum_{b=1}^n \alpha_{bk}$$

Penghitungan nilai pengganda output total di masing-masing sektor dihasilkan dengan menjumlahkan nilai-nilai pada setiap kolom matriks kebalikan Leontief. Hasil penjumlahan itulah yang akan menjadi nilai pengganda produksi di sektor tersebut. Di sini berarti bahwa semakin besar nilai pengganda yang dihasilkan oleh suatu sektor, maka dapat disimpulkan bahwa sektor tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan sektor-sektor lainnya di dalam perekonomian. *Income multiplier* yang diperoleh dari matriks kebalikan Leontief I-O terbuka disebut pengganda output Tipe I, dan bila diperoleh dari matriks kebalikan Leontief I-O tertutup disebut dengan pengganda output Tipe II.

3.5.2. Pegganda Pendapatan Rumah Tangga (*Income multiplier*)

Indeks pengganda Pendapatan Rumah Tangga menunjukkan besarnya tambahan pendapatan rumah tangga di suatu sektor jika ada tambahan final demand sebesar Rp 1 di satu sektor tersebut. Pendapatan rumah tangga berasal dari penerimaan gaji/upah tenaga kerja - yang pada gilirannya merupakan proporsi tertentu dari output yang diproduksi. Hubungan antara output dan pendapatan rumah tangga dapat dijelaskan sebagai berikut : pendapatan rumah tangga berasal dari pembayaran upah/gaji oleh sektor produksi. Dengan demikian, untuk setiap Rp 1 output suatu sektor, akan dapat diketahui proporsi yang dikeluarkan untuk membayar upah/gaji. Hal ini dapat dilihat pada matriks input primer, yang biasanya diletakkan sebagai input primer pertama.

Analisis pengganda pendapatan di sini merupakan suatu alat analisis untuk melihat pengaruh dari perubahan-perubahan permintaan akhir di dalam satu sektor terhadap pendapatan di sektor tersebut di dalam perekonomian (yang tercermin dalam nilai tambah bruto pada Table I-O). Jadi nilai angka pengganda pendapatan sektor j menunjukkan jumlah pendapatan rumah tangga total yang tercipta akibat adanya tambahan satu unit permintaan akhir disektor j tersebut. Pengaruh disebut dengan pengganda pendapatan rumah tangga (*household income multiplier*) yang sering disebut juga dengan efek pendapatan (*income effect*).

Pengukuran besarnya pengganda pendapatan ini dapat digolongkan menjadi 4 jenis yaitu pengganda pendapatan biasa, pengganda pendapatan total, pengganda pendapatan tipe I dan pengganda pendapatan tipe II. Perbedaan dari keempat jenis tersebut akan dibahas sebagai berikut :

Pengganda Pendapatan Biasa

Angka pengganda pendapatan jenis ini adalah angka pengganda pendapatan rumah tangga yang didapatkan dari analisis model dengan

rumah tangga sebagai faktor yang eksogen, artinya rumah tangga tidak dimasukkan menjadi salah satu faktor dalam analisa. Sering disebut juga analisa angka pengganda pendapatan jenis terbuka biasa, karena diperoleh dari matriks koefisien yang terbuka. Untuk tambahan output di setiap sektornya, tambahan pendapatan rumah tangga yang diakibatkan oleh adanya perubahan dalam permintaan akhir ditunjukkan oleh baris ke (n+1) di matriks koefisien input-outputnya. Angka pengganda pendapatan dapat dihitung sebagai berikut :

Jika $v_j = V_j / X_j$ maka $H_j = \sum v_j \cdot (I - A)^{-1}$
dimana

- v_j : koefisien nilai tambah (berupa upah/gaji) sektor j
- V_j : nilai tambah (berupa upah/gaji) sektor j
- X_j : total output sektor j
- H_j : angka pengganda pendapatan biasa sektor j
- $(I - A)^{-1}$: matriks kebalikan Leontief

Pengganda Pendapatan Total

Pengganda pendapatan jenis ini menjadikan rumah tangga sebagai salah satu faktor (sektor) yang endogen dalam analisa modelnya. Angka pengganda jenis ini akan menghasilkan angka yang lebih besar dari angka pengganda pendapatan biasa, karena telah memasukkan dampak langsung, dampak tidak langsung, dan efek tambahan yaitu *induced effect* dari masuknya rumah tangga sebagai faktor endogen di dalam model input-output. Persamaan matematisnya hampir sama dengan pengganda pendapatan biasa, hanya ditambah dengan sektor rumah tangga. Sering juga disebut dengan pengganda pendapatan jenis tertutup, karena diperoleh dari matriks koefisien yang tertutup (memasukkan rumah tangga sebagai salah satu sektor).

Pengganda Pendapatan Tipe I (*Income multiplier Type I*)

Kedua jenis pengganda pendapatan di atas dihasilkan atas anggapan bahwa efek awal dari perubahan permintaan akhir adalah

sebesar satu unit uang. Pendapat lain mengatakan bahwa efek awal pendapatan rumah tangga tersebut adalah seperti yang ditunjukkan oleh proporsi upah atau gaji dalam total output setiap sektornya. Sehingga nilai perubahan pendapatan rumah tangga nantinya harus dibagi dengan proporsi upah atau gaji yang diperlukan untuk memproduksi satu unit output sektor yang bersangkutan. Angka pengganda macam ini, bila dilakukan pada model input-output terbuka, disebut dengan angka pengganda pendapatan tipe I, dan apabila diterapkan pada suatu model input-output tertutup, disebut dengan angka pengganda pendapatan rumah tangga tipe II.

Angka pengganda pendapatan tipe I didapatkan dengan membagi *direct* dan *indirect income changes* dengan *direct income changes*. *Direct* dan *indirect income changes* diperoleh dari hasil perkalian *Leontief invers* dengan proporsi bagian upah dan gaji di dalam pembentukan output (*wages share*) suatu sektor. Sedangkan *direct income changes* adalah proporsi/bagian upah dan gaji per sektor tersebut terhadap total output. Untuk lebih jelasnya nilai pengganda pendapatan tipe I dapat dihitung melalui persamaan:

$$\text{Income multiplier type I} = \frac{v(I-A)^{-1}}{v}$$

dimana

v : bagian nilai tambah bagian upah/gaji per total output

$(I - A)^{-1}$: matriks kebalikan Leontief

Pengganda Pendapatan Tipe II (*Income multiplier Type II*)

Sama seperti tipe I, angka pengganda pendapatan tipe II juga menghitung besarnya pengaruh terhadap total pendapatan di keseluruhan sektor, jika terjadi peningkatan pendapatan dalam suatu sektor perekonomian. Yang membedakannya dengan tipe I adalah asumsinya yang menyatakan bahwa jika pendapatan rumah tangga di suatu sektor mengalami peningkatan, maka rumah tangga di sektor tersebut juga akan meningkatkan konsumsinya. Dengan demikian

uang yang dibelanjakan tersebut akan masuk kembali ke dalam *circular flow* pada perekonomian tersebut.

Penyelesaian secara matriks dilakukan dengan menambahkan satu kolom untuk bagian (*share*) konsumsi rumah tangga terhadap total konsumsi rumah tangga dan satu baris untuk bagian upah dan gaji per sektor (balas jasa TK/*wages*) pada matriks teknologi (biasanya dinotasikan dengan matriks A). Cara ini menghasilkan matriks koefisien teknologi dan *Leontief inverse* yang baru. Tafsiran di belakangnya dengan demikian berarti ada sumbangan dari sektor rumah tangga terhadap multiplier yang digambarkan pada efek penganda pendapatan tipe I, yang dikenal dengan istilah *induced income*.

Besarnya nilai pengganda pendapatan tipe II ini merupakan rasio antara penjumlahan *indirect*, *direct* dan *induced income changes* dengan *direct income changes*. Besaran yang menjadi pembilang dalam hal ini berasal dari matrik *Leontief invers* yang baru (dimana *induced income* masuk). Untuk lebih jelasnya, formula penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Income multiplier type II} = \frac{v(I-A^*)^{-1}}{v}$$

dimana

v : bagian nilai tambah per total output

$(I - A^*)^{-1}$: matriks kebalikan leontief yang baru.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa angka pengganda pendapatan tipe II akan lebih besar bila dibandingkan dengan tipe I. Hal ini dikarenakan tambahan pendapatan di satu sektor tersebut, dimasukkan kembali ke dalam perekonomian dalam bentuk konsumsi

Sebagai catatan tambahan, analisis ini hanya menekankan diri pada pertumbuhan pendapatan di keseluruhan sektor tanpa melihat pemerataan pendapatan di masing-masing sektor. Tetapi sebagai alat analisis, pengganda pendapatan ini dapat digunakan untuk memilih

sektor-sektor mana yang dapat dijadikan andalan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Karena tidak tersedianya data untuk bagian pertemuan kolom (konsumsi rumah tangga) dan baris (nilai tambah berupa upah/gaji), untuk membentuk matriks koefisien yang tertutup, maka untuk melakukan perhitungan jenis pengganda pendapatan total dan tipe II data tersebut dianggap nol (Bambang PS Brodjonegoro, 2001).

3.5.3. Pengganda Tenaga Kerja (Employment Multiplier)

Angka pengganda tenaga kerja menunjukkan besaran tambahan penyerapan tenaga kerja di sektor suatu sektor akibat adanya tambahan final demand sebesar Rp 1 di satu sektor tersebut. Terdapat hubungan yang proporsional antara output yang diproduksi dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Jika diketahui besar tambahan output yang akan diproduksi, maka dapat dihitung pula jumlah tenaga kerja yang diperlukan.

Untuk mencari nilai pengganda tenaga kerja perlu ditambahkan baris baru pada Tabel I-O yang memuat informasi tenaga kerja yang digunakan oleh masing-masing sektor dalam melakukan proses produksinya. Dan data tenaga kerja sektoral tidak terdapat di dalam Tabel I-O, sehingga diperoleh dari sumber eksternal. Umumnya, satuan jumlah tenaga kerja sektoral yang digunakan adalah orang. Jumlah tenaga kerja per satuan output untuk sektor i ditulis w_i .

Analisis pengganda tenaga kerja ini digunakan untuk melihat peran suatu sektor dalam hal meningkatkan besarnya jumlah tenaga kerja yang terserap oleh perekonomian. Jika nilai pengganda tenaga kerja disuatu sektor lebih besar dari satu menunjukkan daya serap tenaga kerja di sektor yang bersangkutan cukup tinggi.

Rumus yang digunakan untuk mencari nilai pengganda tenaga kerja biasa adalah:

Jika $w_j = L_j / X_j$ maka $l_j = \sum w_j \cdot (I - A)^{-1}$

dimana

w_j : koefisien tenaga kerja (berupa orang/output) sektor j

L_j : jumlah tenaga kerja (berupa orang) sektor j

X_j : total output sektor j

l_j : pengganda tenaga kerja

Berbagai analisis tipe lain, seperti pengganda tenaga kerja total, Tipe I, dan Tipe II dapat dilakukan seperti halnya dalam menganalisis pengganda pendapatan masyarakat.

3.6. Analisis Keterkaitan (Linkage Analysis)

3.6.1. Keterkaitan ke Belakang (*Backward Linkage*)

Peningkatan output sektor tertentu akan mendorong peningkatan output sektor-sektor lainnya, melalui dua cara. Pertama peningkatan output sektor akan meningkatkan permintaan input sektor tersebut. Input sektor tadi ada yang berasal dari sektor sendiri, ada pula yang berasal dari sektor lain, katakan (di model dua sektor) sektor j . Sektor meminta output sektor j lebih banyak dari sebelumnya, yang berarti harus ada peningkatan output sektor j . Peningkatan output sektor j ini, pada gilirannya, akan meningkatkan permintaan input sektor i itu sendiri. Begitu seterusnya, terjadi keterkaitan antarsektor industri tersebut. Keterkaitan antarsektor industri yang seperti ini disebut dengan keterkaitan ke belakang (*backward linkage*), **karena keterkaitannya bersumber dari mekanisme penggunaan input produksi**. Ukuran *Backward linkage* dinotasikan dalam :

$$\text{Direct Backward Linkage : } B(d)_j = \sum_{i=1}^n a_{ij}$$

$$\text{dan Total Backward Linkage : } B(d+i)_j = \sum_{i=1}^n b_{ij}$$

3.6.2. Keterkaitan ke Depan (*Forward Linkage*)

Peningkatan output sektor tertentu akan mendorong peningkatan output sektor-sektor lainnya, melalui dua cara. Pertama peningkatan output sektor *i* akan meningkatkan distribusi output sektor tersebut. Hal ini membuat sektor lain memiliki input produksi yang lebih banyak. Karena itu sektor-sektor lain akan meningkatkan pula proses produksinya, yang pada gilirannya mendistribusikan output produksi yang lebih banyak lagi.

Keterkaitan antar sektor industri yang seperti ini disebut dengan keterkaitan ke depan (*forward linkage*), karena **keterkaitannya bersumber dari mekanisme penggunaan output produksi.**

Ukuran *Forward linkage* dinotasikan dalam :

$$\text{Direct Forward Linkage : } F(d)_j = \sum_{i=1}^n a_{ij}$$

$$\text{dan Total Forward Linkage : } F(d+i)_j = \sum_{i=1}^n b_{ij}$$

3.7. Multiplier Product Matrix (MPM)

Beberapa analisis melihat keterkaitan antar sektor lebih dari sekedar penghitungan keterkaitan ke belakang dan ke depan. Satu metode analisis yang dapat digunakan ialah dengan menghitung *multiplier product matrix* atau MPM. Penghitungan MPM ini dilakukan dengan membuat dua indeks seperti yang diusulkan oleh Rasmussen. Pertama ialah *power dispersion for the backward linkage*, dan kedua ialah *index of sensitivity of dispersion for forward linkage*. Kedua indeks BL dan FL yang telah diketahui sebelumnya dinormalisir dengan rata-rata elemen matriks kebalikan Leontief. Membandingkan total kolom/baris matriks kebalikan Leontief bisa jadi bukan perbandingan yang setara. Kesetaraan didapat dengan menormalisir total kolom/baris tersebut dengan suatu nilai rata-rata yang didapatkan dari matriks kebalikan Leontief yang bersangkutan.

$$BL_j = \frac{\frac{1}{n} \sum_f b_y}{\frac{1}{n^2} \sum_i \sum_f b_y} = \frac{\frac{1}{n} B_i(d+i)}{\frac{1}{n^2} V} = \frac{B_i(d+i)}{\frac{1}{n} V}$$

$$FL_j = \frac{\frac{1}{n} \sum_f b_y}{\frac{1}{n^2} \sum_i \sum_f b_y} = \frac{\frac{1}{n} F_i(d+i)}{\frac{1}{n^2} V} = \frac{F_i(d+i)}{\frac{1}{n} V}$$

MPM pada prinsipnya adalah suatu teknik penyajian peringkat sektor-sektor berdasarkan nilai *forward* dan *backward linkage*. Secara formal rumusannya ialah sebagai berikut :

$$M = \frac{1}{V} xF(d+i)xB(d+i) = [m_y]$$

Pada persamaan di atas, Matriks M memiliki karakteristik yang identik dengan karakteristik matriks kebalikan Leontief perekonomian yang bersangkutan. Berdasarkan penjumlahan kolom :

$$\sum_j m_{ij} = \frac{1}{V} \sum_j (F_i(d+i)xB_j(d+i)) = F_i(d+i)$$

Sedangkan berdasarkan penjumlahan baris :

$$\sum_i m_{ij} = \frac{1}{V} \sum_i (F_i(d+i)xB_j(d+i)) = F_i(d+i)$$

Dari kolom dan baris matriks M tersebut dapat dibuat urutan peringkat *backward linkage* (untuk kolom) dan peringkat *forward linkage* (untuk baris). Dengan demikian akan didapatkan gambaran mengenai hirarki sektor-sektor produksi di perekonomian berdasarkan keterkaitannya baik ke muka maupun ke belakang. Melalui tehnik ini, akan dapat diketahui perubahan-perubahan struktural yang terjadi akibat adanya pemberian kredit selama tahun 2001-2007

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

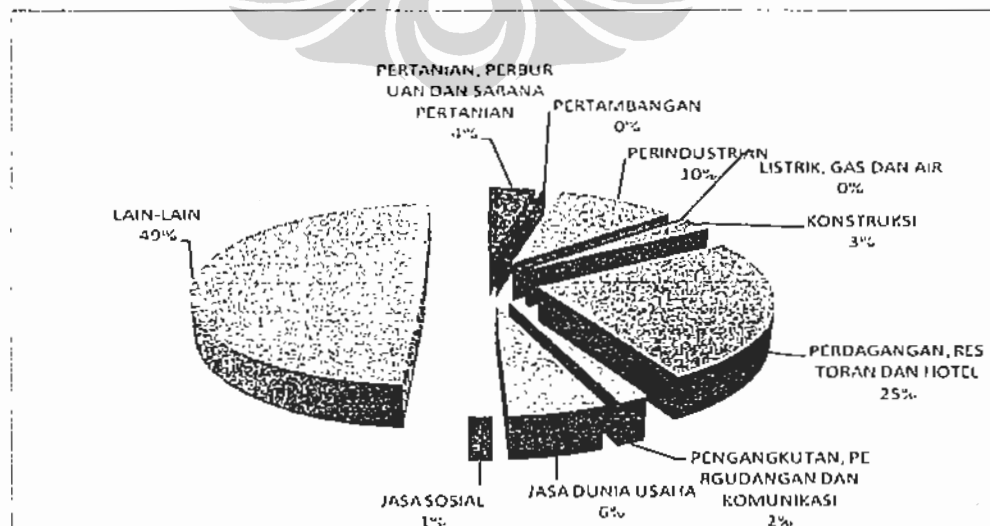
Pada bab ini akan dipaparkan mengenai pengolahan data dan hasil analisisnya. Sebelum pada bagian pengolahan data, dideskripsikan terlebih dahulu mengenai data awal perekonomian serta data kredit yang dikururkan sepanjang tahun 2001 – 2007. Pada bagian hasil, dipaparkan hasil yang diperoleh dari pengolahan data sebelum dan setelah dilakukan simulasi perubahan *direct input* dalam sistem perekonomian multisektor Indonesia periode 2000 akibat dikurkannya Kredit ke sektor Kecil dan Menengah.

4.1. Gambaran Umum Kredit pada Usaha Kecil dan Menengah 2001 – 2007

Pada bagian ini akan diuraikan gambaran umum pemberian kredit yang dilakukan perbankan sepanjang 2001 – 2007. Disamping itu akan dilihat pula komposisi kredit usaha kecil dan menengah dibanding dengan kredit usaha besar.

Dapat dilihat pada grafik 4.1, bahwa selain sektor lain-lain yang besar, sektor UMKM pada Perdagangan, restoran dan Hotel mendapatkan 25% dari seluruh alokasi

Grafik 4.1. Alokasi Kredit UMKM 2001-2007

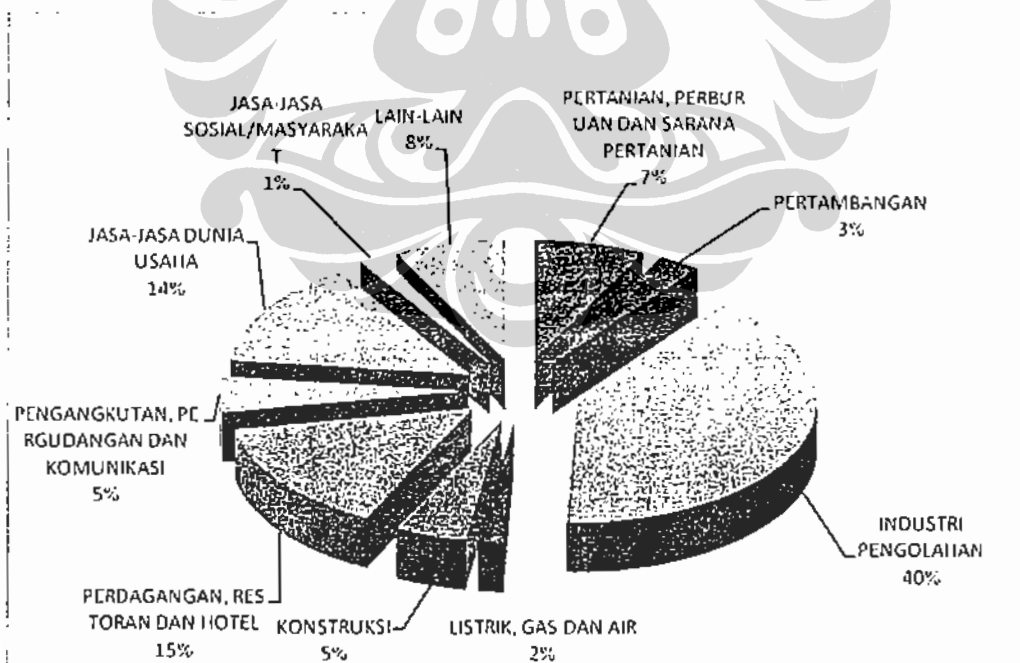


Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Kredit pada UMKM, pada urutan berikut adalah sektor Perindustrian Kecil Memengah sekitar 10%. Pemberian kredit ke sektor perdagangan, restoran dan hotel (kecil menengah) dilakukan oleh perbankan karena dianggap sektor ini memberikan perputaran uang yang lebih cepat dibanding sektor lain.

Alokasi kredit pada sektor usaha besar tentunya berbeda dengan sektor usaha kecil menengah. Dengan grafik 4.2. dapat dilihat Industri Pengolahan (Besar) mendapat porsi kredit paling besar yaitu sekitar 40% dari total kredit ke usaha besar, sedangkan sektor yang mendapat porsi alokasi terkecil adalah sektor jasa-jasa social/masyarakat yaitu hanya sekitar 1%. Alasan kenapa sektor industry pengolahan mendapatkan porsi terbesar karena pada sektor ini selain dapat memberikan perputaran uang yang lebih cepat, juga karena sektor ini menjadi penggerak perekonomian ke arah industrialisasi.

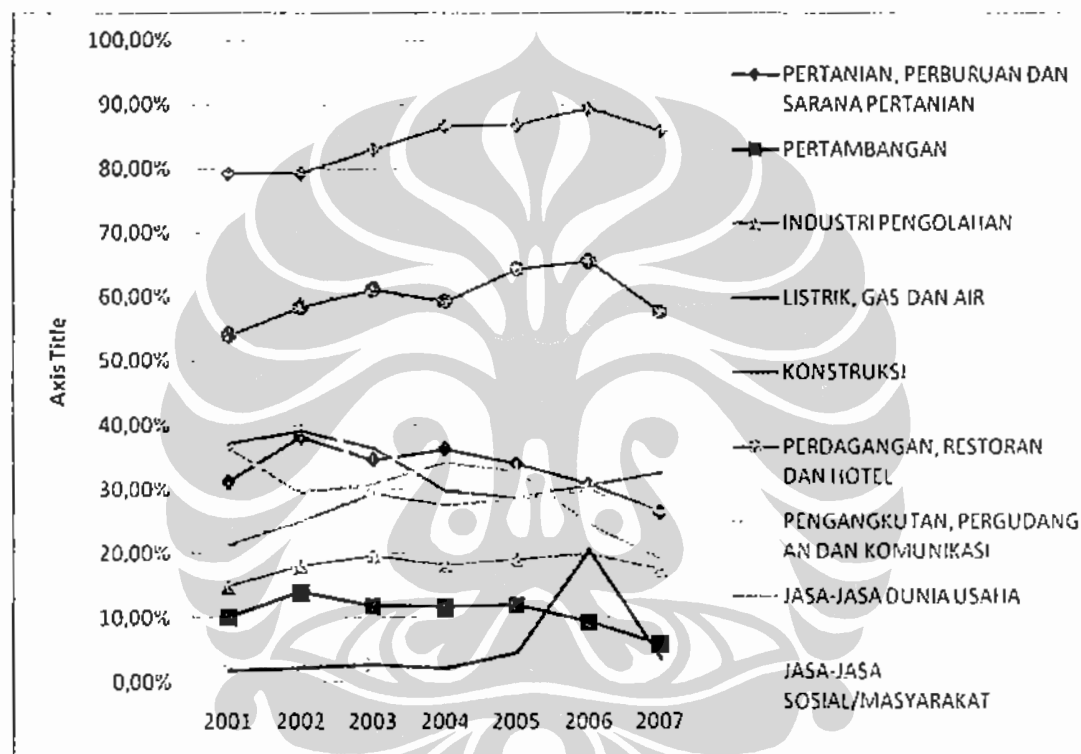
Grafik 4.2. Alokasi Kredit Usaha Besar 2001-2007



Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Pembagian kredit ke sektor usaha kecil menengah dengan usaha besar selama 7 tahun juga mengalami perubahan. Porsi pemberian kredit ke usaha kecil menengah sekitar tahun 2001-2006 mengalami peningkatan, sedangkan tahun 2007 beberapa sektor kecil menengah mengalami penurunan. Perubahan persentase ini dapat dilihat pada grafik 4.3.

Grafik 4.3. Persentase Alokasi Kredit UMKM terhadap Kredit Usaha Besar



Sumber : Bank Indonesia (Diolah)

4.2. Gambaran Umum Perekonomian berdasarkan Tabel I-O UKM 2000 dengan tambahan kredit UKM

Pada bagian ini akan diuraikan gambaran umum perekonomian berdasarkan Tabel I-O UKM tahun 2000. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka analisa hanya dibatasi pada nilai pengganda dan analisa keterkaitan. Disamping itu akan dilihat pula komposisi output sektoral masing-masing sektor pada periode tersebut. Pada tabel 4.1. dapat terlihat bahwa sektor Industri Pengolahan skala besar memiliki

kontribusi terbesar pada total output sektoral Indonesia berdasarkan tabel I-O UKM tahun 2000. Nilai output sektor ini adalah sebesar Rp 765.579.687 juta (28,31%). Sektor kedua yang memiliki kontribusi terbesar adalah sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel Kecil Menengah dengan nilai Rp. 329.705.262 juta (12,19%). Sedangkan sektor dengan kontribusi terkecil (0,12%) adalah sektor Pertanian dan Sarana Pertanian skala Besar, hanya sekitar 0,49%.

Tabel 4.1. Komposisi Output Sektoral UKM Indonesia 2000

Urut		Sektor	Total Output	Disribusi
1	6	Industri Pengolahan (Besar)	765579687	28,31%
2	10	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Kecil, Menengah)	329705262	12,19%
3	5	Industri Pengolahan (Kecil, Menengah)	314030471	11,61%
4	1	Pertanian dan Sarana Pertanian (Kecil, Menengah)	267643476	9,90%
5	14	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Kecil, Menengah)	187941794	6,95%
6	4	Pertambangan (Besar)	181460349	6,71%
7	8	Konstruksi (Kecil, Menengah)	151665831	5,61%
8	16	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Besar)	115971611	4,29%
9	13	Pengangkutan dan Komunikasi (Kecil, Menengah)	87079709	3,22%
10	9	Konstruksi (Besar)	76124539	2,81%
11	12	Pengangkutan dan Komunikasi (Besar)	64271113	2,38%
12	15	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Besar)	62043324	2,29%
13	7	Listrik, Gas, dan Air	30642801	1,13%
14	17	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Kecil, Menengah)	28753085,3	1,06%
15	3	Pertambangan (Kecil, Menengah)	15363708	0,57%
16	11	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Besar)	13226242	0,49%
17	2	Pertanian dan Sarana Pertanian (Besar)	13178825	0,49%

Sumber : Data I-O UKM 2003 (Diolah)

4.3. Analisis Pengganda dengan tambahan kredit UKM

4.3.1. Pengganda Output (*Income multiplier*)

Dalam tabel I-O terlihat jumlah output yang dapat diproduksi tergantung dari jumlah permintaan akhirnya. Namun demikian dalam keadaan tertentu, output justru yang menentukan besarnya permintaan akhir. Angka yang menunjukkan besarnya pengaruh permintaan akhir terhadap output total disebut *income multiplier*.

Tabel 4.2. *Income multiplier* I-O UKM Awal

Urutan		Sektor	Ouput Multiplier
1	9	Konstruksi (Besar)	2.29932916
2	8	Konstruksi (Kecil, Menengah)	2.29663158
3	5	Industri Pengolahan (Kecil, Menengah)	2.2212028
4	12	Pengangkutan dan Komunikasi (Besar)	2.2030388
5	6	Industri Pengolahan (Besar)	2.13853357
6	13	Pengangkutan dan Komunikasi (Kecil, Menengah)	2.09286843
7	7	Listrik, Gas, dan Air	2.09110168
8	17	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Kecil, Menengah)	1.88405398
9	16	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Besar)	1.78459704
10	10	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Kecil, Menengah)	1.77382383
11	11	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Besar)	1.73860064
12	14	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Kecil, Menengah)	1.70653619
13	15	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Besar)	1.59757578
14	2	Pertanian dan Sarana Pertanian (Besar)	1.48226621
15	3	Pertambangan (Kecil, Menengah)	1.44445016
16	1	Pertanian dan Sarana Pertanian (Kecil, Menengah)	1.4269763
17	4	Pertambangan (Besar)	1.20561548

Sumber : Data I-O UKM 2003 (Diolah)

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa setelah adanya tambahan kredit dari UKM, sektor Konstruksi Besar adalah sektor yang memiliki angka multiplier output terbesar, yakni 2.29932916. Angka ini mengandung arti bila permintaan akhir sektor Konstruksi Besar bertambah satu rupiah, maka output total akan bertambah sebesar Rp 2.29932916. Berdasarkan analisis terhadap indeks pengganda output ini, maka sektor Konstruksi Besar merupakan sektor yang paling potensial untuk menghasilkan tambahan output. Artinya, bila pemerintah bermaksud mengeluarkan kebijakan yang berorientasi pada nilai output yang tinggi, maka sektor ini patut dipertimbangkan untuk dijadikan prioritas.

Sektor terbesar kedua adalah Sektor Konstruksi (Kecil Menengah) mempunyai angka *income multiplier* terbesar kedua, yakni sebesar 2.29663158 disusul oleh sektor Industri Pengolahan (Kecil Menengah) dengan angka *income multiplier* sebesar 2.2212028 dan sektor Pengangkutan dan Komunikasi (Besar) dengan angka *income multiplier* 2.2030388, dan yang terkecil adalah sektor Pertambangan Besar dengan angka *income multiplier* sebesar 1.20561548.

4.3.2. Pengganda Pendapatan Rumah Tangga (*Income multiplier*)

Indeks pengganda Pendapatan Rumah Tangga menunjukkan besarnya tambahan pendapatan rumah tangga di suatu sektor jika ada tambahan final demand sebesar Rp 1 di satu sektor tersebut. Pendapatan rumah tangga berasal dari penerimaan gaji/upah tenaga kerja, yang pada gilirannya merupakan proporsi tertentu dari output yang diproduksi.

Hubungan antara output dan pendapatan rumah tangga dapat dijelaskan sebagai berikut : pendapatan rumah tangga berasal dari pembayaran upah/gaji oleh sektor produksi. Dengan demikian, untuk setiap Rp 1 output suatu sektor, akan dapat diketahui proporsi yang dikeluarkan untuk membayar upah/gaji. Hal ini dapat dilihat pada matriks input primer, yang biasanya diletakkan sebagai input primer

pertama. Tabel 4.3. menyajikan urutan sektoral berdasarkan indeks pengganda pendapatan yang dimiliki setiap sektor.

Tabel 4.3. *Income multiplier* I-O UKM Awal

Urutan	Sektor		<i>Income multiplier</i>
1	11	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Besar)	1.53342439
2	17	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Kecil, Menengah)	1.17506447
3	12	Pengangkutan dan Komunikasi (Besar)	1.0781239
4	5	Industri Pengolahan (Kecil, Menengah)	0.88937936
5	13	Pengangkutan dan Komunikasi (Kecil, Menengah)	0.68480603
6	15	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Besar)	0.68380062
7	14	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Kecil, Menengah)	0.68074814
8	6	Industri Pengolahan (Besar)	0.66052721
9	10	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Kecil, Menengah)	0.61939259
10	1	Pertanian dan Sarana Pertanian (Kecil, Menengah)	0.54976677
11	2	Pertanian dan Sarana Pertanian (Besar)	0.50979623
12	16	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Besar)	0.49471283
13	7	Listrik, Gas, dan Air	0.4574829
14	8	Konstruksi (Kecil, Menengah)	0.42196409
15	9	Konstruksi (Besar)	0.42180724
16	3	Pertambangan (Kecil, Menengah)	0.13370677
17	4	Pertambangan (Besar)	0.03230702

Sumber : Data I-O UKM 2003 (Diolah)

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa sektor yang memiliki *income multiplier* yang terbesar adalah sektor Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Besar) yakni sebesar 1.53342439. Angka ini berarti, untuk setiap kenaikan *direct income* sektor tersebut sebesar Rp 1,- akan mengakibatkan kenaikan perekonomian secara total sebesar Rp 1.53342439. Di urutan kedua adalah sektor Jasa Sosial Kemasyarakatan (Kecil Menengah) dengan indeks 1.17506447 yang disusul oleh sektor Pengangkutan dan Komunikasi (Besar) (1.0781239). Indeks pengganda pendapatan terkecil ditemukan pada sektor pertambangan besar, yakni sebesar 0.03230702.

4.3.3. Pengganda Tenaga Kerja (*Employment Multiplier*)

Angka pengganda tenaga kerja menunjukkan besaran tambahan penyerapan tenaga kerja di sektor suatu sektor akibat adanya tambahan final demand sebesar Rp 1 di satu sektor tersebut. Terdapat hubungan yang proporsional antara output yang diproduksi dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Jika diketahui besar tambahan output yang akan diproduksi, maka dapat dihitung pula jumlah tenaga kerja yang diperlukan.

Tabel 4.4 memperlihatkan bahwa sektor yang memiliki indeks pengganda tenaga kerja terbesar adalah sektor Pertanian dan Sarana Pertanian (Kecil, Menengah) dengan indeks sebesar 0.16749. Angka ini berarti, untuk setiap kenaikan *final demand* sektor tersebut sebesar Rp 1,- akan mengakibatkan kenaikan perekonomian secara total sebesar Rp 0.16749. Disusul kemudian Industri Pengolahan (Kecil, Menengah) (0.09499) dan sektor Pengangkutan dan Komunikasi (Besar) (0.09424). Berdasarkan tabel tersebut juga terlihat bahwa 2 peringkat teratas ditempati sektor-sektor skala kecil dan menengah yaitu Pertanian dan Sarana Pertanian serta Industri Pengolahan. Hal ini sangatlah logis mengingat karakteristik sebagian besar industri pertanian dan pengolahan di Indonesia masih mengandalkan pemanfaatan tenaga kerja dalam jumlah besar. Untuk kelompok skala usaha besar, sektor-sektor yang memiliki indeks pengganda tenaga

kerja yang menduduki ranking atas adalah Pengangkutan dan Komunikasi (Besar) serta Jasa Sosial Kemasyarakatan (Besar)

Tabel 4.4. Employment Multiplier I-O UKM Awal

Urutan		Sektor	Employment Multiplier
1	1	Pertanian dan Sarana Pertanian (Kecil, Menengah)	0.16749
2	5	Industri Pengolahan (Kecil, Menengah)	0.09499
3	12	Pengangkutan dan Komunikasi (Besar)	0.09424
4	16	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Besar)	0.08209
5	10	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Kecil, Menengah)	0.07416
6	8	Konstruksi (Kecil, Menengah)	0.06018
7	14	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Kecil, Menengah)	0.05963
8	3	Pertambangan (Kecil, Menengah)	0.05700
9	13	Pengangkutan dan Komunikasi (Kecil, Menengah)	0.03733
10	17	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Kecil, Menengah)	0.03377
11	6	Industri Pengolahan (Besar)	0.03330
12	9	Konstruksi (Kecil, Besar)	0.03142
13	2	Pertanian dan Sarana Pertanian (Besar)	0.02883
14	11	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Besar)	0.02178
15	7	Listrik, Gas, dan Air	0.01810
16	15	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Besar)	0.01692
17	4	Pertambangan (Besar)	0.00312

Sumber : Data I-O UKM 2003 (Diolah)

4.4. Analisis Keterkaitan (*Linkage Analysis*) dengan tambahan kredit UKM

4.4.1. Keterkaitan ke Belakang (*Backward Linkage/BL*)

Hubungan antara output dan permintaan akhir, sebagaimana sebagaimana telah dijelaskan pada bagian metodologi, dapat dituliskan sebagai:

$$X = (I-A)^{-1} F \quad \text{atau:} \quad [X_i] = [b_{ij}] [F_j]$$

Pada persamaan di atas, dapat dilihat bahwa perubahan 1 unit F_i akan menimbulkan dampak perubahan terhadap X_i sebesar b_{1i} , terhadap X_j sebesar b_{2i} , dan seterusnya. Jumlah seluruh b_{ij} pada kolom j (b_j) adalah dampak perubahan permintaan akhir sektor j terhadap total output. Jumlah tersebut dibagi dengan jumlah sektor adalah rata-rata dampak yang ditimbulkannya terhadap output masing-masing sektor yang disebut juga sebagai daya penyebaran sektor tersebut. Dan bila nilai terakhir ini dibagi dengan rata-rata daya penyebaran seluruh sektor, maka akan didapatkan indeks *backward linkage* (BL) sektor j tersebut. Angka BL ini merupakan ukuran untuk melihat keterkaitan ke belakang dari sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah atau negara.

Berdasarkan tabel 4.5. terlihat bahwa terdapat 8 (delapan) sektor yang memiliki angka BL lebih dari satu (daya penyebaran masing-masing sektor tersebut di atas rata-rata daya penyebaran secara keseluruhan) dan 9 (sembilan) sektor yang memiliki angka BL kurang dari satu (daya penyebaran masing-masing sektor tersebut di bawah rata-rata daya penyebaran secara keseluruhan). Sektor yang memiliki angka BL terbesar adalah sektor Konstruksi (Besar) (1.24536734), sedangkan sektor yang memiliki angka BL terkecil adalah sektor Pertambangan (Besar) (0.65298791).

Dengan data ini dapat dikatakan bahwa sektor Konstruksi Besar paling besar menggunakan output dari sektor lain sebagai inputnya, sedangkan Sektor Pertambangan (Besar) outputnya paling banyak digunakan oleh sektor lain. Dengan demikian jika sektor konstruksi

mengalami peningkatan output maka keterkaitan peningkatan output di sektor lain juga akan sangat terasa efeknya.

Tabel 4.5. Backward Linkage Awal

Urutan	Sektor		Backward Linkage
1	9	Konstruksi (Besar)	1.24536734
2	8	Konstruksi (Kecil, Menengah)	1.24390627
3	5	Industri Pengolahan (Kecil, Menengah)	1.20305238
4	12	Pengangkutan dan Komunikasi (Besar)	1.19321436
5	6	Industri Pengolahan (Besar)	1.1582769
6	13	Pengangkutan dan Komunikasi (Kecil, Menengah)	1.13354366
7	7	Listrik, Gas, dan Air	1.13258674
8	17	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Kecil, Menengah)	1.02044515
9	16	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Besar)	0.96657708
10	10	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Kecil, Menengah)	0.96074207
11	11	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Besar)	0.94166441
12	14	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Kecil, Menengah)	0.9242976
13	15	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Besar)	0.86528225
14	2	Pertanian dan Sarana Pertanian (Besar)	0.80282804
15	3	Pertambangan (Kecil, Menengah)	0.78234603
16	1	Pertanian dan Sarana Pertanian (Kecil, Menengah)	0.77288181
17	4	Pertambangan (Besar)	0.65298791

Sumber : Data I-O UKM 2003 (Diolah)

4.4.2. Indeks Keterkaitan ke Depan (*Forward Linkage/FL*)

Dampak yang terjadi terhadap output sektor 1 (X_1) sebagai akibat perubahan satu unit F_1 adalah b_{11} ; sebagai akibat perubahan satu unit F_2 sebesar b_{12} , dan seterusnya. Demikian juga untuk X_2 . Jadi, jumlah seluruh b_{ij} pada baris i ($b_{i.}$) adalah dampak dari perubahan permintaan akhir seluruh sektor terhadap sektor i dan nilai rata-ratanya adalah derajat kepekaan sektor tersebut. Seperti pada pembahasan *backward linkage*, rasio antara derajat kepekaan sektor i itu dengan rata-rata derajat kepekaan seluruh sektor adalah indeks *forward linkage* (FL) sektor i yang merupakan ukuran untuk melihat keterkaitan ke depan dari sektor tersebut.

Tabel 4.6 memperlihatkan bahwa terdapat 7 (Tujuh) sektor yang memiliki angka FL lebih dari satu (derajat kepekaan masing-masing sektor tersebut di atas rata-rata derajat kepekaan secara keseluruhan) dan 10 (Sepuluh) sektor yang memiliki angka FL kurang dari satu (derajat kepekaan masing-masing sektor tersebut di bawah rata-rata derajat kepekaan secara keseluruhan). Sektor yang angka FL-nya paling besar adalah sektor Industri Pengolahan (Besar) (3.03659), sedangkan sektor yang angka FL-nya terkecil adalah sektor Jasa Sosial Kemasyarakatan (Kecil, Menengah) (0.58118).

Dengan angka FL tersebut, dapat diketahui seberapa besar sektor tersebut dibutuhkan outputnya oleh sektor lain. Sektor Industri Pengolahan besar yang memiliki angka FL paling besar menandai bahwa sektor tersebut sangat dibutuhkan outputnya bagi sektor lain, dan jika pada sektor tersebut ditambahkan output 1 saja, maka peningkatan output tersebut dapat meningkatkan output sektor lain sebanyak 3. Begitu pula dengan sektor yang memiliki FL sangat kecil, maka dalam perekonomian sektor tersebut sangat banyak menggunakan output dari sektor lain, tetapi sangat jarang outputnya diminta atau digunakan oleh sektor lain.

Tabel 4.6. Forward Linkage Awal

Urutan		Sektor	Forward Linkage
1	6	Industri Pengolahan (Besar)	3.03659
2	4	Pertambangan (Besar)	1.39125
3	10	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Kecil, Menengah)	1.37587
4	14	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Kecil, Menengah)	1.22269
5	1	Pertanian dan Sarana Pertanian (Kecil, Menengah)	1.16038
6	15	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Besar)	1.08325
7	5	Industri Pengolahan (Kecil, Menengah)	1.00628
8	12	Pengangkutan dan Komunikasi (Besar)	0.88294
9	13	Pengangkutan dan Komunikasi (Kecil, Menengah)	0.80519
10	7	Listrik, Gas, dan Air	0.70376
11	8	Konstruksi (Kecil, Menengah)	0.66909
12	2	Pertanian dan Sarana Pertanian (Besar)	0.65012
13	3	Pertambangan (Kecil, Menengah)	0.62362
14	9	Konstruksi (Kecil, Besar)	0.61142
15	11	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Besar)	0.61037
16	16	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Besar)	0.58601
17	17	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Kecil, Menengah)	0.58118

Sumber : Data I-O UKM 2003 (Diolah)

Berdasarkan angka BL dan FL tiap sektor di atas, maka dapat dibuat pengelompokan sebagai berikut:

1. Kelompok I (*key sectors*) adalah sektor-sektor yang memiliki angka BL dan FL lebih dari satu (di atas rata-rata), yakni:
 1. Industri Pengolahan (Besar)
 2. Industri Pengolahan (Kecil, Menengah)

2. Kelompok II (*backward linkage oriented sectors*) adalah sektor-sektor yang angka BL-nya lebih dari satu (di atas rata-rata), tetapi angka FL-nya kurang dari satu (di bawah rata-rata), yaitu:
 1. Konstruksi (Besar)
 2. Konstruksi (Kecil, menengah)
 3. Pengangkutan dan Komunikasi (Besar)
 4. Pengangkutan dan Komunikasi (Kecil, Menengah)
 5. Listrik, gas dan Air
 6. Jasa Sosial Kemasyarakatan (Kecil, Menengah)

3. Kelompok III (*less imported sectors*) adalah sektor-sektor yang memiliki angka BL dan FL kurang dari satu (di bawah rata-rata), yaitu:
 1. Pertanian dan Sarana Pertanian (Besar)
 2. Pertambangan (Kecil, Menengah)
 3. Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Besar)
 4. Jasa Sosial Kemasyarakatan (Besar)

4. Kelompok IV (*forward linkage oriented sectors*) adalah sektor-sektor yang angka BL-nya kurang dari satu (di bawah rata-rata), tetapi angka FL-nya lebih dari satu (di atas rata-rata), yaitu:
 1. Pertambangan (Besar)
 2. Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Kecil, Menengah)
 3. Pertanian dan Sarana Pertanian (Kecil, Menengah)
 4. Jasa-jasa Dunia Usaha dan Lain-lain (Kecil, menengah)
 5. Jasa-jasa Dunia Usaha dan Lain-lain (Besar)

4.5. Analisis Pengganda setelah simulasi

4.5.1. Pengganda Output (*Income multiplier*)

Indeks Pengganda Output setelah dilakukan simulasi disajikan pada Tabel 4.7. Pada Tabel 4.7 ini terlihat bahwa sektor Pertambangan Besar merupakan sektor yang memiliki angka multiplier output terbesar setelah dilakukan simulasi, yakni 2,89242936. Angka ini mengandung arti bila permintaan akhir sektor Pertambangan Besar bertambah satu rupiah, maka output total akan bertambah sebesar Rp 2,89242936.

Tabel 4.7. *Income multiplier* Hasil Simulasi

Urutan	Sektor	Ouput Multiplier
1	4 Pertambangan (Besar)	2,89242936
2	3 Pertambangan (Kecil, Menengah)	2,5075994
3	1 Pertanian dan Sarana Pertanian (Kecil, Menengah)	2,50587517
4	2 Pertanian dan Sarana Pertanian (Besar)	2,49453876
5	15 Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Besar)	2,43189071
6	11 Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Besar)	2,26137824
7	14 Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Kecil, Menengah)	2,25448256
8	10 Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Kecil, Menengah)	2,19389613
9	16 Jasa Sosial Kemasyarakatan (Besar)	2,18815636
10	17 Jasa Sosial Kemasyarakatan (Kecil, Menengah)	2,06784124
11	13 Pengangkutan dan Komunikasi (Kecil, Menengah)	1,85845924
12	12 Pengangkutan dan Komunikasi (Besar)	1,77550817
13	6 Industri Pengolahan (Besar)	1,72259785
14	5 Industri Pengolahan (Kecil, Menengah)	1,6383056
15	9 Konstruksi (Kecil, Besar)	1,63544096
16	8 Konstruksi (Kecil, Menengah)	1,63074199
17	7 Listrik, Gas, dan Air	1,60529297

Sumber : Data I-O UKM 2003 (Diolah)

Di peringkat kedua adalah sektor Pertambangan (kecil menengah). Tabel tersebut menunjukkan bahwa setelah dilakukan simulasi, terjadi perubahan hirarki sektoral berdasarkan nilai pengganda outputnya. Sektor-sektor yang memiliki multiplier tinggi dan menduduki peringkat atas sebelum dilakukan simulasi tidak lagi berada dalam urutan yang sama setelah dilakukannya simulasi.

Tabel 4.8. Tabel perbandingan *Income multiplier* sebelum dan sesudah simulasi

	Sektor	Ouput Multiplier Awal	Ouput Multiplier Simulasi
1	Pertanian dan Sarana Pertanian (Kecil, Menengah)	1,4269763	2,50587517
2	Pertanian dan Sarana Pertanian (Besar)	1,48226621	2,49453876
3	Pertambangan (Kecil, Menengah)	1,44445016	2,5075994
4	Pertambangan (Besar)	1,20561548	2,89242936
5	Industri Pengolahan (Kecil, Menengah)	2,2212028	1,6383056
6	Industri Pengolahan (Besar)	2,13853357	1,72259785
7	Listrik, Gas, dan Air	2,09110168	1,60529297
8	Konstruksi (Kecil, Menengah)	2,29663158	1,63074199
9	Konstruksi (Kecil, Besar)	2,29932916	1,63544096
10	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Kecil, Menengah)	1,77382383	2,19389613
11	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Besar)	1,73860064	2,26137824
12	Pengangkutan dan Komunikasi (Besar)	2,2030388	1,77550817
13	Pengangkutan dan Komunikasi (Kecil, Menengah)	2,09286843	1,85845924
14	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Kecil, Menengah)	1,70653619	2,25448256
15	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Besar)	1,59757578	2,43189071
16	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Besar)	1,78459704	2,18815636
17	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Kecil, Menengah)	1,88405398	2,06784124

Sumber : Data I-O UKM 2003 (Diolah)

**Tabel 4.9. Peringkat sektoral berdasarkan nilai perubahan
Ouput Multiplier**

Urutan		Sektor	Perubahan	%
1	4	Pertambangan (Besar)	1,6868139	139,91%
2	1	Pertanian dan Sarana Pertanian (Kecil, Menengah)	1,0788989	75,61%
3	3	Pertambangan (Kecil, Menengah)	1,0631492	73,60%
4	2	Pertanian dan Sarana Pertanian (Besar)	1,0122726	68,29%
5	15	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Besar)	0,8343149	52,22%
6	14	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Kecil, Menengah)	0,5479464	32,11%
7	11	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Besar)	0,5227776	30,07%
8	10	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Kecil, Menengah)	0,4200723	23,68%
9	16	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Besar)	0,4035593	22,61%
10	17	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Kecil, Menengah)	0,1837873	9,75%
11	13	Pengangkutan dan Komunikasi (Kecil, Menengah)	-0,2344092	-11,20%
12	12	Pengangkutan dan Komunikasi (Besar)	-0,4275306	-19,41%
13	6	Industri Pengolahan (Besar)	-0,4159357	-19,45%
14	7	Listrik, Gas, dan Air	-0,4858087	-23,23%
15	5	Industri Pengolahan (Kecil, Menengah)	-0,5828972	-26,24%
16	9	Konstruksi (Kecil, Besar)	-0,6638882	-28,87%
17	8	Konstruksi (Kecil, Menengah)	-0,6658896	-28,99%

Sumber : Data I-O UKM 2003 (Diolah)

Hal lain yang menarik adalah terjadinya penurunan indeks pengganda output pada tujuh sektor baik dari skala usaha kecil,

menengah maupun besar. Penurunan ini terjadi justru di sektor-sektor yang pada awalnya merupakan sektor dengan multiplier yang tinggi. Perubahan peringkat ini dapat diartikan terjadinya perpindahan atau migrasi tenaga kerja dari sektor-sektor yang mengalami penurunan ke sektor-sektor yang mengalami peningkatan. Jika dikaitkan dengan prioritas kredit yang diberikan, maka sektor-sektor yang mengalami perubahan besar merupakan sektor-sektor yang mendapatkan prioritas kredit lebih dibanding sektor-sektor yang mengalami penurunan.

Yang menarik lagi, perubahan besar ternyata juga dinikmati oleh sektor-sektor besar yang tidak mendapatkan simulasi kredit dalam perekonomian, hal ini dapat diartikan bahwa pemberian kredit ke sektor UKM juga memberikan efek positif tidak hanya pada sektor UKM tetapi juga pada sektor besar. Hal ini bisa terjadi karena biasanya economic of scale dari sektor besar lebih baik dari sektor kecil dan menengah, sehingga pada saat terjadi kenaikan output dari sektor kecil, yang berarti peningkatan input yang digunakan oleh sektor besar, maka tambahan input ini dan efisiensi sektor besar menyebabkan *income multiplier* sektor besar menjadi lebih besar lagi.

4.5.2. Pengganda Pendapatan Rumah Tangga (*Income multiplier*)

Dengan indeks *income multiplier* sebesar 1,8800659, sektor Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Besar) sebagai sektor yang paling tinggi *income multiplier*-nya akan dapat mengakibatkan kenaikan perekonomian secara total sebesar Rp 1,8800659 untuk setiap kenaikan *direct income* sektor tersebut sebesar Rp 1. Sebagai sektor skala besar, sektor ini tergolong padat modal. Pada simulasi, sektor ini tidak mengalami perubahan pada permintaan akhir di sektornya, karena kebijakan pembiayaan usaha mikro hanya ditujukan pada sektor kecil dan menengah. Di urutan berikutnya adalah sektor jasa Sosial Kemasyarakatan (Kecil, Menengah) (1,36189779) dan sektor jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Besar) (1,13108823). Sedangkan

income multiplier yang terkecil adalah pada sektor Konstruksi besar, yakni sebesar 0,26151584.

Tabel 4.10. *Income multiplier* Hasil Simulasi

Urutan	Sektor		<i>Income multiplier</i>
1	11	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Besar)	1,8800659
2	17	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Kecil, Menengah)	1,36189779
3	15	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Besar)	1,13108823
4	1	Pertanian dan Sarana Pertanian (Kecil, Menengah)	1,0186004
5	12	Pengangkutan dan Komunikasi (Besar)	0,99393816
6	14	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Kecil, Menengah)	0,9853474
7	2	Pertanian dan Sarana Pertanian (Besar)	0,97027508
8	10	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Kecil, Menengah)	0,88890618
9	16	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Besar)	0,78547185
10	5	Industri Pengolahan (Kecil, Menengah)	0,72541499
11	4	Pertambangan (Besar)	0,66850748
12	13	Pengangkutan dan Komunikasi (Kecil, Menengah)	0,66187585
13	3	Pertambangan (Kecil, Menengah)	0,62747603
14	6	Industri Pengolahan (Besar)	0,60568848
15	7	Listrik, Gas, dan Air	0,4885271
16	8	Konstruksi (Kecil, Menengah)	0,26169005
17	9	Konstruksi (Besar)	0,26151584

Sumber : Data I-O UKM 2003 (Diolah)

Setelah dilakukan simulasi, terlihat bahwa ada dua sektor yang tetap berada di ranking pertama dan kedua dalam *income multiplier*, hal ini menjelaskan bahwa sektor tersebut memang memberikan *income multiplier* yang besar. Sektor tersebut adalah Sektor Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Besar) serta Sektor jasa Sosial Kemasyarakatan (kecil, menengah). Kredit yang dialokasikan pada sektor ini sudah tepat jika yang diinginkan adalah peningkatan income dalam perekonomian.

Tabel 4.11. Tabel perbandingan Nilai Pengganda Pendapatan

	Sektor	IM Awal	IM Simulasi
1	Pertanian dan Sarana Pertanian (Kecil, Menengah)	0,54976677	1,0186004
2	Pertanian dan Sarana Pertanian (Besar)	0,50979623	0,97027508
3	Pertambangan (Kecil, Menengah)	0,13370677	0,62747603
4	Pertambangan (Besar)	0,03230702	0,66850748
5	Industri Pengolahan (Kecil, Menengah)	0,88937936	0,72541499
6	Industri Pengolahan (Besar)	0,66052721	0,60568848
7	Listrik, Gas, dan Air	0,4574829	0,4885271
8	Konstruksi (Kecil, Menengah)	0,42196409	0,26169005
9	Konstruksi (Kecil, Besar)	0,42180724	0,26151584
10	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Kecil, Menengah)	0,61939259	0,88890618
11	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Besar)	1,53342439	1,8800659
12	Pengangkutan dan Komunikasi (Besar)	1,0781239	0,99393816
13	Pengangkutan dan Komunikasi (Kecil, Menengah)	0,68480603	0,66187585
14	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Kecil, Menengah)	0,68074814	0,9853474
15	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Besar)	0,68380062	1,13108823
16	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Besar)	0,49471283	0,78547185
17	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Kecil, Menengah)	1,17506447	1,36189779

Sumber : Data I-O UKM 2003 (Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.12, terlihat bahwa perubahan indeks pengganda terbesar terjadi pada sektor Pertambangan (bEsar). Nilai perubahannya adalah 0,6362005. Disusul kemudian oleh sektor Pertambangan (Kecil, Menengah) dengan nilai perubahan sebesar 0,4937693, serta sektor Pertanian dan Sarana Pertanian (Besar) perubahannya adalah 0,4688336. Terlihat bahwa perubahan besar karena adanya tambahan kredit UKM ke dalam perekonomian dirasakan oleh sektor-sektor besar, hal ini karena factor efisiensi di sektor besar sudah tinggi, sehingga unit cost produknya bisa rendah, dan ini menyebabkan return yang tinggi bagi sektor mereka.

**Tabel 4.12. Peringkat sektoral berdasarkan nilai perubahan
Income Multiplier**

Urut		Sektor	Perubahan	%
1	4	Pertambangan (Besar)	0,6362005	1969,23%
2	3	Pertambangan (Kecil, Menengah)	0,4937693	369,29%
3	2	Pertanian dan Sarana Pertanian (Besar)	0,4604789	90,33%
4	1	Pertanian dan Sarana Pertanian (Kecil, Menengah)	0,4688336	85,28%
5	15	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Besar)	0,4472876	65,41%
6	16	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Besar)	0,290759	58,77%
7	14	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Kecil, Menengah)	0,3045993	44,74%
8	10	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Kecil, Menengah)	0,2695136	43,51%
9	11	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Besar)	0,3466415	22,61%
10	17	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Kecil, Menengah)	0,1868333	15,90%
11	7	Listrik, Gas, dan Air	0,0310442	6,79%
12	13	Pengangkutan dan Komunikasi (Kecil, Menengah)	-0,0229302	-3,35%
13	12	Pengangkutan dan Komunikasi (Besar)	-0,0841857	-7,81%
14	6	Industri Pengolahan (Besar)	-0,0548387	-8,30%
15	5	Industri Pengolahan (Kecil, Menengah)	-0,1639644	-18,44%
16	8	Konstruksi (Kecil, Menengah)	-0,160274	-37,98%
17	9	Konstruksi (Kecil, Besar)	-0,1602914	-38,00%

Sumber : Data I-O UKM 2003 (Diolah)

4.5.3. Pengganda Tenaga Kerja (*Employment Multiplier*)

Dari hasil simulasi, ternyata sektor Pertanian dan sarana Pertanian (Kecil, menengah) tetap menjadi ranking pertama dalam memberikan *employment multiplier*. Yakni sebesar 0,20396343 yang artinya setiap kenaikan Rp 1 dalam sektor tersebut akan membutuhkan 0,20396343 tambahan tenaga kerja.

Tabel 4.13. Tabel 4.11. Employment Multiplier Hasil Simulasi

Urutan		Sektor	Employment Multiplier
1	1	Pertanian dan Sarana Pertanian (Kecil, Menengah)	0,20396343
2	16	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Besar)	0,09227543
3	10	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Kecil, Menengah)	0,0840982
4	12	Pengangkutan dan Komunikasi (Besar)	0,08391899
5	3	Pertambangan (Kecil, Menengah)	0,08319151
6	14	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Kecil, Menengah)	0,07149272
7	2	Pertanian dan Sarana Pertanian (Besar)	0,064417
8	5	Industri Pengolahan (Kecil, Menengah)	0,05905376
9	8	Konstruksi (Kecil, Menengah)	0,04212572
10	4	Pertambangan (Besar)	0,04011335
11	15	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Besar)	0,03686803
12	17	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Kecil, Menengah)	0,03447475
13	11	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Besar)	0,03366901
14	13	Pengangkutan dan Komunikasi (Kecil, Menengah)	0,03091886
15	6	Industri Pengolahan (Besar)	0,02237017
16	7	Listrik, Gas, dan Air	0,01797928
17	9	Konstruksi (Kecil, Besar)	0,0145795

Sumber : Data I-O UKM 2003 (Diolah)

**Tabel 4.14. Tabel perbandingan Nilai Pengganda Tenaga Kerja
Sebelum dan Sesudah Simulasi**

	Sektor	Employment Multiplier Awal	Employment Multiplier Simulasi
1	Pertanian dan Sarana Pertanian (Kecil, Menengah)	0,16749	0,20396343
2	Pertanian dan Sarana Pertanian (Besar)	0,02883	0,064417
3	Pertambangan (Kecil, Menengah)	0,05700	0,08319151
4	Pertambangan (Besar)	0,00312	0,04011335
5	Industri Pengolahan (Kecil, Menengah)	0,09499	0,05905376
6	Industri Pengolahan (Besar)	0,03330	0,02237017
7	Listrik, Gas, dan Air	0,01810	0,01797928
8	Konstruksi (Kecil, Menengah)	0,06018	0,04212572
9	Konstruksi (Kecil, Besar)	0,03142	0,0145795
10	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Kecil, Menengah)	0,07416	0,0840982
11	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Besar)	0,02178	0,03366901
12	Pengangkutan dan Komunikasi (Besar)	0,09424	0,08391899
13	Pengangkutan dan Komunikasi (Kecil, Menengah)	0,03733	0,03091886
14	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Kecil, Menengah)	0,05963	0,07149272
15	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Besar)	0,01692	0,03686803
16	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Besar)	0,08209	0,09227543
17	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Kecil, Menengah)	0,03377	0,03447475

Sumber : Data I-O UKM 2003 (Diolah)

Dengan membandingkan antara hasil sebelum dan sesudah dilakukannya simulasi. diketahui bahwa hirarki sektor berdasarkan

indeks pengganda tenaga kerja tidak terlalu mengalami perubahan. Urutan teratas masih diduduki sektor-sektor yang sama yang merupakan sektor Pertanian dan Sarana Pertanian (Kecil, menengah). Dampak pemebrian kredit UKM terlihat dengan bergesarnya sektor-sektor Kecil dan menengah menempati peringkat yang lebih tinggi dibanding sebelumnya. Hal ni menunjukkan bahwa sektor-sektor kecil dan menengah semakin dapat menyerap tenaga kerja dengan adanya tambahan modal dalam usahanya.

**Tabel 4.15. Peringkat sektoral berdasarkan nilai perubahan
Employment Multiplier**

Urut		Sektor	Perubahan	%
1	4	Pertambangan (Besar)	0,0369963	1186,92%
2	2	Pertanian dan Sarana Pertanian (Besar)	0,0355855	123,43%
3	15	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Besar)	0,0199474	117,89%
4	11	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Besar)	0,0118877	54,58%
5	3	Pertambangan (Kecil, Menengah)	0,0261905	45,95%
6	1	Pertanian dan Sarana Pertanian (Kecil, Menengah)	0,0364779	21,78%
7	14	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Kecil, Menengah)	0,011858	19,88%
8	10	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Kecil, Menengah)	0,0099404	13,40%
9	16	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Besar)	0,0101858	12,41%
10	17	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Kecil, Menengah)	0,0007015	2,08%
11	7	Listrik, Gas, dan Air	-0,0001232	-0,68%
12	12	Pengangkutan dan Komunikasi (Besar)	-0,0103237	-10,95%
13	13	Pengangkutan dan Komunikasi (Kecil, Menengah)	-0,0064071	-17,17%
14	8	Konstruksi (Kecil, Menengah)	-0,0180592	-30,01%
15	6	Industri Pengolahan (Besar)	-0,0109329	-32,83%
16	5	Industri Pengolahan (Kecil, Menengah)	-0,0359342	-37,83%
17	9	Konstruksi (Kecil, Besar)	-0,0168439	-53,60%

Sumber : Data I-O UKM 2003 (Diolah)

Bila dilihat dari nilai perubahan, maka empat sektor teratas masih didominasi oleh sektor besar yakni Pertambangan, Pertanian dan sarana Pertanian, jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain serta Perdagangan, Restoran, dan Hotel dalam skala besar. Hal ini dapat dijelaskan bahwa selain efisiensi pada usaha skala besar, sektor-sektor besar ini juga sangat padat karya, sehingga tambahan tenaga kerja yang dibutuhkan juga sangat banyak.

4.6. Analisis Keterkaitan (*Linkage Analysis*) Setelah Simulasi

Analisis keterkaitan terhadap kondisi perekonomian setelah dilakukannya simulasi memberikan jawaban atas pertanyaan tentang berubah tidaknya struktur perekonomian setelah digulirkannya kredit UKM sepanjang tahun 2001 hingga 2007. Dengan membandingkan indeks keterkaitan sesudah dan sebelum dilakukan simulasi, akan terlihat perubahan hirarki sektor-sektor produksi di perekonomian.

4.6.1. Keterkaitan ke Belakang (*BackwardLinkage/BL*)

Tabel 4.16. mempresentasikan peringkat sektoral berdasarkan indeks keterkaitan ke belakang sektor-sektor perekonomian setelah dilakukannya simulasi.

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa sektor Pertambangan skala besar berada pada urutan teratas dilihat dari keterkaitan sektor tersebut dengan sektor lain yang menyediakan input bagi proses produksinya. Dengan membandingkan pada kondisi sebelum dilakukan simulasi, akan dapat diamati sejauh mana kebijakan pemberian kredit pada UKM tahun 2001 hingga 2007 membawa dampak perubahan struktur penyediaan input di sektor-sektor produksi. Tabel 4.17. akan memperlihatkan urutan sektoral sebelum dan sesudah dilakukannya simulasi.

**Tabel 4.16. Peringkat sektoral berdasarkan backward Linkage
Setelah Simulasi**

Urutan		Sektor	Backward Linkage Simulasi
1	4	Pertambangan (Besar)	1,37872084
2	3	Pertambangan (Kecil, Menengah)	1,19528586
3	1	Pertanian dan Sarana Pertanian (Kecil, Menengah)	1,19446386
4	2	Pertanian dan Sarana Pertanian (Besar)	1,18906003
5	15	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Besar)	1,15919806
6	11	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Besar)	1,07792063
7	14	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Kecil, Menengah)	1,07463371
8	10	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Kecil, Menengah)	1,04575427
9	16	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Besar)	1,0430183
10	17	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Kecil, Menengah)	0,98566818
11	13	Pengangkutan dan Komunikasi (Kecil, Menengah)	0,88586314
12	12	Pengangkutan dan Komunikasi (Besar)	0,8463232
13	6	Industri Pengolahan (Besar)	0,82110271
14	5	Industri Pengolahan (Kecil, Menengah)	0,78092351
15	9	Konstruksi (Kecil, Besar)	0,77955803
16	8	Konstruksi (Kecil, Menengah)	0,77731819
17	7	Listrik, Gas, dan Air	0,76518749

Sumber : Data I-O UKM 2003 (Diolah)

**Tabel 4.17. Peringkat sektoral berdasarkan backward Linkage
Sebelum dan sesudah Simulasi**

No Urut		Sektor	Backward Linkage Awal		Sektor	Backward Linkage RAS
1	9	Konstruksi (Kecil, Besar)	1,24536734	4	Pertambangan (Besar)	1,37872084
2	8	Konstruksi (Kecil, Menengah)	1,24390627	3	Pertambangan (Kecil, Menengah)	1,19528586
3	5	Industri Pengolahan (Kecil, Menengah)	1,20305238	1	Pertanian dan Sarana Pertanian (Kecil, Menengah)	1,19446386
4	12	Pengangkutan dan Komunikasi (Besar)	1,19321436	2	Pertanian dan Sarana Pertanian (Besar)	1,18906003
5	6	Industri Pengolahan (Besar)	1,1582769	15	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Besar)	1,15919806
6	13	Pengangkutan dan Komunikasi (Kecil, Menengah)	1,13354366	11	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Besar)	1,07792063
7	7	Listrik, Gas, dan Air	1,13258674	14	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Kecil, Menengah)	1,07463371
8	17	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Kecil, Menengah)	1,02044515	10	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Kecil, Menengah)	1,04575427
9	16	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Besar)	0,96657708	16	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Besar)	1,0430183
10	10	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Kecil, Menengah)	0,96074207	17	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Kecil, Menengah)	0,98566818
11	11	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Besar)	0,94166441	13	Pengangkutan dan Komunikasi (Kecil, Menengah)	0,88586314
12	14	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Kecil, Menengah)	0,9242976	12	Pengangkutan dan Komunikasi (Besar)	0,8463232
13	15	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Besar)	0,86528225	6	Industri Pengolahan (Besar)	0,82110271
14	2	Pertanian dan Sarana Pertanian (Besar)	0,80282804	5	Industri Pengolahan (Kecil, Menengah)	0,78092351
15	3	Pertambangan (Kecil, Menengah)	0,78234603	9	Konstruksi (Kecil, Besar)	0,77955803
16	1	Pertanian dan Sarana Pertanian (Kecil, Menengah)	0,77288181	8	Konstruksi (Kecil, Menengah)	0,77731819
17	4	Pertambangan (Besar)	0,65298791	7	Listrik, Gas, dan Air	0,76518749

Sumber : Data I-O UKM 2003 (Diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 4.17, terlihat bahwa terjadi perubahan peringkat pada sektor perekonomian. Pemeringkatan sektor adalah salah satu upaya untuk dapat memberikan gambaran bila akan ditetapkan suatu kebijakan yang di dalamnya terdapat urutan prioritas sektor-sektor yang dikenai kebijakan. Sedangkan dampak digulirkannya kredit UKM akan terlihat berdasarkan nilai perubahan indeks keterkaitan ke belakang sektoral.

Tabel 4.18. Peringkat sektoral berdasarkan Nilai Perubahan backward Linkage

Urutan		Sektor	Perubahan	%
1	4	Pertambangan (Besar)	0,7257329	111,14%
2	1	Pertanian dan Sarana Pertanian (Kecil, Menengah)	0,4215821	54,55%
3	3	Pertambangan (Kecil, Menengah)	0,4129398	52,78%
4	2	Pertanian dan Sarana Pertanian (Besar)	0,386232	48,11%
5	15	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Besar)	0,2939158	33,97%
6	14	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Kecil, Menengah)	0,1503361	16,26%
7	11	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Besar)	0,1362562	14,47%
8	10	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Kecil, Menengah)	0,0850122	8,85%
9	16	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Besar)	0,0764412	7,91%
10	17	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Kecil, Menengah)	-0,034777	-3,41%
11	13	Pengangkutan dan Komunikasi (Kecil, Menengah)	-0,2476805	-21,85%
12	12	Pengangkutan dan Komunikasi (Besar)	-0,3468912	-29,07%
13	6	Industri Pengolahan (Besar)	-0,3371742	-29,11%
14	7	Listrik, Gas, dan Air	-0,3673993	-32,44%
15	5	Industri Pengolahan (Kecil, Menengah)	-0,4221289	-35,09%
16	9	Konstruksi (Kecil, Besar)	-0,4658093	-37,40%
17	8	Konstruksi (Kecil, Menengah)	-0,4665881	-37,51%

Sumber : Data I-O UKM 2003 (Diolah)

Berdasarkan Tabel di atas, perubahan terbesar dalam indeks keterkaitan ke belakang terbesar terjadi pada sektor Pertambangan besar, hal ini menunjukkan bahwa kucuran kredit UKM yang ditujukan bagi sektor-sektor usaha skala kecil dan menengah mampu pula menimbulkan aktivitas dan dampak positif yang cukup besar bagi kinerja sektor usaha skala besar. Hal ini terlihat dari peningkatan output di sektor skala besar yang digunakan sebagai input produksi di sektor skala kecil dan menengah.

4.6.2. Keterkaitan ke Depan (*Forward Linkage/FL*)

Pengamatan yang sama akan dilakukan untuk mengamati perubahan pada indeks keterkaitan ke depan sektor-sektor dalam perekonomian setelah dilakukannya simulasi sebagai representasi dikucurkannya kredit ke usaha kecil dan menengah.

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa sektor Industri Pengolahan Besar, sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel skala Keci dan menengah, serta sektor Industri pengolahan Kecil, menengah adalah tiga sektor utama (berada dalam urutan teratas) yang memiliki keterkaitan depan tertinggi berdasarkan indeks keterkaitan ke depan yang dimilikinya. Hal ini berarti bahwa **sektor-sektor tersebut memiliki peran penting sebagai penyedia input** bagi sektor-sektor lain yang akan memanfaatkannya dalam proses produksi. **Bila kebijakan yang akan diterapkan pemerintah berorientasi pada pemerataan aktivitas ekonomi sektor-sektor dalam perekonomian, maka di masa yang akan datang pemerintah harus memformulasikan kebijakan yang memberi prioritas pada sektor-sektor yang memiliki indeks keterkaitan ke depan yang tinggi seperti sektor-sektor tersebut.**

Tabel 4.19. Peringkat sektoral berdasarkan Forward Linkage setelah Simulasi

Urutan	Sektor		Forward Linkage Simulasi
1	6	Industri Pengolahan (Besar)	3,06810374
2	10	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Kecil, Menengah)	1,58192168
3	5	Industri Pengolahan (Kecil, Menengah)	1,4920269
4	15	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Besar)	1,42537177
5	12	Pengangkutan dan Komunikasi (Besar)	1,1670071
6	14	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Kecil, Menengah)	1,02808589
7	1	Pertanian dan Sarana Pertanian (Kecil, Menengah)	0,9299973
8	11	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Besar)	0,88940474
9	13	Pengangkutan dan Komunikasi (Kecil, Menengah)	0,80109241
10	17	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Kecil, Menengah)	0,77529958
11	4	Pertambangan (Besar)	0,76872544
12	16	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Besar)	0,59573216
13	8	Konstruksi (Kecil, Menengah)	0,53253531
14	2	Pertanian dan Sarana Pertanian (Besar)	0,49643831
15	9	Konstruksi (Kecil, Besar)	0,48687995
16	7	Listrik, Gas, dan Air	0,4835045
17	3	Pertambangan (Kecil, Menengah)	0,47787322

Sumber : Data I-O UKM 2003 (Diolah)

Selanjutnya, Tabel 4.20. akan memperlihatkan perbandingan peringkat sektoral berdasarkan nilai indeks keterkaitan ke depan antara sebelum dan sesudah dilakukannya simulasi. Berdasarkan data pada Tabel tersebut, terlihat bahwa perubahan peringkat hanya terjadi pada sektor Jasa-jasa usaha kecil dan lainnya skala kecil, yang bertukar posisi dengan sektor pertanian besar. Sekali lagi, tujuan pemeringkatan sektor ini adalah salah satu upaya untuk dapat memberikan gambaran bila akan ditetapkan suatu kebijakan yang di dalamnya terdapat urutan prioritas. Sedangkan dampak digulirkannya kebijakan keuangan mikro dilihat dari indeks keterkaitan ke depan suatu sektor dalam perekonomian akan terlihat dari nilai perubahan

indeks keterkaitan ke depan sektor tersebut sebelum dan sesudah dilakukannya simulasi.

Tabel 4.20. Peringkat sektoral berdasarkan Forward Linkage Sebelum dan sesudah Simulasi

No Urut		Sektor	Forward Linkage Awal		Sektor	Forward Linkage Simulasi
1	6	Industri Pengolahan (Besar)	3,03659	6	Industri Pengolahan (Besar)	3,06810374
2	4	Pertambangan (Besar)	1,39125	10	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Kecil, Menengah)	1,58192168
3	10	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Kecil, Menengah)	1,37587	5	Industri Pengolahan (Kecil, Menengah)	1,4920269
4	14	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Kecil, Menengah)	1,22269	15	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Besar)	1,42537177
5	1	Pertanian dan Sarana Pertanian (Kecil, Menengah)	1,16038	12	Pengangkutan dan Komunikasi (Besar)	1,1670071
6	15	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Besar)	1,08325	14	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Kecil, Menengah)	1,02808589
7	5	Industri Pengolahan (Kecil, Menengah)	1,00628	1	Pertanian dan Sarana Pertanian (Kecil, Menengah)	0,9299973
8	12	Pengangkutan dan Komunikasi (Besar)	0,88294	11	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Besar)	0,88940474
9	13	Pengangkutan dan Komunikasi (Kecil, Menengah)	0,80519	13	Pengangkutan dan Komunikasi (Kecil, Menengah)	0,80109241
10	7	Listrik, Gas, dan Air	0,70376	17	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Kecil, Menengah)	0,77529958
11	8	Konstruksi (Kecil, Menengah)	0,66909	4	Pertambangan (Besar)	0,76872544
12	2	Pertanian dan Sarana Pertanian (Besar)	0,65012	16	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Besar)	0,59573216
13	3	Pertambangan (Kecil, Menengah)	0,62362	8	Konstruksi (Kecil, Menengah)	0,53253531
14	9	Konstruksi (Kecil, Besar)	0,61142	2	Pertanian dan Sarana Pertanian (Besar)	0,49643831
15	11	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Besar)	0,61037	9	Konstruksi (Kecil, Besar)	0,48687995
16	16	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Besar)	0,58601	7	Listrik, Gas, dan Air	0,4835045
17	17	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Kecil, Menengah)	0,58118	3	Pertambangan (Kecil, Menengah)	0,47787322

Sumber : Data I-O UKM 2003 (Diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 4.21 ada 8 (delapan) sektor yang mengalami perubahan positif. Tetapi berdasarkan tabel ini diketahui pula bahwa beberapa sektor mengalami penurunan indeks keterkaitan ke depan. Sektor-sektor tersebut meliputi sektor Penangkutan dan Komunikasi (kecil, menengah), jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Kecil, menengah), Pertanian dan sarana pertanian baik besar maupun kecil dan menengah, Konstruksi di segala skala, Listrik, gas dan air. Perubahan terkecil ada pada sektor pertambangan besar.

Tabel 4.21. Peringkat Sektoral berdasarkan Nilai Perubahan Forward Linkage

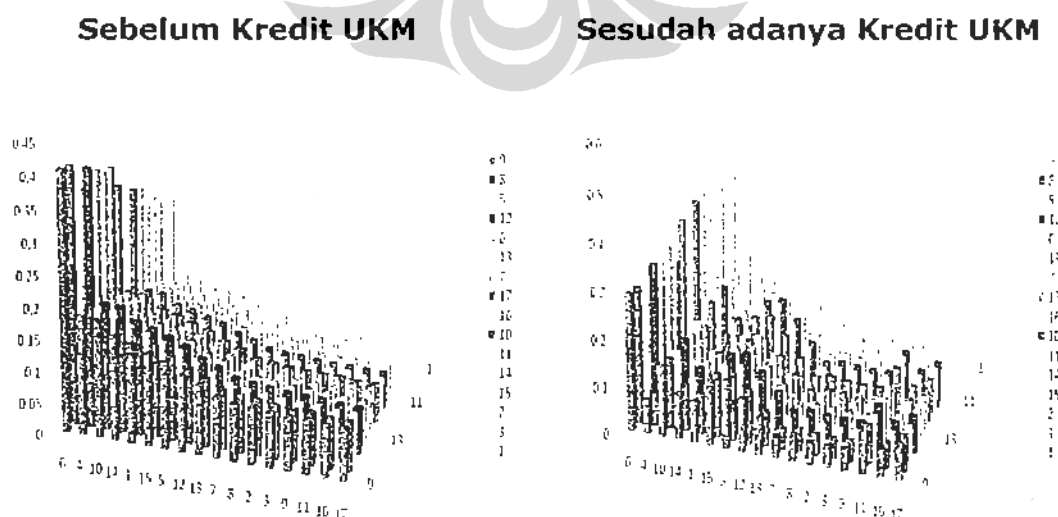
Urutan		Sektor	Perubahan	%
1	5	Industri Pengolahan (Kecil, Menengah)	0,4857447	48,27%
2	11	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Besar)	0,279031	45,71%
3	17	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Kecil, Menengah)	0,1941147	33,40%
4	12	Pengangkutan dan Komunikasi (Besar)	0,2840653	32,17%
5	15	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Besar)	0,3421207	31,58%
6	10	Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Kecil, Menengah)	0,2060515	14,98%
7	16	Jasa Sosial Kemasyarakatan (Besar)	0,0097242	1,66%
8	6	Industri Pengolahan (Besar)	0,0315142	1,04%
9	13	Pengangkutan dan Komunikasi (Kecil, Menengah)	-0,0040948	-0,51%
10	14	Jasa-jasa Dunia Usaha dan lain-lain (Kecil, Menengah)	-0,1946011	-15,92%
11	1	Pertanian dan Sarana Pertanian (Kecil, Menengah)	-0,2303839	-19,85%
12	9	Konstruksi (Kecil, Besar)	-0,1245396	-20,37%
13	8	Konstruksi (Kecil, Menengah)	-0,1365525	-20,41%
14	3	Pertambangan (Kecil, Menengah)	-0,1457421	-23,37%
15	2	Pertanian dan Sarana Pertanian (Besar)	-0,1536776	-23,64%
16	7	Listrik, Gas, dan Air	-0,2202506	-31,30%
17	4	Pertambangan (Besar)	-0,6225242	-44,75%

Sumber : Data I-O UKM 2003 (Diolah)

4.7. Analisis MPM (Multiplier Product Matrix)

Hasil simulasi menunjukkan bahwa dalam periode pengamatan telah terjadi perubahan struktural. Terlihat pada gambar 4.1. dibawah bahwa ada perubahan struktur perekonomian. Namun demikian, perubahan ini tidak terjadi dalam skala besar. Hirarki sektor-sektor produksi dalam perekonomian mengalami perubahan dengan dikucurkannya kebijakan kredit ke sektor UKM sepanjang tahun 2001 hingga 2007. Sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel yang merupakan sektor utama dalam target penerima pendanaan secara hirarki mengalami penurunan peringkat. Hal ini juga ditandai dengan turunnya indeks keterkaitan ke belakang maupun indeks keterkaitan ke depan. Berdasarkan fakta ini, di tahun mendatang, dalam menetapkan kebijakan yang terkait dengan pembiayaan usaha mikro pada sektor-sektor usaha perekonomian, ada baiknya didasarkan pula pada analisis I-O. Terlebih lagi jika orientasi kebijakan adalah pemerataan kinerja sektor-sektor dalam perekonomian. Pemilihan sektor yang tepat akan memberikan efek bergulir bagi sektor-sektor hulu dan hilir yang pada muaranya akan meningkatkan nilai tambah perekonomian secara keseluruhan.

Gambar 4.4. Grafik Struktur Perekonomian Sebelum dan Sesudah adanya Kredit UKM



4.8. Pembahasan dan Analisis

Dilihat dari tujuan penelitian ini adalah untuk melihat efektifitas pemberian kredit ke sektor Kecil dan Menengah serta ingin menjawab sektor manakah yang kiranya dapat memberikan efek yang maksimal terhadap perekonomian. Maka berdasarkan hasil pengolahan data di atas, di akhir pembahasan akan disampaikan rekomendasi sektor-sektor yang dapat dijadikan prioritas bagi pembuatan kebijakan dalam pelaksanaan pemberian kredit usaha kecil dan menengah di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap kondisi perekonomian Indonesia sebelum dilakukannya simulasi, maka terlihat bahwa penetapan kebijakan perbankan dan pemerintah dalam pemberian kredit terutama kredit UKM belum didasari pada hasil analisis input-output. Padahal hasil analisis ini memiliki nilai penting, karena dapat diketahui dengan jelas ke sektor mana pemerintah harus memberikan prioritas. Hasil analisis keterkaitan menunjukkan bahwa jika pemerintah berorientasi pada upaya pemerataan aktivitas perekonomian, maka seharusnya prioritas diberikan kepada sektor Industri Pengolahan baik skala kecil, menengah maupun besar. Sektor-sektor tersebut memiliki indeks keterkaitan yang tinggi bagi sektor-sektor lain baik sebagai penyedia input maupun pengguna output. Namun demikian, ternyata pilihan kebijakan diprioritaskan lebih pada sektor-sektor perdagangan, restoran dan hotel. Salah satu pertimbangan perbankan dan pemerintah saat itu adalah bahwa sektor-sektor tersebut memiliki liabilitas yang relatif tinggi sehingga kemampuan mengembalikan pinjaman dinilai lebih baik dibanding sektor-sektor lainnya. Hal ini juga merupakan pertimbangan tersendiri bagi pihak perbankan dalam memberikan kredit usaha kerja.

Berdasarkan hasil simulasi, diketahui pula telah terjadi perubahan struktural pada sektor-sektor perekonomian. Dari *Income multiplier* terlihat bahwa perubahan terbesar tidak juga berasal dari sektor yang mendapatkan prioritas kredit yaitu sektor perdagangan, restoran dan hotel, tetapi pada sektor Konstruksi Besar. Analisis terhadap efek

multiplier menunjukkan bahwa dari sisi pengganda output, tujuh sektor mengalami penurunan indeks pengganda. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut belum optimal sebagai *tools* yang dapat menciptakan peningkatan output secara nasional di seluruh sektor usaha.

Pengamatan terhadap perubahan *income multiplier* menunjukkan bahwa perubahan terbesar terjadi pada sektor-sektor pertambangan baik skala besar maupun kecil dan menengah serta sektor Pertanian dan Sarana Pertanian skala besar. Dari hasil perhitungan juga nampak enam sektor yang mengalami perubahan negatif indeks pengganda pendapatannya, yaitu sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Industri Pengolahan dan sektor Konstruksi baik skala besar maupun kecil dan menengah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberian kredit lebih banyak memberikan dampak dari segi pendapatan di kelompok sektor-sektor pertambangan, pertanian, perdagangan dan Jasa-jasa. Sektor-sektor tersebut dalam perekonomian cenderung mengalokasikan input di komponen gaji.

Terkait dengan peluang lapangan usaha yang ditimbulkan akibat dilaksanakannya kebijakan pembiayaan usaha mikro ini, maka dianalisa pula perubahan yang terjadi pada indeks pengganda tenaga kerja. Hasil simulasi menunjukkan bahwa setelah dilaksanakannya kebijakan, sektor-sektor yang paling mampu menyerap tenaga kerja adalah sektor-sektor pertambangan, Pertanian dan Sarana Pertanian, Perdagangan, Restoran dan Hotel serta Jasa-jasa Dunia Usaha dalam skala besar. Sementara sektor-sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Industri Pengolahan dan sektor Konstruksi baik skala besar maupun kecil dan menengah diketahui memiliki perubahan negatif. Namun perubahan ini sepertinya bukan dikarenakan sektor tersebut beralih ke jenis usaha yang padat modal, karena sektor-sektor tersebut merupakan yang bukan padat karya.

Analisa keterkaitan menunjukkan bahwa setelah dilakukan simulasi terjadi perubahan hirarki sektor-sektor dalam perekonomian baik dilihat dari indeks keterkaitan ke belakang maupun indeks keterkaitan

ke depan. Peringkat sektoral berdasarkan indeks keterkaitan ke belakang mengalami perubahan yang sangat signifikan. Sektor-sektor yang awalnya sangat tidak dibutuhkan outputnya untuk mendorong perekonomian, menjadi sektor yang sangat dibutuhkan. Sektor Pertambangan besar menjadi sektor yang tambahan outputnya akan mendorong perekonomian sangat tinggi, karena penambahan output pada sektor ini mendorong permintaan input dari sektor-sektor lain sangat tinggi. Sedangkan untuk sektor yang mendapat prioritas yakni sektor perdagangan, Restoran dan Hotel ternyata tidak terlalu memiliki keterkaitan terhadap sektor lain.

Sementara itu analisa terhadap keterkaitan ke depan (*forward linkage*) sektor-sektor dalam perekonomian setelah dilakukannya simulasi menunjukkan terjadi pula perubahan hirarki. Sebagian besar perubahannya adalah negatif, artinya output dari sektor-sektor tersebut semakin tidak dibutuhkan oleh sektor-sektor lain. Yang menarik adalah dari sektor Pertambangan besar, dari sisi *backward linkage* sektor ini mengalami perubahan tertinggi tetapi dari *forward linkage* sektor perambangan besar ini mengalami penurunan yang laing besar.

Jika kebijakan pemberian kredit yang dilaksanakan pemerintah didasarkan pada analisis input-output, seharusnya sektor-sektor yang sebelum dilakukannya simulasi memiliki efek pengganda yang besar, setelah simulasi pun masih memiliki potensi yang sama. Dari hasil simulasi yang telah dilakukan sumber perubahan outputnya, maka sektor Pertambangan Besar adalah sektor yang sangat potensial dalam menghasilkan tambahan output bagi perekonomian. Hal ini berarti pula bahwa dengan mengacu pada kondisi ini sebagai tahun dasar pembuatan kebijakan, maka sektor-sektor tersebut dapat dijadikan prioritas dalam Pemberian kredit di tahun mendatang..

Berdasarkan temuan tersebut di atas dapat disimpulkan secara ekonomi akan lebih menguntungkan jika kredit diberikan pada sektor yang memiliki keterkaitan tinggi dengan sektor skala besar, karena akan menghasilkan tingkat pertumbuhan output paling tinggi. Hal ini terjadi karena biasanya sektor dalam kelompok usaha besar

mempunyai *forward* dan *backward linkage* yang besar. Sehingga jika terjadi perubahan pada kelompok ini akan memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian. Sedangkan jika kredit diberikan pada kelompok UKM maka menghasilkan perubahan total output yang lebih kecil. Hal ini terkait bahwa kelompok usaha UKM menghasilkan output berupa barang-barang *final demand*.

Agar kelompok UKM tidak tertinggal jauh dengan pertumbuhan kelompok usaha besar maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat *linkage* antara kelompok usaha skala besar dengan kelompok UKM, misalnya dengan sistem subkontrak seperti halnya yang telah dilakukan di beberapa negara seperti Jepang, Korea Selatan dan Taiwan, dimana terdapat keterkaitan yang kuat antar kelompok skala usaha.

Sistem subkontrak ini memang mengandung kelemahan, khususnya unsur eksploitasi terhadap subkontraktor, terutam dalam keadaan ekonomi sulit, dimana pengusaha besar berusaha menggeser beban ekonomi ke subkontraktor, misalnya dengan memutuskan hubungan atau memaksa subkontraktor menjual dengan harga lebih murah dari yang telah disepakati.

4.8.1. Perbandingan simulasi jika Kredit diberikan pada Sektor Besar dibandingkan dengan Kredit diberikan pada Sektor UKM.

Dari hasil penjabaran tentang simulasi pemberian kredit pada sektor UKM, di dapat kesimpulan sementara bahwa ternyata sektor Besar masih merupakan sektor yang memberikan multiplier terbesar baik dari sisi output dan income, hanya sisi employment multiplier tertinggi saja yang berasal dari sektor kecil menengah. Lantas bagaimanakah jika kredit-kredit tersebut diberikan pada sektor-sektor besar, apakah akan memberikan dampak yang lebih baik. Pada sub bab ini akan terlihat hasil simulasi jika kredit diberikan pada sektor besar.

4.8.1.1. Perbandingan Output Multiplier Hasil Simulasi Kredit Pada Sektor Besar

Tabel 4.22. Perbandingan Output Multiplier Hasil Simulasi Kredit pada Sektor Besar dan UKM (peringkat 5 terbesar)

Sektor	Urutan Hasil Simulasi Kredit pada Skala Usaha Kecil Menengah	Urutan Hasil Simulasi Kredit pada Skala Usaha Besar
Pertambangan (B)	1	1
Pertambangan (KM)	2	3
Pertanian dan Sarana Pertanian (KM)	3	2
Pertanian dan Sarana Pertanian (B)	4	4
Jasa-jasa, Dunia Usaha, dan lain-lain (B)	5	5

Keterangan: (B)=Besar, (KM)=Kecil Menengah

Dari tabel di atas, hampir tidak ada perbedaan berarti pada pengganda output jika kredit yang diberikan kepada sektor kecil dan menengah diberikan kepada sektor usaha skala besar. Sektor yang masuk dalam 5 besar pemilik pengganda output tertinggi masih sektor yang sama. Hanya urutannya sedikit berbeda. Pada pemberian kredit kepada sektor skala usaha besar sektor pertanian dan sarana pertanian (kecil menengah) menempati urutan nomor dua, dan sektor pertambangan (kecil dan menengah) ada di urutan ketiga, sedangkan jika kredit diberikan pada sektor skala kecil dan menengah urutan tersebut menjadi terbalik.

Jika kita melihat urutan prioritas pemberian kredit yang ada, maka dibandingkan pada urutan sektor dalam 5 besar tersebut, ternyata sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel menempati jumlah kredit terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya. Seharusnya dalam pemberian kredit perbankan dapat melihat pada urutan seperti di atas. Sehingga baik sektor besar maupun UKM yang mendapat prioritas adalah sektor Pertambangan, Pertanian dan sarana Pertanian serta sektor Jasa-jasa dunia usaha dan lain-lain.

4.8.1.2. Perbandingan Employment Multiplier Hasil Simulasi

Kredit Pada Sektor Besar

Tabel 4.23. Perbandingan Employment Multiplier Hasil Simulasi Kredit pada Sektor Besar dan UKM (peringkat 5 terbesar)

Sektor	Urutan Hasil Simulasi Kredit pada Skala Usaha Kecil Menengah	Urutan Hasil Simulasi Kredit pada Skala Usaha Besar	Jumlah Tenaga Kerja (orang)
Pertanian dan Sarana Pertanian (KM)	1	1	39940366
Jasa Sosial Kemasyarakatan (B)	2	2	6865314
Perdagangan, Restoran, dan Hotel (KM)	3	3	15898951
Pengangkutan dan Komunikasi (B)	4	4	4063058
Pertambangan (KM)	5	5	713600

Keterangan: (B)=Besar, (KM)=Kecil Menengah

Simulasi pemberian kredit pada sektor besar ternyata tidak terdapat perubahan pada pengganda tenaga kerja jika kredit diberikan kepada skala usaha kecil menengah atau kepada skala usaha besar. Pada urutan 5 besar dari kedua simulasi diperoleh urutan pengganda tenaga kerja dari yang terbesar adalah sektor pertanian dan sarana pertanian (skala kecil dan menengah), sektor jasa sosial kemasyarakatan (skala besar), sektor perdagangan restoran, dan hotel (skala kecil menengah), sektor pengangkutan dan komunikasi (skala besar), dan terakhir sektor pertambangan (skala kecil menengah).

Jika dilihat dari jumlah tenaga kerja pada sektor-sektor tersebut di atas ternyata memang sektor pertanian dan sarana pertanian menempati urutan pertama dalam jumlah tenaga kerja serta kemampuan menyerap tenaga kerja dalam perekonomian. Oleh karena

itu kebijakan pemerintah yang mendukung sektor tersebut akan membantu memecahkan persoalan ketenaga kerjaan.

4.8.1.3. Perbandingan Income Multiplier Hasil Simulasi Kredit Pada Sektor Besar

Tabel 4.24. Perbandingan Income Multiplier Hasil Simulasi Kredit pada Sektor Besar dan UKM (peringkat 5 terbesar)

Sektor	Urutan Hasil Simulasi Kredit pada Skala Usaha Kecil Menengah	Urutan Hasil Simulasi Kredit pada Skala Usaha Besar	Jumlah Konsumsi (Milyar Rupiah)
Perdagangan, Restoran dan Hotel (B)	1	1	16.486.144
Jasa Sosial Kemasyarakatan (KM)	2	2	24.376.852
Jasa-jasa, Dunia Usaha, dan lain-lain (B)	3	3	28.491.224
Pertanian dan Sarana Pertanian (KM)	4	4	107.787.882
Pengangkutan dan Komunikasi (B)	5	5	40.855.453

Sumber: Hasil estimasi, diolah

Keterangan: (B)=Besar, (KM)=Kecil Menengah

Tidak terdapat perubahan pada pengganda pendapatan setelah kredit diberikan kepada skala usaha kecil menengah atau kepada skala usaha besar. Pada urutan 5 besar dari kedua simulasi diperoleh urutan pengganda pendapatan dari yang terbesar adalah masih pada sektor pertanian dan sarana pertanian (skala kecil dan menengah). Diikuti oleh sektor jasa social kemasyarakatan (skala besar), sektor perdagangan restoran, dan hotel (skala kecil menengah), sektor pengangkutan dan komunikasi (skala besar), dan yang terakhir adalah sektor pertambangan (skala kecil menengah).

4.8.2. Alasan mengapa Sektor Pertambangan skala besar memperoleh manfaat terbanyak akibat tambahan investasi pada sektor-sektor dengan skala kecil dan menengah selama kurun waktu 2001-2007.

Pada saat awal, tahun 2000, sektor pertambangan skala besar menempati urutan terakhir pada *backward linkage* atau keterkaitan sektor ke belakang, artinya sektor ini paling akhir dibutuhkan oleh sektor-sektor lainnya, sektor ini dalam transaksi intermediate outputnya dibutuhkan oleh sektor lain namun hampir tidak membutuhkan output dari sektor lainnya.

Setelah adanya investasi pada seluruh sektor pada skala usaha kecil dan menengah, sektor ini menjadi sektor yang sangat membutuhkan sektor output dari sektor lainnya dan hasil outputnya justru tidak menjadi input pada sektor lainnya di dalam negeri. Pada hasil estimasi diperoleh *backward linkage* sektor pertambangan besar ini menjadi yang terbesar nilai linkagennya.

Berbeda dengan *backward linkage*, keterkaitan ke depan terhadap sektor lain (*forward linkage*) sektor pertambangan besar pada urutan terbesar ke 2 saat tahun 2000, namun setelah shock hasil estimasinya menunjukkan bahwa sektor ini menempati urutan ke 11 terbesar. Dari hasil ini diketahui bahwa produk dari sektor pertambangan skala besar semakin kurang dibutuhkan sebagai barang input oleh sektor lainnya.

Keterkaitan ke depan (*forward linkage*) menunjukkan besarnya kemampuan output sektor tersebut menjadi barang input bagi sektor lainnya. Hasil estimasi bagian ini sesuai dengan apa yang terjadi pada keterkaitan ke belakang (*backward linkage*)

Dari kedua hal tersebut di atas, diketahui bahwa sektor pertambangan skala besar posisinya semakin baik dari sisi produksi. Hanya saja, karena semakin kecil *forward linkage*-nya, maka artinya sektor ini dimanfaatkan sebagai sektor utama pada ekspor nasional. Didukung dengan kebutuhan dunia akan tambang produksi Indonesia dan volume ekspor barang tambang Indonesia maka memang memperkuat posisi sektor pertambangan skala besar.

Tingginya perubahan tingkat produksi sektor pertambangan skala besar sebenarnya lebih disebabkan oleh tingginya permintaan dunia dan kebutuhan ekspor Indonesia. Investasi dengan pemberian kredit pada sektor dengan skala usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk sektor pertambangan, merupakan kejutan yang memberi peningkatan pada output seluruh sektor, termasuk sektor pertambangan skala besar. Sektor ini dalam karakteristik perekonomian Indonesia dalam kurun waktu 2001-2007 terdukung dengan kebijakan yang ada dan oleh pengaruh global. Kenaikan harga energy menyebabkan produksi sektor pertambangan Indonesia meningkat pesat. Tentunya hal ini akan dinikmati oleh pertambangan dalam skala besar karena struktur produksinya lebih efisien dan pasar produknya lebih untuk memenuhi kebutuhan internasional.

Peningkatan output, ditandai oleh meningkatnya *income multiplier*, sektor pertambangan skala besar ini tentunya menyebabkan sektor ini lebih banyak menyerap tenaga kerja, baik dari sisi waktu kerja maupun jumlahnya. Kecenderungan ini juga mengakibatkan kenaikan pencacanda tenaga kerja (*employment multiplier*) sangat drastis. Dari hasil estimasi diketahui bahwa sektor pertambangan skala besar ini yang menempati urutan terakhir pada tingkat penyerapan tenaga kerja pada tahun 2000 meningkat menjadi urutan ke-10 setelah adanya tambahan investasi pada sektor-sektor dengan skala usaha kecil dan menengah.

Semakin banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh sektor pertambangan skala besar ini dalam belanja tenaga kerja tentunya pada sisi yang lain juga meningkatkan nilai tambah bagi tenaga kerja berupa tingkat upah dan gaji yang diterima tenaga kerja. Peningkatan balas jasa tenaga kerja ini juga ditandai dengan perubahan yang besar pada tingkat penerimaan pendapatan pada sektor pertambangan skala besar. Hasil estimasi input output pada sektor ini, dari posisi ke 17, atau terakhir, pada tahun 2000, sektor pertambangan skala usaha besar meningkat menjadi urutan ke-11 terbesar pada akhir tahun 2007.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak adanya pemberian kredit pada sektor UKM sepanjang tahun 2001 – 2007. Untuk melihat dampak tersebut, maka diamati perekonomian dengan menggunakan I-O UKM tahun 2000 setelah diberi kredit dan kemudian dibandingkan dengan I-O tujuh tahun kemudian dengan membuat simulasi I-O menggunakan metode RAS. Dua kondisi perekonomian yang tersaji kemudian dibandingkan baik dari sisi multipliernya maupun keterkaitan antar sektornya.

Dengan mengamati perekonomian tahun 2000, terlihat bahwa kebijakan perbankan dalam memberikan kredit tidak didasari oleh daya multiplier sebuah sektor atau keterkaitannya dengan sektor lain. Kebijakan rencana kredit UMKM ini belum efektif jika dilihat dari hasil analisis Input-Output (IO) pada perekonomian tahun 2000. Kebijakan kredit dikucurkan pada sektor-sektor yang memiliki liabilitas yang relatif tinggi sehingga kemampuan mengembalikan pinjaman dinilai lebih baik dibanding sektor-sektor lainnya. Sektor tersebut adalah Sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel.

Pemerintah seharusnya merencanakan pembiayaan sektor perekonomian skala usaha kecil dan menengah yang memberikan tingkat pengganda yang terbaik. Pada analisis pengganda output tabel IO UKM tahun 2000 diperoleh sektor Konstruksi (Besar) memberikan nilai pengganda output tertinggi yaitu sebesar 2,29932916. Sektor Pertanian, dan Sarana Pertanian (Kecil, menengah) menempati tingkat pertama terbesar untuk sektor yang memberikan pengganda tenaga kerja, dan sektor Perdagangan, Restoran, dan Hotel (Besar) untuk pengganda pendapatan yang tertinggi. Keduanya juga merupakan hasil analisis pengganda untuk tabel IO UKM tahun 2000. Pada hasil analisis keterkaitan sektor kedepan dan kebelakang, sektor Industri Pengolahan (Besar) menempati keterkaitan ke depan yang terbesar,

sementara sektor Konstruksi (Besar) menempati keterkaitan yang terbesar ke belakang. Dari hasil analisis pengganda dan keterkaitan sektoral, sebaiknya semestinya pemerintah merencanakan sektor sekunder dan tersier berskala besar sebagai sektor yang memperoleh kredit terbanyak. Berdasarkan analisis tabel IO UKM tahun 2000 adalah sektor Konstruksi skala besar, Perdagangan, Restoran dan Hotel skala Besar, dan Industri Pengolahan Besar. Pada sektor primer hanya sektor Pertanian dan Sarana Pertanian (Kecil, Menengah) yang memberikan kontribusi terbesar pada penyerapan tenaga kerja. Karena dengan memberikan kredit kepada sektor tersebut, maka tujuan pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih tercapai secara maksimal.

Berdasarkan hasil simulasi, diketahui pula telah terjadi perubahan struktural pada sektor-sektor perekonomian. Analisis terhadap efek multiplier menunjukkan bahwa dari sisi *income multiplier*, tujuh sektor mengalami penurunan indeks pengganda. Sektor-sektor tersebut adalah Sektor Industri Pengolahan, Sektor Konstruksi, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta Sektor Listrik, Gas, dan Air baik untuk skala Kecil hingga besar. Hal ini menunjukkan bahwa kredit yang diberikan pada sektor-sektor tersebut pada akhirnya akan diperlakukan sebagai *final demand* di luar komponen investasi sehingga kurang dapat menghasilkan *spread effect*.

Pengamatan terhadap perubahan *income multiplier*, dan *employment multiplier* menunjukkan bahwa perubahan terbesar terjadi pada sektor Pertambangan Besar. Tingginya perubahan tingkat produksi sektor pertambangan skala besar sebenarnya lebih disebabkan oleh tingginya permintaan dunia dan kebutuhan ekspor Indonesia. Investasi dengan pemberian kredit pada sektor dengan skala usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk sektor pertambangan, merupakan kejutan yang memberi peningkatan pada output seluruh sektor, termasuk sektor pertambangan skala besar. Sektor ini dalam karakteristik perekonomian Indonesia dalam kurun

waktu 2001-2007 didukung dengan kebijakan yang ada dan oleh pengaruh global. Kenaikan harga energy menyebabkan produksi sektor pertambangan Indonesia meningkat pesat. Tentunya hal ini akan dinikmati oleh pertambangan dalam skala besar karena struktur produksinya lebih efisien dan pasar produknya lebih untuk memenuhi kebutuhan internasional.

Analisa keterkaitan menunjukkan bahwa setelah dilakukan simulasi terjadi perubahan hirarki sektor-sektor dalam perekonomian baik dilihat dari indeks keterkaitan ke belakang maupun indeks keterkaitan ke depan. Perubahan positif baik dari keterkaitan ke depan maupun ke belakang di dapat dalam sektor pertambangan, Perdagangan, Restoran dan Hotel, Jasa-jasa dunia usaha, Pertanian dan Sarana Pertanian serta jasa sosial kemasyarakatan. Sedangkan pada sektor-sektor Konstruksi, Pengangkutan dan Komunikasi serta Listrik, Gas dan Air perubahan yang terjadi justru negatif. Hal ini menunjukkan bahwa dengan diprioritaskannya sektor-sektor tersebut dalam kebijakan pembiayaan usaha mikro telah membuat *backwash effect* sektor-sektor tersebut berkurang. Sektor-sektor tersebut cenderung tidak bergantung lagi pada sektor lain yang menyediakan input produksinya.

Dalam struktur perekonomian Indonesia tahun 2000 akan lebih menguntungkan jika kucuran kredit diberikan pada sektor perekonomian kecil dan menengah yang memiliki keterkaitan tinggi dengan sektor skala besar karena akan menghasilkan dampak perekonomian yang paling baik. Implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan meningkatkan upaya pemerintah untuk mendorong sektor yang memiliki keterkaitan tinggi dengan dengan sektor-sektor skala besar dalam menerapkan kebijakan sub kontrak usaha mikro serta jenis kreditnya.

Dari hasil simulasi pemberian kredit di sektor besar, terlihat tidak adanya perbedaan hasil simulasi dibandingkan jika kredit tersebut dikucurkan pada sektor UKM. Hal ini menandakan bahwa urutan prioritas yang didapat dari hasil simulasi memang terjadi baik bila

kredit diberikan ke sektor UKM ataupun ke sektor Besar. Tetapi bila dilihat dari total multiplier yang terjadi dalam perekonomian, maka pemberian kredit di sektor UKM akan memberikan dampak pengganda yang lebih besar dibandingkan jika kredit diberikan pada sektor Besar. Dengan demikian menunjukkan bahwa jika ingin perekonomian tumbuh lebih besar, maka sektor UKM harus mendapatkan prioritas pemberian kredit.

5.2. Rekomendasi

Hasil analisis keterkaitan menunjukkan bahwa jika pemerintah berorientasi pada upaya pemerataan aktivitas perekonomian, maka seharusnya prioritas diberikan kepada sektor Industri Pengolahan baik skala besar, kecil maupun menengah. Dalam arti luas seharusnya pemerintah memberikan pula prioritas pada sektor-sektor industri, dimana pada sektor-sektor ini output yang dihasilkan akan menjadi input bagi sektor lain. Sektor-sektor tersebut memiliki indeks keterkaitan yang tinggi bagi sektor-sektor lain baik sebagai penyedia input maupun pengguna output.

Dari hasil penelitian ini diharapkan di masa yang akan datang pemerintah mampu menciptakan kebijakan-kebijakan di bidang pemberian kredit yang mampu berdampak pada pemerataan di semua sektor-sektor perekonomian berbagai skala usaha. Keputusan dalam menentukan alokasi bagi suatu sektor yang didasarkan pada analisa input-output menjadi hal yang sangat penting agar kebijakan yang dilaksanakan mampu menghasilkan pertumbuhan output yang tinggi serta memperkuat keterkaitan antar sektor dalam perekonomian.

Untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan di seluruh sektor yang ada dalam perekonomian maka pemerintah juga harus memberikan perhatian pada sektor-sektor yang memiliki keterkaitan tinggi dengan sektor-sektor besar baik sebagai penyedia input maupun pengguna output. Hal ini berimplikasi pada perlunya aspek pendampingan dan penguatan manajemen di sektor-sektor usaha di luar sektor jasa. Diharapkan hal ini dapat mengurangi keengganan

perbankan untuk mengalokasikan pembiayaan ke sektor-sektor tersebut.

Upaya berikutnya yang harus dilakukan pemerintah adalah menciptakan kebijakan yang mampu mengarahkan sektor-sektor untuk menciptakan keterkaitan antar sektor sehingga akan diperoleh nilai tambah dalam yang lebih besar dalam perekonomian. Peran pemerintah diharapkan tidak hanya berhenti pada tahap penentuan alokasi pembiayaan per sektor, melainkan adalah lebih lanjut bagaimana suatu sektor memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya dengan menciptakan keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sehingga dapat menciptakan pertumbuhan output yang optimal. Hal ini membutuhkan skenario lebih lanjut mengenai pengembangan sektoral yang mampu memberi dampak pada kegiatan ekonomi di sektor-sektor lain.

Prioritas pemberian kredit ke sektor UKM memang memberikan efek yang lebih tinggi dibandingkan jika kredit diberikan ke sektor besar, tetapi karena multiplier terbesar ada pada sektor besar, maka kebijakan sub kontrak antara sektor besar yang memiliki multiplier besar dengan sektor UKM yang terkait menjadi salah satu pilihan pemerintah untuk memajukan sektor UKM.

5.3. Saran

Analisis di dalam I/O terkendala asumsi "harga tetap" pada komoditinya. Pada analisis ini kenaikan harga komoditi yang menjadi input antara selama kurun waktu shock tidak dapat ditangkap oleh perubahan tabel IO. Dengan dapat diketahuinya perubahan harga semestinya volume transaksi input antara antar sektor pada berbagai skala usaha dapat diestimasi lebih tepat. Selain itu kelemahan analisis ini adalah tidak diketahuinya kelompok rumah tangga penerima manfaat pembiayaan dan tidak adanya perubahan kapital pada setiap sektor. Sehingga perubahan income serta output yang terjadi pada tiap sektor tidak dapat dipilah-pilah apakah akibat adanya

penambahan kredit dalam perekonomian ataukah karena adanya penambahan kapital di luar kredit yang diterima.

Dalam analisis IO, sering diperoleh bahwa struktur perekonomian dapat berubah karena adanya kejutan-kejutan melalui kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah. Pada pemberian kredit sektor-sektor ekonomi khususnya pada skala usaha mikro kecil dan menengah setiap tahunnya tentu juga menyebabkan perubahan pada struktur perekonomian. Penelitian ini hanya melihat dampak pemberian kredit UMKM pada akhir periode dengan akumulasi jumlah kredit UMKM selama 2001-2007. Akan lebih terarah jika kebijakan pemberian kredit yang diterapkan didasarkan pada analisis tahunan terhadap perekonomian yang digambarkan dalam IO. Sehingga setiap tahun dapat ditentukan sektor terbaik untuk diberikan kredit dari perbankan yang juga dapat memberikan dampak positif terbaik pada pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan rumah tangga.

Perlu adanya kajian lebih dalam untuk mengetahui manfaat bagi setiap kelompok rumah tangga (SAM analysis) yang menerima manfaat atas pemberian kredit pada sektor perekonomian skala kecil dan menengah ini. Perubahan harga komoditi dan tingkat akumulasi kapital setiap sektor selama kurun waktu yang panjang juga dapat dianalisis dengan CGE untuk diketahui inflasi yang dihasilkan dari skema pembiayaan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A., 2002. Makalah Pada Seminar Sehari Tentang Kebijakan Pengawasan Baitul Maal Wat Tanwil dari Lembaga Keuangan Mikro, Jakarta.
- Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, beberapa terbitan. Bank Indonesia, Laporan Tahunan Bank Indonesia, beberapa terbitan.
- Chotim, E.E. dan Handayani, A.D., 2001. Lembaga Keuangan Mikro Dalam Sejarah, Jurnal Analisis Sosial, Nolume 6, Nomor 3 Desember.
- Damanhuri, D.S., 1996. Ekonomi Politik Alternatif. Agenda Reformasi Abad 21. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Departemen Perindustrian, Kebijakan Pembangunan Industri Nasional, 2005.
- Friedman, John. 1966, *Regional Development Policy*. MIT Press, Cambridge Mass.
- Gore, Charles. 1984. *Region In Question: Space, Development Theory and Regional Policy*, Methuen, London.
- Kartasasmita, G., 1996. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Cides. Jakarta.
- Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Statistik Koperasi Tahun 2005.
- Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Rencana Strategis Tahun 2004-2009.
- Kuklinski, Antoni. 1984. Growth Poles and Growth Centre in Regional Planning, Mouton, the Hague.

Maskun, Sumitro. 1994. *Pembangunan Masyarakat Desa: Azas, Kebijakan dan Manajemen*. M.W Mandala Yogyakarta.

Rothman, J., 1984. *Approaches to Community Intervention, Strategies of Community Intervention*. Columbia University Press.

Rustiani, F. F. (Ed). 1996. *Presiding Dialog Nasional dan Lokakarya Pengembangan Ekonomi Rakyat Dalam Era Globalisasi: Masalah, Peluang dan Strategi Praktis*. Yayasan Akatiga dan Yapika.

Tilaar, H.A.R, 1997. *Pengembangan Sumberdaya Manusia Dalam Era Globalisasi*. Gramedia, Widiasara Indonesia, Jakarta.

Tyler, William G. 1984. *National Development and Regional Policy*. Maruzen Asia.

Uphoff, N., *dalam* Dasgupta, P. dan Seregeldin, I., 1999. *Sosial Capital. A Multifaceted Perspective*. The World Bank. Washington, D.C.
akhir tahun 2007